



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**



LAPORAN ANTARA

**Kajian Kerjasama Utara-utara Sulawesi Wilayah
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**

Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Mandiri, Sejahtera, Berbudaya dan Berkeadilan



LAPORAN ANTARA



KAJIAN KERJASAMA UTARA-UTARA WILAYAH BOLAANG MONGONDOW UTARA

TIM PENYUSUN

Nama	Jabatan Dalam Tim	Bidang Keahlian
Dr. Ade Muharam, S.Pi, M.Si	Ketua	Perikanan dan Kelautan
Yowan Tamu, S.Ag, M.A	Anggota	Sosial dan Budaya
Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum	Anggota	Sosial dan Budaya
Citra Panigoro, S.Pi, M.Si	Anggota	Perikanan dan Kelautan
Wawan Tolinggi, S.P, M.Si	Anggota	Pertanian dan Peternakan
Agus Bahar, S.Pt, M.Si	Anggota	Pertanian dan Peternakan
Supardi Nani, S.E, M.Si	Anggota	Ekonomi, Industri dan UMKM
Dr. Niswatin, S.Pd, SE, MSA	Anggota	Ekonomi, Industri dan UMKM
Arfan Usman Sumaga, ST, MT	Anggota	Sarana Umum dan Infrastruktur
Azis Bouty, S.Kom, M.Kom	Anggota	Sarana Umum dan Infrastruktur

Kerjasama Antara:

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Dengan
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2015

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi luas (*big bang decentralization*) yang berkembang pesat sejak 1999 telah menempatkan daerah (khususnya kabupaten/kota) sebagai ujung tombak penyelenggaraan fungsi pelayanan umum dan pembangunan. Sejalan dengan hal tersebut, maka daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan, serta hak untuk menggali berbagai potensi dan sumber pendapatan guna mendukung implementasi urusan pemerintahan secara optimal. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa kebijakan otonomi daerah sesungguhnya memberikan tanggungjawab dan beban kerja yang jauh lebih berat kepada daerah, dibanding pada masa-masa sebelumnya.

Sementara disisi lain, pemerintah daerah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan klasik berupa keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya, baik sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana, sehingga tidak ada kata lain, pemerintah beserta seluruh jajarannya dituntut untuk berpikir secara kreatif dan inovatif untuk membangun sistem manajemen pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan suatu urusan atau kewenangan tertentu. Pemerintah daerah harus menggalang kekuatan dengan komponen masyarakat lainnya demi mewujudkan tujuan pembangunan secara keseluruhan. Dan disinilah letak pentingnya kerjasama baik kerjasama antar pemerintahan (*government to government*), kerjasama pemerintah dengan swasta (*government to business*), serta kerjasama pemerintah dengan masyarakat (*government to civil society*).

Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumber daya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan kesenjangan sosial. Melalui kerjasama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah. Selain karena alasan keterbatasan sumber daya, urgensi penyelenggaraan kerjasama juga didorong oleh adanya perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin tinggi.

Dalam konteks pengembangan model kerjasama antar daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat potensial untuk menerapkan pola kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dengan dengan dua wilayah kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah) dan Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo) sebagaimana yang telah digagas oleh ketiga pimpinan daerah pada 8 Desember 2014 lalu dalam bentuk Deklarasi Utara-utara.

Untuk itu, perlu adanya suatu kajian yang komprehensif dan mendalam tentang berbagai hal yang berhubungan dengan Model Kerjasama Utara-utara yang telah digagas oleh para Pimpinan Daerah, yaitu Bupati Buol (Sulawesi Tengah), Bupati Gorontalo Utara (Provinsi Gorontalo) dan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Provinsi Sulawesi Utara). Kajian ini akan sangat berdaya guna apabila didahului oleh kajian yang mendalam mengenai potensi daerah yang nantinya akan sangat mewarnai model kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Dengan adanya kajian mengenai hal ini, diharapkan dapat dilakukan identifikasi terhadap berbagai kondisi, permasalahan, dan kemungkinan alternatif kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mendorong semakin erat dan kuatnya kerjasama antara beberapa pemerintah daerah di wilayah regional tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Keterbatasan data dan informasi mengenai potensi dasar daerah seringkali menjadi kendala untuk mengembangkan model kerjasama daerah. Jaringan kerja (*networking*) yang produktif dan efisien antar daerah yang melakukan kerjasama justru tidak tercipta karena tidak terdapatnya aspek yang menjadi fokus kerjasama yang didasari oleh potensi daerah masing-masing. Disamping itu, model kerjasama tidak akan lepas dari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, terutama apabila menyangkut program unggulan daerah masing-masing. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengenai kerjasama antar daerah ini, khususnya Kerjasama Utara-utara Sulawesi yang diawali dengan identifikasi potensi dasar daerah yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) aspek kajian, yaitu Aspek Sosial dan Budaya, Aspek Kelautan dan Perikanan, Aspek Pertanian dan Peternakan, Aspek Ekonomi, Industri dan UMKM serta Aspek Sarana Umum dan Infrastruktur.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk Menghasilkan dokumen awal berupa hasil identifikasi potensi wilayah yang merupakan acuan dan bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam melakukan analisa untuk bahan koordinasi antara Pemerintah Daerah yang berisi kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan fokus Kerjasama Utara-utara Sulawesi. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis potensi daerah dalam meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah.
2. Mengkaji aspek sosial budaya, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, ekonomi, industri dan UMKM, serta infrastruktur daerah dalam mengembangkan potensi daerah.
3. Mengidentifikasi model kerjasama yang dapat dikembangkan berdasarkan aspek unggulan daerah.

1.4 Output Penelitian

Output dari penelitian ini adalah:

1. Tersusunnya data dasar potensi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dapat dijadikan bahan rekomendasi dalam implementasi Kerjasama Utara-utara Sulawesi.
2. Teridentifikasinya potensi pembangunan wilayah, termasuk isu dan permasalahan pada aspek sosial budaya, perikanan dan kelautan, pertanian dan peternakan, ekonomi, industri dan UMKM, serta infrastruktur daerah.
3. Tersusunnya model kerjasama, yang dapat dikembangkan dalam rangka Kerjasama Utara-utara Sulawesi

1.5 Manfaat Penelitian

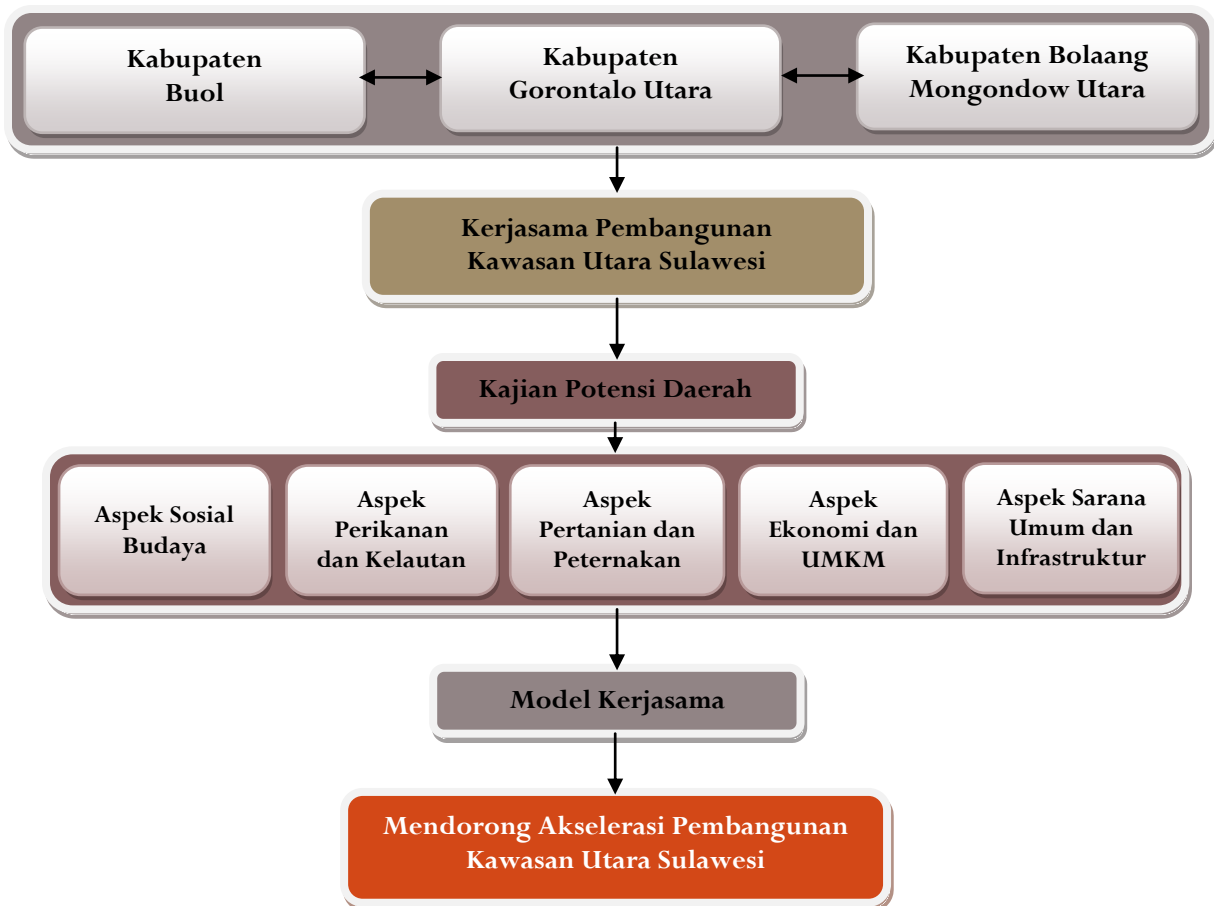
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat,yaitu sebagai berikut:

1. Menjadi masukan bagi daerah khususnya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang akan membentuk kerjasama di Kawasan Utara Sulawesi dengan daerah lainnya pada Aspek Sosial dan Budaya, Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Ekonomi, Industri dan UMKM serta Aspek Sarana Umum dan Infrastruktur.
2. Sebagai bahan advokasi bagi pelaku usaha maupun masyarakat kepada para pemangku kebijakan di daerah untuk menyusun model kerjasama antar daerah dalam meningkatkan

pemberdayaan ekonomi masyarakat, industri berbasis komoditas lokal dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah penyusunan rencana pembangunan wilayah yang dikaitkan dengan kerjasama antar daerah di Kawasan Utara-utara Sulawesi yang pada hakekatnya merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya alam yang menjadi rekomendasi bagi implementasi Kerjasama Utara-utara Sulawesi.



Gambar 1. Kerangka Pikir Kajian Kerjasama Utara Sulawesi

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Pada era desentralisasi luas dewasa ini, terjadi proses perubahan pola pemerintahan yang didominasi oleh rezim Pusat menjadi pola pemerintahan yang lebih berbasis pada kemandirian daerah dengan mengandalkan optimalisasi sumber daya serta pengembangan kolaborasi antar pilar dan/atau aktor pembangunan. Dengan kata lain, peran pemerintah Pusat semakin mengecil, sementara peran pemerintah daerah harus semakin diperkuat. Ini berarti pula bahwa kebijakan otonomi hanya akan berhasil jika diikuti oleh peningkatan kapasitas daerah yang lebih berbasis pada kemampuan pengelolaan yang unggul (*managerialism*).

Melalui ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong daerah untuk melakukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah lainnya maupun dengan pihak swasta guna percepatan pembangunan di daerah. Dengan Kerjasama yang dilakukan antar daerah akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya yang digunakan sehingga masing-masing daerah dapat mencapai manfaat dan keuntungan bersama.

2.2 Kerjasama Antar Daerah

Flo Frank and Anne Smith (2000: 5) menyatakan bahwa kerjasama dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan bersama, yang berjanji untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Kerjasama adalah tentang orang-orang yang bekerjasama bersama-sama dalam suatu hubungan yang menguntungkan, selalu mengerjakan sesuatu hal bersama-sama yang mungkin tidak dapat dicapai sendirian (dalam LAN, 2004). Adapun dalam acuan *Intergovernmental Cooperation*, kerjasama antar pemerintahan didefinisikan sebagai suatu susunan antara dua pemerintah atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, penyediaan suatu layanan atau memecahkan masalah satu sama lain secara bersama.

Hasil studi Departemen Ilmu Ekonomi FEUI (2006) menunjukkan bahwa ukuran dari pemda, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang ada di Indonesia dilihat dari skala ekonomi jauh lebih kecil dari ukuran optimal yang seharusnya. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi. Kerjasama antar daerah adalah suatu

kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pamudji, 1985).

Sedangkan Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mendefinisikan kerjasama antar daerah (*intergovernmental cooperation*) sebagai *"an arrangement two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem"*. Dari definisi tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemda untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut (Pratikno, et.al. 2004):

1. **Manajemen konflik antar daerah**, dimana kerjasama antar daerah dapat menjadi forum komunikasi dan dialog antar aktor utama daerah. Dengan adanya forum seperti ini, maka dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi sehingga konflik antar daerah dapat diantisipasi.
2. **Efisiensi dan Standarisasi Pelayanan**, dimana kerjasama antar daerah dapat dimanfaatkan daerah-daerah untuk membangun aksi bersama. Dalam konteks pelayanan publik, kerjasama antar daerah sangat mendukung daerah menerapkan efisiensi dan standarisasi pelayanan antar daerah.
3. **Pengembangan Ekonomi**, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di suatu wilayah yang akan meningkatkan daya saing kawasan. Seringkali terjadi, pengembangan ekonomi suatu wilayah terhambat karena keterbatasan cakupan wilayah.
4. **Pengelolaan Lingkungan**, dimana kerjasama antar daerah akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama. Tanpa adanya kerjasama tersebut, penanganan lingkungan tidak akan berjalan sinergis sehingga sangat berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, tidak hanya bagi daerah tersebut, tetapi juga bagi daerah lain yang secara geografis berdekatan, seperti kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor.

Berdasarkan pendekatan teoretis, adanya kerjasama antar daerah memang dipercaya dapat menghasilkan berbagai dampak yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Dalam hubungan ini, *Municipal Cooperation Guide* (dalam LAN: 2004) menyebutkan bahwa keuntungan yang dapat diraih dari adanya kerjasama antar daerah antara lain adalah:

- Meningkatkan efisiensi unit-unit operasional.
- Pemerintah daerah dapat memperoleh pelayanan atau produk yang tidak dapat dihasilkan sendiri atau yang hanya dapat dibuat dengan biaya tinggi.
- Menghapuskan duplikasi usaha.
- Beberapa masalah yang dihadapi pemerintah daerah dapat dipecahkan tanpa mengubah struktur dasar dari sistem pemerintah daerah.

Pendapat lain mengenai manfaat kerjasama antar daerah dikemukakan oleh Peter Knip (dalam LAN: 2004) sebagai berikut:

- Memberi kontribusi bagi penguatan pemerintah daerah, karena kerjasama antar daerah mengedepankan pembangunan yang demokratis dan berkelanjutan.
- Daerah yang sedang membangun dan berada pada tahap transisi, dimana tanggung jawab pemerintah daerah meluas secara cepat akibat dari desentralisasi, mempunyai kebutuhan nyata untuk bertukar pengalaman dengan daerah-daerah yang telah maju. Kerjasama antar daerah secara efektif menjembatani kebutuhan tersebut.
- Memberi kontribusi pada peluang pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.

2.3 Alternatif Model Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah

Bidang-bidang kerjasama serta isu yang berkaitan dengan urgensi kerjasama antar Pemerintah Daerah selama ini terkait dengan peningkatan pelayanan publik, kawasan perbatasan, tata ruang, penanggulangan bencana dan penanganan potensi konflik, peningkatan peran provinsi, isu pemekaran daerah, dan isu kemiskinan serta pengurangan disparitas wilayah (Tarigan, 2009).

Menurut PKP2A III LAN (2002), terdapat beberapa model umum yang dipergunakan untuk melaksanakan kerjasama antar daerah, diantaranya:

- 1. Kerjasama Usaha Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen.** Dalam model ini, Badan Kerjasama dipimpin dan dikelola oleh manajemen yang terpisah dari struktur pemerintah daerah. Kedudukan pemerintah daerah hanya sebagai pemilik saham yang dalam operasionalnya akan diwakili oleh anggota komisaris badan usaha tersebut. Dengan demikian, fungsi pengendalian dan pertanggungjawaban badan usaha dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut, pemda sebagai pemilik saham dapat meminta pertanggung jawaban Badan Usaha dan sekaligus pemda

dapat menentukan personil untuk duduk sebagai salah satu anggota dan/atau ketua dari dewan komisaris.

2. **Kerjasama Usaha Tanpa Membentuk Badan/Lembaga Baru.** Kerjasama ini dilakukan antar badan usaha dari suatu daerah dengan daerah lainnya, pada sejumlah tahapan aktivitas usahanya. Misalnya dalam penyediaan bahan baku, produksi, maupun dalam pemasaran barang dan jasanya. Salah satu contohnya misalnya kerjasma antara beberapa PDAM, dimana PDAM satu daerah memandang lebih ekonomis kalau membeli bahan baku (air) dari PDAM daerah lain, dibandingkan dengan membangun instalasi bahan bakunya sendiri. Atau satu Perusda yang memiliki pasar, dapat melakukan kerjasama dengan Perusda lain dalam pemasaran hasil usaha badan usaha daerah lainnya.
3. **Kerjasama Pelayanan Dengan Membentuk Lembaga Baru yang Permanen.** Dalam kerjasama dengan pola ini, kelembagaan baru yang dibentuk merupakan milik bersama bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Kelembagaan ini diberi tugas untuk menangani urusan-urusan atau fungsi-fungsi tertentu, yang apabila dilakukan masing-masing daerah akan terjadi pemborosan, kemungkinan inkonsistensi kebijakan, ketidakefektifan pendayagunaan potensi kawasan itu, atau ketidakefektifan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kawasan itu. Contoh riil mengenai hal ini adalah kelembagaan almagamsi dalam pengelolaan kebersihan / persampahan.
4. **Kerjasama Pelayanan Tanpa Membentuk Lembaga Baru.** Kerjasama ini dilakukan antar instansi (Dinas / Lemtek) dari suatu daerah dengan daerah lainnya, untuk menyelenggarakan pelayanan tertentu, misalnya dalam penyediaan atau pembangunan fasilitas umum dan prasarana dasar seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, sarana sanitasi (MCK), dan sebagainya. Instansi yang terikat dalam kerjasama tersebut cukup membuat kesepakatan tertulis (dokumen kontrak atau MoU), yang berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, materi dan mekanisme kegiatan yang dikerjasamakan, serta pengaturan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Contoh konkrit pola kerjasama ini adalah pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa kampung yang berdekatan namun secara administratif berada di wilayah kabupaten yang berbeda. Contoh lain adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk suatu daerah/kabupaten oleh Puskesmas yang berada di daerah / kabupaten lain.

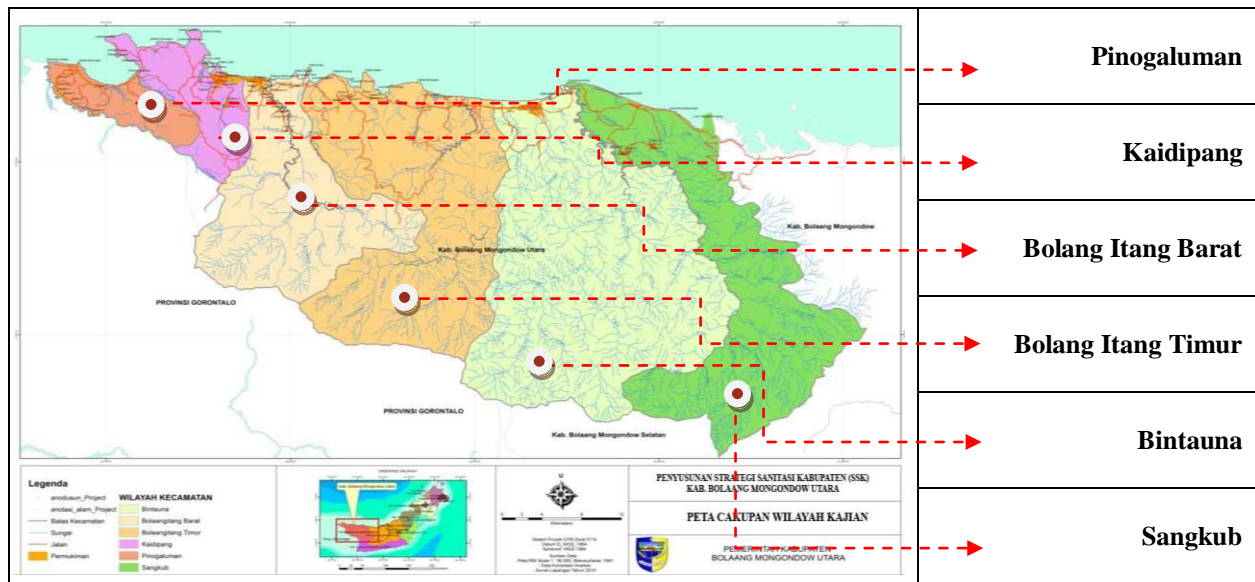
5. **Kerjasama Bantuan Teknis (*technical assistance*)**. Model ini adalah kerjasama pembangunan antara daerah, dimana satu atau beberapa daerah bekerjasama dengan saling memberikan bantuan satu sama lain dalam hal-hal yang bersifat mikro atau yang bersifat teknis operasional penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Beberapa bentuk kerjasama *technical assistance* ini antara lain adalah:

- *Pemberian bantuan teknis*, menugaskan seorang pegawai atau beberapa pegawai yang memiliki kemampuan tertentu kepada daerah lain yang membutuhkan tenaga ahli tertentu untuk membantu mereka melaksanakan tugas pemerintahan tertentu misalnya bantuan tenaga ahli akuntan untuk membantu dalam menyusun neraca anggaran.
- *Pemagangan*, menugaskan seorang atau beberapa orang pegawai untuk melaksanakan program pemagangan di pemerintah daerah lain dalam meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas.
- *Perwakilan daerah*, menugaskan pegawai yang memiliki keahlian tertentu untuk membantu pemerintah daerah lain dalam merencanakan pembangunan daerah yang substansinya bersinggungan dengan kepentingan daerahnya. Tenaga ahli tersebut diberikan mandat untuk mewakili kepentingan daerahnya dalam proses perencanaan atau penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan daerah lain yang terkait dengan kepentingan daerahnya.
- *Pertukaran pegawai*, mengadakan program pertukaran pegawai yang dimaksudkan agar terjadi saling tukar menukar pengalaman dan pengetahuan antara daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

BAB III METODOLOGI

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan September hingga Desember 2015 di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang meliputi 6 (enam) kecamatan.



Gambar 2. Wilayah Kajian Kerjasama Utara-utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

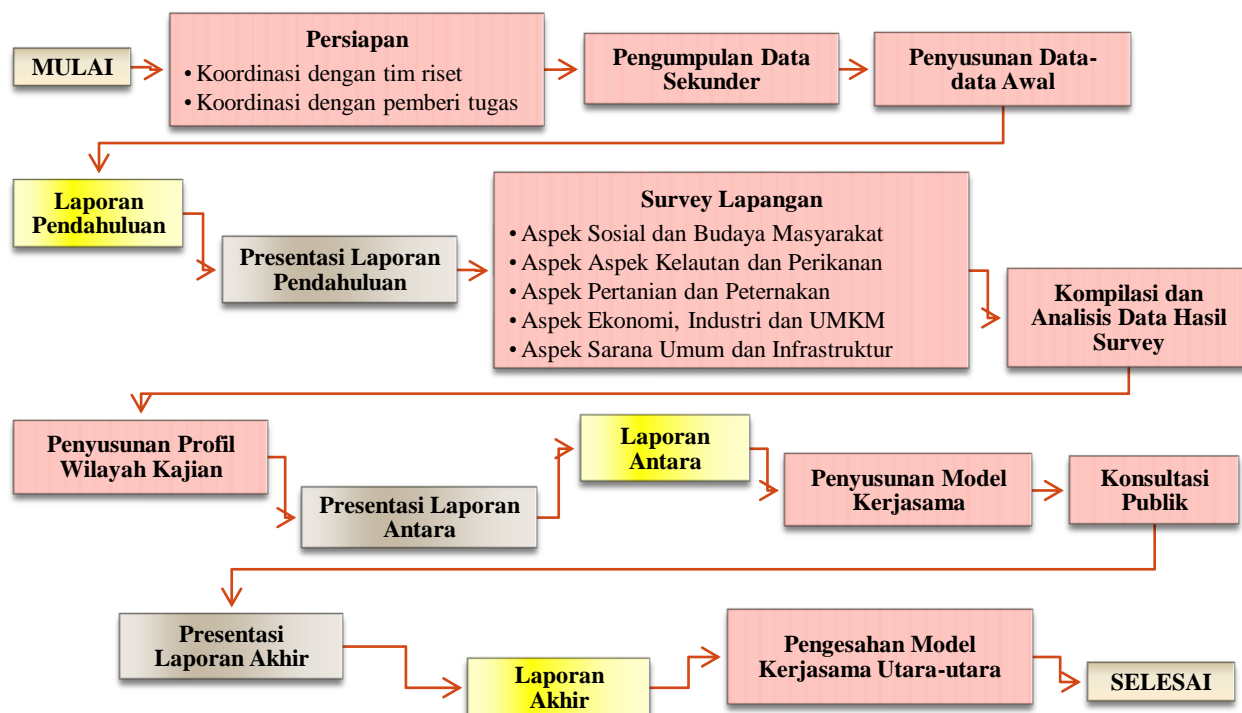
3.2 Tahapan Kajian

Kajian ini dilaksanakan secara bertahap yang masing-masing tahapan akan menghasilkan output yang merupakan input tahapan selanjutnya.

Tabel 1. Tahapan Kajian Kerjasama Utara-utara Wilayah Bolaang Mongondow Utara

Tahapan	Aktivitas	Output
Persiapan	Koordinasi internal tim riset dan Koordinasi dengan pemberi tugas	Dokumen Kesepakatan dan Kerjasama
Pengumpulan Data Sekunder	Pengumpulan data-data sekunder yang bersumber dari data pada instansi dan SKPD serta media online	Data Awal Kajian
Presentasi Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian data-data dan informasi awal terkait dengan kondisi wilayah kajian. • Terdapatnya usulan, tanggapan dan tambahan informasi dari Pimpinan dan staf SKPD yang hadir pada Presentasi Awal 	Laporan Pendahuluan

Pengumpulan Data Primer	Survey Lapangan yang dilaksanakan pada wilayah kajian untuk mendapatkan data dan informasi mengenai berbagai aspek kajian, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat • Aspek Aspek Kelautan dan Perikanan • Aspek Pertanian dan Peternakan • Aspek Ekonomi, Industri dan UMKM • Aspek Sarana Umum dan Infrastruktur 	Data hasil survey
Kompilasi dan Analisis Data	<ul style="list-style-type: none"> • Input data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan survey lapangan • Analisis data sesuai dengan instrumen dan metodologi yang digunakan 	Profil Wilayah Kajian
Presentasi Antara	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil kompilasi dan analisis data-data dan informasi hasil survey. • Terdapatnya usulan, tanggapan dan tambahan informasi dari Pimpinan dan staf SKPD yang hadir pada Presentasi Antara 	Laporan Antara
Penyusunan Model Kerjasama	Penyusunan kembali hasil kompilasi data dan informasi yang diperoleh dari survey lapangan dengan memfokuskan kepada program ataupun komoditas daerah yang berpotensi untuk dikerjakamkan.	Model Kerjasama
Konsultasi Publik/Presentasi Akhir	Mempresentasikan Model Kerjasama yang dapat diusulkan dalam Kerjasama Utara-utara Sulawesi Terdapatnya usulan, tanggapan dan tambahan informasi dari Pimpinan dan staf SKPD yang hadir pada Presentasi Akhir	Laporan Akhir dan Model Kerjasama Hasil Konsultasi Publik



Gambar 3. Diagram Tahapan Pelaksanaan Kajian Kerjasama Utara-utara Wilayah Bolaang Mongondow Utara

3.3 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 2. Jadwal kegiatan penelitian

Kegiatan	September 2015						
	S	S	R	K	J	S	M
<u>Tahapan Persiapan Kontrak Kerjasama dan Administrasi:</u>		1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> • SK Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 276 Tahun 2015 Tertanggal 27 Juli 2015 Tentang Pembentukan dan Pemberian Honorarium Bagi Tim Pelaksana Kajian Kerjasama Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015; • Persiapan kelengkapan administrasi tim peneliti 	■	■	■	■	■		
	7	8	9	10	11	12	13
	√	√	√	√	√		
<u>Tahapan Penandatanganan SPK</u>	14	15	16	17	18	19	20
<ul style="list-style-type: none"> • Undangan dari Bappeda Bolaang Mongondow Utara untuk penandatanganan SPK 	■						
<ul style="list-style-type: none"> • Hadir di Bappeda untuk penandatanganan SPK (Belum ditandatangani karena terdapat perubahan) 		■					
<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Data Sekunder Awal 		■	■	■	■		
<u>Koordinasi Dengan Bappeda</u>	21	22	23	24	25	26	27
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi mengenai perubahan yang menyangkut SK Bupati dan SPK 	√	√					
<u>Koordinasi Dengan Bappeda</u>	28	29	30				
<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan nama-nama dari UNG untuk Tim Pelaksana Pengolah Data 	√						
Kegiatan	Oktober 2015						
	S	S	R	K	J	S	M
<u>Pengurusan Administrasi SPK dan Pengumpulan Data Sekunder:</u>				1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> • Penandatanganan SPK yang telah diperbaiki (SPK yang ditandatangani baru Koordinator Tim) 				■			
<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Data Sekunder Tambahan 				■	■		
<u>Tahapan Input Data dan Koordinasi Tim Peneliti:</u>	5	6	7	8	9	10	11
<ul style="list-style-type: none"> • Input Data Sekunder 	√	√	√				
<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Tim Peneliti 				√	√		
<u>Persiapan Presentasi dan Penyusunan Laporan Pendahuluan</u>	12	13	14	15	16	17	18
<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan kepada seluruh anggota Tim untuk mempersiapkan bahan laporan pendahuluan pada masing-masing aspek kajian 	√	√					
<ul style="list-style-type: none"> • Undangan dari Bappeda untuk penandatanganan SPK dan Persiapan Presentasi Laporan Pendahuluan 			■				

• Penyampaian Surat Laporan Kepada Kepala Bappeda melalui email			■				
• Hadir di Bappeda untuk penandatanganan SPK dan Pembicaraan Presentasi Pendahuluan				■			
• Pengumpulan Data Sekunder Tambahan				■	■		
<u>Tentatif Waktu Tahapan Penelitian</u>							
<u>Presentasi dan Penyusunan Laporan Pendahuluan</u>	19	20	21	22	23	24	25
• Tentatif waktu pelaksanaan presentasi	■	■					
• Perbaikan Laporan Pendahuluan			√				
• Penyampaian Laporan Pendahuluan				■			
<u>Pengumpulan Data Primer dan Survey Lapangan</u>	26	27	28	29	30	31	
• Pengumpulan Data oleh Tim Peneliti	■	■	■	■			
• FGD Pengumpulan Data Per Aspek	■	■	■	■			
• Kompilasi Data Primer					■	■	
Kegiatan	Nopember 2015						
	S	S	R	K	J	S	M
• Penyusunan Profil Wilayah Kajian							1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	■	■	■	■	■	■	■
<u>Persiapan Presentasi Antara</u>	16	17	18	19	20	21	22
• Presentasi Laporan Antara	■	■					
• Penyusunan Laporan Antara			√	√	√	√	√
<u>Penyusunan Laporan Antara Hasil Presentasi</u>	23	24	25	26	27	28	29
• Penyampaian Laporan Antara	■	■					
<u>Persiapan Penyusunan Laporan Akhir</u>							
• Penyusunan Model Kerjasama			■	■	■	■	■
	30						
• Presentasi Laporan Akhir	■						
Kegiatan	Desember 2015						
	S	S	R	K	J	S	M
<u>Finalisasi Laporan</u>		1	2	3	4	5	6
• Penyusunan Laporan Akhir		√					

• Penyampaian Laporan Akhir			√				
• Rencana Pelaksanaan Workshop II Kerjasama Utara-utara				■	■		
<u>Evaluasi Pelaksanaan Workshop II</u>						■	■

3.4 Metode Penelitian

Berdasarkan tujuannya, metode penelitian yang akan dilakukan ini adalah **metode deskriptif eksploratif**, yang dirancang untuk dapat menguraikan dan menjabarkan kondisi pada aspek kajian. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai data dan informasi serta isu dan permasalahan pada aspek kajian. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai data dan informasi serta isu dan permasalahan pada aspek kajian.

Secara umum, kajian ini akan menggunakan metode survey dan observasi lapangan secara langsung dengan pendekatan wawancara dan diskusi dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Pada beberapa aspek kajian, dilakukan metodologi tersendiri agar memperoleh hasil kajian yang lebih optimal.

3.4.1 Metode Aspek Sosial Budaya

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kualitatif*, dengan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama penelitian. Cara ini digunakan dalam upaya mengungkap gejala secara menyeluruh dan kontekstual dengan fokus penelitian. Metode kualitatif berguna untuk menggambarkan suatu realita dan kondisi sosial dalam masyarakat yang merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami responden. Pendekatan penelitian yang dilaksanakan meliputi:

- **Studi etnografi.** Model pendekatan etnografi dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebudayaan (kearifan lokal) sebagaimana adanya. Model ini berupaya mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subyek sebagai obyek studi. Selain itu, lebih menekankan idiografik, dengan cara mendeskripsikan budaya dan tradisi yang ada. Dengan demikian, melalui pendekatan studi ini akan ditemukan makna tindakan kearifan lokal masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari.

- **Cultural identity.** Model pendekatan mengenai identitas/kepribadian budaya atau kearifan lokal mengenai norma-norma, kebiasaan, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan kebudayaan dalam menganalisis potensi daerah yang berdaya saing. Kearifan lokal dan keunggulan lokal yang dimaksud dalam penelitian menyangkut kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional, yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan lestari.

A. Karakteristik Responden

Karakteristik responden pada kajian ini adalah komunitas masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang memahami dan tetap mempertahankan identitas budaya lokalnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, karakteristik responden yang akan dilibatkan dalam kajian ini meliputi Pemerintah setempat; Tokoh-tokoh masyarakat; Tokoh adat; Budayawan; Para cendekiawan/akademisi dan Informan kunci.

B. Tahap-Tahap Penelitian

Mengingat bahwa peneliti merupakan alat penelitian, maka reduksi data hasil penelitian perlu dilakukan sejak awal pengumpulan data. Peneliti melakukan kegiatan penelitian melalui tahapan-tahapan tertentu, sebagai berikut:

1. **Tahap Pra Lapangan.** Kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pra lapangan adalah sebagai berikut:
 - **Menyusun rancangan penelitian.** Rancangan penelitian disusun atas dasar tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: untuk mengetahui tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan kearifan lokal dan sosial budaya masyarakat Bolaang Mongondow Utara dalam menganalisis potensi daerah yang berdaya saing dan unggul.
 - **Memilih lapangan penelitian.** Lapangan penelitian yang dipilih adalah masyarakat Bolaang Mongondow, dalam tenggang waktu selama tiga bulan.
 - **Mengurus perizinan.** Dalam pengurusan perizinan, dilakukan pula konsultasi dan dialog untuk memperoleh kesepakatan dari pihak pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, serta informan kunci yang berkaitan dengan penentuan waktu penelitian, subjek dan objek dalam melakukan penelitian.

2. **Tahap Kerja Lapangan.** Kegiatan yang dilakukan pada tahap kerja lapangan adalah sebagai berikut:

- Peneliti berusaha memahami latar penelitian terlebih dahulu, sekaligus melakukan persiapan fisik dan mental dengan mengedepankan peran etika, sehingga dapat dibina keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.
- Peneliti berusaha menampilkan diri sesuai dengan latar. Kehadiran peneliti dalam hal ini tidak menjadi perhatian yang berlebihan, seperti dalam berpakaian maupun dalam bertingkah laku sehingga kehadiran peneliti tidak akan mengganggu proses kegiatan yang berlangsung.
- Melakukan pembagian waktu sesuai dengan kesepakatan antara peneliti dengan pemerintah setempat, tokoh-tokoh masyarakat, serta informan kunci yang telah ditentukan dalam tahap pra lapangan. Peneliti mengambil waktu sesuai sasaran pengamatan sekaligus wawancara yang telah ditentukan dalam jadwal.

C. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data Aspek Sosial Budaya adalah:

1. **Wawancara.** Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dimana pewawancara mengajukan pertanyaan tertentu dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
2. **Observasi (Pengamatan).** Pengamatan yang dilakukan adalah untuk memahami norma-norma, kebiasaan, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan kebudayaan. Objek yang diamati adalah norma-norma, kebiasaan, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat Bolaang Mongondow Utara sebagai sosial budaya dan kearifan lokal.
3. **Analisis Dokumentasi.** Teknik ini digunakan selain untuk mencatat data yang terdapat dalam dokumen, juga untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen tersebut, termasuk di dalamnya hal-hal yang tersurat maupun tersirat. Teknik ini dikenal dengan istilah “kajian isi atau *content analysis*”. Dokumen yang dikumpulkan oleh tim peneliti antara lain: Falsafah daerah Bolaang Mongondow Utara.
4. **Proses Pencatatan (Perekaman Data).** Proses pencatatan data yang digunakan melalui prosedur sebagai berikut:

- Pencatatan data dilakukan dalam format catatan lapangan (CL) yang dilakukan melalui tahap-tahap:
- Pencatatan awal, yakni melakukan pencatatan selama pengamatan/wawancara dengan menggunakan kata kunci,
- Perluasan yang merupakan bentuk catatan lapangan yang terdiri atas catatan deskriptif dan reflektif yang merupakan tanggapan pengamat,
- Perbaikan. Membuat petunjuk tertentu (*coding*) sebagai berikut:
 - a. CL = Catatan Lapangan
 - b. A = Alinea
 - c. H = Halaman
 - d. P = Pengamatan
 - e. W = Wawancara

Di samping kode-kode tersebut di atas, dibuat kode-kode khusus dalam bentuk angka untuk membedakan berbagai macam jenis data yang diperoleh dari catatan lapangan baik catatan lapangan wawancara maupun pengamatan.

- Memilih alat yang mudah digunakan dalam pengumpulan data seperti: notes, pensil/ballpoint, alat perekam maupun alat pemotret untuk digunakan untuk mengambil gambar situasi.

D. Analisis dan Penafsiran Data

Teknik analisis dan penafsiran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan tetap dengan cara kerja sebagai berikut:

1. **Perbandingan kejadian-kejadian yang aplikatif.** Perbandingan kejadian-kejadian yang aplikatif terhadap setiap kategori menurut Spradley sama dengan analisis domain. Langkah-langkah dalam membuat analisis domain dengan memilih hubungan semantik, menurut Spradley ada sembilan hubungan semantik yang dapat digunakan dalam menentukan domain. Pemilihan kategori dan bentuk hubungan-hubungan semantik disesuaikan dengan jenis data setiap domain dan taksonomi, yang akan dianalisis.
2. **Integrasi kategori dan kawasannya.** Tahapan ini bertujuan untuk memberi hubungan-hubungan antara komponen masing-masing. Dalam tahapan ini, Spradley menggunakan istilah analisis taksonomi. Analisis ini menghasilkan suatu taksonomi yang meringkas

hubungan antara kategori dalam suatu kawasan (Spradley, 1990: 116). Langkah-langkah dalam analisis taksonomi menurut Spradley adalah sebagai berikut:

- Menyeleksi kawasan yang dianalisis,
 - Mencari persamaan unsur dalam satu kawasan berdasarkan hubungan yang sama,
 - Mencari unsur-unsur lain yang dapat memperkaya kawasan yang dianalisis,
 - Mencari kawasan yang lebih besar, dimana kawasan yang dianalisis merupakan unsur di dalam kawasan yang lebih besar,
 - Membangun taksonomi yang bersifat tentatif,
 - Melakukan observasi terfokus, guna menguji ketepatan analisis.
3. **Merumuskan atau pembatasan teori.** Tahapan pembatasan atau perumusan teori dinamakan oleh Spradley dengan istilah analisis tema. Analisis tema dilakukan dengan cara mencari kesamaan-kesamaan antara dimensi kontras dari kawasan yang dipilih.
 4. **Penulisan Teori.** Laporan penelitian dibuat berdasarkan daftar temuan yang diperoleh selama melaksanakan penelitian, dimana daftar temuan itu sendiri diperoleh setelah melakukan analisis tema.

3.4.2 Metode Kajian Aspek Perikanan dan Kelautan

Aspek ini akan mengkaji kondisi sumberdaya perikanan dan kelautan yang mencakup gambaran sebaran ekosistem pesisir, produksi perikanan, potensi dan sumberdaya air yang digunakan untuk kegiatan perikanan serta pemanfaatan wilayah laut eksisting, menyangkut penggunaan ruang wilayah pesisir dan laut. Kajian aspek Perikanan dan Kelautan yang terkait dengan kerjasama Utara-utara Sulawesi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini, bertujuan :

- Mengetahui luasan dan sebaran potensi perikanan dan kelautan;
- Mengetahui pola dan tingkat pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan;
- Menge analisis pola produksi sumberdaya perikanan dan kelautan;

A. Metode Kajian Perikanan Tangkap

Data yang terkumpul dianalisis dengan metoda analisis deskriptif yang hasilnya dapat berupa tabel, gambar, histogram, grafik dan lainnya. Metode atau model yang digunakan dalam pendugaan potensi sumberdaya ikan pada kajian perikanan tangkap ini adalah *production*

models, yaitu model produksi perikanan tangkap dengan analisis hasil tangkapan perunit effort ($CPUE = Catch Per Unit Effort$). Dalam aplikasinya effort biasa berupa data fishing power atau fishing trip. Dalam kasus suatu spesies ditangkap oleh banyak jenis alat tangkap maka dilakukan standarisasi alat. Alat yang digunakan ”*standard*” adalah yang paling banyak menangkap jenis ikan yang umum digunakan oleh nelayan.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu kajian didasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan data-data penunjang. Selanjutnya data potensi lestari sumberdaya ikan dianalisis menggunakan metode Schaefer seperti berikut :

- a. Menghitung hasil tangkapan per upaya tangkapan atau CPUE (*Catch per Unit Effort*) dengan rumus berikut:

$$CPUE_i = C_i/E_i \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

CPUE : Hasil tangkapan per upaya penangkapan dalam tahun i (ton/upaya);

C_i : Hasil tangkapan pada tahun ke-i (ton);

E_i : Upaya penangkapan pada tahun ke-i (upaya);

i : tahun ke 1,2,...,n.

- b. Menganalisis hubungan antara CPUE dengan upaya penangkapan menggunakan rumus berikut:

$$CPUE = a - bf \dots\dots\dots (2)$$

Untuk mendapatkan gambaran pengaruh dari upaya penangkapan (f) terhadap hasil tangkapan per unit upaya penangkapan (CPUE) digunakan analisis regresi. Nilai a dan b diperoleh dari analisis regresi. Persamaan regresi linear sederhana dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh antar peubah, dan bisa juga untuk mengetahui atau memprediksi nilai satu atau lebih peubah.

Menghitung *Maximum Sustainable Yield* (MSY) yaitu jumlah tangkapan maksimum yang diperbolehkan agar ketersediaan sumberdaya perikanan tangkap tetap lestari (potensi lestari) dengan rumus berikut:

$$MSY = -a^2/4b \dots\dots\dots (3)$$

- c. Menentukan status keberlanjutan sumberdaya ikan demersal dengan menghitung tingkat pemanfaatan dengan rumus berikut:

$$\text{Tingkat pemanfaatan} = (\text{produksi}/MSY) \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

B. Metode Kajian Perikanan Budidaya

Kajian perikanan budidaya akan difokuskan kepada (1) Mengidentifikasi potensi pengembangan perikanan budidaya laut berdasarkan ketersediaan lahan, (2) Mengembangkan model optimasi perikanan budidaya laut perairan Bolaang Mongondow Utara untuk menentukan produk yang memberikan maksimasi keuntungan, dan (3) Mengembangkan model kesesuaian lahan khusus untuk kegiatan budidaya rumput laut. Data yang diperoleh berdasarkan hasil survey dan observasi di lapangan pada lokasi kajian berhubungan dengan kondisi lingkungan lahan budidaya, potensi ikan yang sudah dibudidayakan dan yang bisa dikembangkan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Model Optimasi Perikanan Budidaya Laut

Metode Optimasi merupakan salah satu metode aplikatif dalam mengukur kinerja kegiatan perikanan budidaya pada masing-masing komoditas yang diprediksi dapat dikembangkan di wilayah Bolaang Mongondow Utara. Metode yang biasa disebut juga dengan Metode Linear Programming (LP) karena dalam aplikasinya menggunakan pemrograman linear dengan software QS (Quant System) ini akan digunakan apabila hasil survey di lokasi penelitian ditemukan aktivitas perikanan budidaya yang memproduksi berbagai macam komoditas. Dalam model optimasi ini dikenal dua macam “fungsi”, yaitu **Fungsi Tujuan** (*objective function*) dan **Fungsi batasan** (*constraint functions*).

Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan di dalam permasalahan model yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya, untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Sedangkan fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Pengembangan model optimasi untuk perikanan budidaya laut di Bolaang Mongondow Utara akan menggunakan berbagai parameter yang diasumsikan bersifat deterministik dan konstan (Tabel 3).

Tabel 3. Parameter Penentuan Optimasi Perikanan Budidaya

No.	Parameter	Keterangan
1.	Luas lahan total (ha)	Nilai ini diperoleh berdasarkan peraturan zonasi di perairan Bolaang Mongondow Utara.

2.	Asumsi modal pembiayaan (Rp/tahun).	Modal pembiayaan untuk perikanan budidaya laut nilainya diasumsikan.
3.	Jenis komoditi	Komoditas perikanan budidaya yang sesuai secara fisik, kimia, dan biologi untuk dibudidayakan di perairan Bolaang Mongondow Utara.
4.	Luas lahan budidaya laut	Sesuai berdasarkan identifikasi kesesuaian lahan <ul style="list-style-type: none"> • Lahan budidaya untuk ikan dalam KJA • Lahan budidaya untuk rumput laut dengan metode apung • Lahan budidaya untuk kekerangan
5.	Ketersediaan <i>hatchery</i> .	Menggambarkan jumlah bibit yang dapat digunakan untuk budidaya laut yang direncanakan. Jumlah bibit dapat diperoleh dari data statistik perikanan budidaya di wilayah Bolaang Mongondow Utara.
6.	Parameter ekonomi	Parameter ekonomi untuk studi kasus ini adalah nilai dari koefisien beberapa input variabel berikut (n adalah jenis komoditi)
		<u>Keuntungan tiap kg komoditi</u>
		$c_n = \frac{\text{Keuntungan produksi / thn / ha}}{\text{Jumlah produksi pertahun per hektar}}$
		<u>Biaya tiap kg komoditi</u>
		$a_{1n} = \frac{\text{Annual biaya investasi + biaya operasional}}{\text{Jumlah produksi pertahun}}$
		<u>Penggunaan lahan tiap kg komoditi</u>
		$a_{2n} = \frac{1}{\text{Jumlah produksi per hektar pertahun}}$
		<u>Kebutuhan benih dari hatchery tiap kg komoditi</u>
		$a_{3n} = \frac{\text{Jumlah Kebutuhan Benih Per Tahun}}{\text{Jumlah produksi pertahun}}$

1. Fungsi Tujuan

Terdapat tiga komoditas yang diasumsikan terdapat di lokasi kajian, yaitu (1) Kekerangan, (2) ikan laut dengan metode Keramba Jaring Apung (KJA) dan (3) rumput laut. Model optimasi linear produksi budidaya laut sebagai berikut di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara:

Fungsi Tujuan : Maksimalkan nilai Z

$$Z = C_1X_1 + C_2X_2 + C_3X_3$$

2. Fungsi Batasan

Fungsi-fungsi batasan sebagai berikut:

- a. **Keterbatasan dana**
 $a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + a_{13}X_3; X_i \leq M$
- b. **Kapasitas total lahan**
 $a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + a_{23}X_3; X_i \leq b_2$
- c. **Luas lahan sesuai untuk kekerangan**
 $a_{11}; X_1 \leq A_1$
- d. **Luas lahan sesuai untuk ikan KJA**
 $a_{22}X_2; X_2 \leq A_2$
- e. **Luas lahan sesuai untuk Rumput Laut**
 $a_{23}X_3; X_3 \leq A_3$
- e. **Ketersediaan bibit**
 $S_1X_1 + S_2X_2 + S_3X_3; X_i \leq S_i$
 dan $X_1 \geq 0; X_2 \geq 0; X_3 \geq 0$

Keterangan:

C_1	Keuntungan/kg Kerangan (Rp)	a_{11}	biaya produksi/ kg kerangan /tahun/Ha	M	asumsi modal atau investasi total (Rp)	a_1	Luas lahan sesuai untuk kekerangan (ha)
C_2	Keuntungan/kg Ikan (Rp)	a_{12}	biaya produksi/ kg ikan /tahun/ha	A_i	kapasitas total luas lahan budidaya (ha)	a_2	Luas lahan sesuai untuk ikan dlm KJA (ha)
C_3	Keuntungan/kg Rumput Laut (Rp)	a_{13}	biaya produksi/ kg rumput laut /tahun/ha	S_i	Jumlah bibit yang tersedia untuk masing-masing kegiatan budidaya (kg)	a_3	Luas lahan sesuai untuk rumput laut (ha)

3. Perhitungan Produksi dan Manfaat

Tabel 4. Pengukuran Produksi dan Efisiensi Biaya Perikanan Budidaya

1.	Produksi Biomassa (Edmonson dan Winberg, 1971 dalam Sulistiani <i>et al</i> , 2013)	$PB = g \times N$ Dimana; $PB =$ Produksi Biomassa $G =$ Laju Pertumbuhan Harian (g/hari) $N =$ Bobot Akhir Biomassa (g)
2.	Laju Pertumbuhan Harian (Fogg, 1975 dalam Widyorini, 2010)	$g = \frac{\ln Wt_1 - \ln Wt_2}{t_1 - t_2} \times 100\%$ Dimana; $G =$ Laju pertumbuhan harian biota uji (%) $Wt_1 =$ Berat biota uji pada akhir pemeliharaan (g) $Wt_2 =$ Berat biota uji pada awal pemeliharaan (g)

3.	Efisiensi biaya produksi dapat diukur dengan analisis R/C ratio yang merupakan perbandingan antara penerimaan dengan biaya produksi (Soekartawi, 1995 dalam Chusnul <i>et al</i> , 2010)	A = R/C R = Py x Y C = FC + C A = ((Py x Y)/(FC + VC)) Dimana; A = Efisiensi biaya R = Penerimaan C = Biaya Py = Harga output Y = Output FC = Biaya tetap VC = Biaya variable
----	--	--

Model Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut

Tujuan kajian ini adalah untuk mengembangkan model kesesuaian budidaya rumput laut sebagai dasar penentuan zonasi budidaya rumput laut dengan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan perairan. Pengumpulan data di lokasi penelitian, terutama yang merupakan data primer dilakukan dengan metoda survey, pengukuran lapangan, dan pemetaan. Penentuan titik stasiun pengamatan dirancang dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jarak 1 – 12 km (arah vertical dan horizontal) antara titik pengamatan. Posisi sampling telah ditentukan dengan pertimbangan ada atau tidaknya kegiatan budidaya rumput laut dan juga kemudahan menjangkau lokasi titik sampling, efisiensi waktu dan biaya, serta sesuai dengan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian.

1. Data Oceanografi dan Kualitas Air

Pengukuran Oseanografi dan kualitas air laut dilakukan dengan cara *sampling* pada 6 titik *sampling*. Metode pengukuran parameter oseanografi dan kualitas air laut dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 5. Parameter oseanografi dan metode pengukuran

Parameter	Metode Pengukuran
Fisika	
Kedalaman, arus, TSS, suhu perairan, dan kecerahan perairan	<ul style="list-style-type: none"> • In situ • Penentuan kecerahan perairan dilakukan dengan menggunakan alat seichi disk. Alat ini diturunkan ke dalam perairan, kemudian diukur kedalaman menghilang seichi disk. Untuk mendapatkan nilai kecerahan menggunakan rumus: $\frac{\text{Kedalaman Menghilang seichi disk (m)}}{\text{Kedalaman perairan (m)}} \times 100 \%$

Kimia

pH air, salinitas, COD, BOD, dan nitrat

- Sampel air laut diambil menggunakan botol sampling pada permukaan laut. Sampel air yang terambil kemudian diukur, salinitas, dan pH-nya dengan menggunakan *Water Quality Checker*.
- Sedangkan pengukuran sampel air parameter COD, BOD dan Nitrat dilaksanakan di Laboratorium Fisika dan Kimia Fakultas MIPA UNG.

Biologi

Kelimpahan plankton

- Pengambilan sampel plankton dilakukan dengan menggunakan plankton net ukuran 25µm, 55µm dan 100µm. Volume air tersaring dihitung dengan menggunakan flowmeter. Kemudian sampel plankton tersebut dikumpulkan pada botol sampel dan diawetkan dengan larutan lugol (1%).
- Sedangkan perhitungan Kelimpahan Plankton dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo.

2. Analisis Kesesuaian Lahan Budiadaya Rumput Laut

Data hasil pengukuran di lokasi penelitian yang terdiri dari data oseanografi dan data pencemaran yang digambarkan dari kelimpahan plankton, dianalisis dengan dua metode, yaitu:

- Metode PATTERN (Planning Assistance Through Technical Evaluation of Relevant Numbers)**. Suatu metode yang diterapkan untuk memecahkan masalah melalui penentuan skor/bobot pada setiap kategori di setiap faktor dari kondisi Bentang Alam dan Substrat Dasar Perairan, Parameter Fisika, Kimia dan Biologi Perairan (Radiarta *et al.*, 2004).
- Metode RID (Resiprok Indeks Diversitas)**. Suatu metode untuk mengukur tingkat pencemaran perairan melalui pendekatan indeks diversitas plankton, yaitu nilai dari Simpson (Odum, 1963) berdasarkan rumus, sebagai berikut:

$$(1 - D) = 1 - \sum (n_i)^2 / N^2$$

di mana:

1-D = Resiprok Indeks Diversitas (RID) Simpson
N = Jumlah individu masing-masing spesies
N = Jumlah total individu

Tingkat Pencemaran:

Ringan RID = > 0.8
Sedang RID = 0.6 – 0.8
Berat RID = < 0.6

Penentuan bobot hasil pengukuran analisis PATTERN dan RID ini mengacu pada referensi dan panduan mengenai standar kesesuaian perairan untuk kegiatan budidaya rumput laut, yaitu Radiarta *et al.* (2004); Utojo *et al.*, 2007; Kepmen No. 51/MENKLH/2004; LAPAN (2004); Effendy (2003), dan KKP (2010) yang selanjutnya disusun dalam bentuk Tabel Matriks Kesesuaian. .

Tabel 6. Matriks Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut (Sumber: Modifikasi berbagai referensi dan panduan).

Parameter	Pustaka	Bobot (%)	Skoring
Bentang Alam dan Dasar Perairan			
Keterlindungan	Radiarta et al. (2004); KKP (2010)	20	
Terlindung			3
Cukup Terlindung			2
Terbuka			1
Substrat Dasar Perairan	Radiarta et al. (2004); KKP (2010)	15	
Pasir/Pecahan Karang			3
Pasir Berlumpur			2
Berlumpur			1
Parameter Fisika			
Kecepatan Arus (m/detik)	Radiarta et al. (2004); Utojo et al., 2007; Kepmen No. 51/MENKLH/2004; KKP (2010)	5	
20 – 30			3
31 – 40			2
< 20 dan > 40			1
Kedalaman (m)	Radiarta et al. (2004); Utojo et al., 2007; Kepmen No. 51/MENKLH/2004; KKP (2010)	10	
3 – 10			3
11 – 15			2
< 3 dan > 15			1
Kecerahan (m)	Radiarta et al. (2004); Utojo et al., 2007; Kepmen No. 51/MENKLH/2004; KKP (2010)	5	
> 3			3
1 – 3			2
< 1 dan > 3			1
TSS (ppm)	Utojo et al., 2007; Kepmen No. 51/MENKLH/2004; KKP (2010)	5	
< 25			3
25 – 50			2
> 25			1
Suhu (°C)	Utojo et al., 2007; Kepmen No. 51/MENKLH/2004; KKP (2010)	5	
28 – 30			3
26 - 27 atau 30 – 33			2
< 26 atau > 33			1

Parameter Kimia			
Salinitas (ppt)	Utojo et al., 2007; KKP (2010)	10	
32 – 34			3
28 – 31			2
< 28 dan > 34			1
Nitrat (ppm)	Utojo et al., 2007; Kepmen No. 51/MENKLH/2004; KKP (2010)	5	
0,9 - 3,5			3
0,1 - 0,9 atau 3,6 - 4,5			2
< 0,1 atau > 4,5			1
pH	Utojo et al., 2007; Kepmen No. 51/MENKLH/2004; KKP (2010)	5	
7 - 8,5			3
6,5 - 7 atau 8,5 - 9,5			2
< 6,5 atau > 9,5			1
COD (ppm)	Effendy (2003); KKP (2010)	5	
< 20			3
20 – 200			2
> 200			1
BOD (ppm)	LAPAN (2004); KKP (2010)	5	
< 2,5			3
2,5 - 4,5			2
> 4,5			1
Parameter Biologi			
Pencemaran (ind/ml)	Radiarta et al. (2004); KKP (2010)	5	
Rendah			3
Sedang			2
Tinggi			1
Jumlah Bobot		100	

Klasifikasi ini digunakan untuk menilai kesesuaian atas dasar pemberian skor pada parameter pembatas kegiatan budidaya rumput laut. Penilaian secara kuantitatif terhadap tingkat kelayakan lahan dilakukan dengan metode skoring dan pembobotan. Bobot yang besar diberikan kepada peubah yang mempunyai pengaruh dominan serta relative tidak dapat diubah (sifatnya permanen) terhadap peruntukan wilayah tersebut, sebaliknya peubah yang kurang dominan

diberi bobot yang lebih kecil. Pada analisis kesesuaian ini, setiap factor ditentukan dengan angka skor, dan total skor dihitung dari jumlah pembobotan dari setiap skor kategori. Bobot tersebut ditentukan berdasarkan ketergantungan dari setiap factor sesuai dengan tujuan kesesuaian yang nilai bobotnya berdasarkan studi pustaka untuk digunakan dalam penilaian atau penentuan tingkat kesesuaian lahan. Parameter yang dapat memberikan pengaruh lebih kuat diberi bobot lebih tinggi dari pada parameter yang lebih lemah pengaruhnya. Analisis secara kuantitatif ditentukan dengan menggunakan rumus, sebagai berikut:

$$Y = \sum a_i \cdot X_n$$

di mana:

Y = Nilai akhir

a_i = Faktor pembobot

X_n = Nilai kesesuaian lahan

Tingkat Kesesuaian:

Kesesuaian tinggi (S1) Y = 250 – 300

Kesesuaian sedang (S2) Y = 200 – 250

Kesesuaian rendah (S3) Y = 150 – 200

Tidak sesuai (N) Y = 100 – 150

Tingkat kesesuaian perairan yang terdeteksi selama survey dikategorikan ke dalam kriteria

- **Kesesuaian tinggi (S1)**; yaitu apabila lahan atau kawasan yang sangat sesuai untuk budidaya rumput laut tanpa adanya faktor pembatas yang berarti atau memiliki faktor pembatas yang bersifat minor dan tidak akan menurunkan produktifitasnya secara nyata.
- **Kesesuaian sedang (S2)**; yaitu apabila lahan atau kawasan mempunyai faktor pembatas yang agak serius atau berpengaruh terhadap produktifitas budidaya rumput laut. Didalam pengelolaannya diperlukan tambahan masukkan teknologi dari tingkatan perlakuan.
- **Kesesuaian rendah (S3)**; areal mempunyai pembatas yang cukup berarti sehingga perlu dipertimbangkan lebih teliti mengenai penempatannya karena potensi untuk berinteraksi secara negatif dengan zona pemanfaatan lainnya.
- **Tidak sesuai (N)**. Tidak Sesuai, yaitu lahan atau kawasan yang tidak sesuai untuk budidaya rumput laut karena mempunyai faktor pembatas yang berat yang bersifat permanen.

3.4.3 Metode Aspek Pertanian dan Peternakan

Menurut Arsyad (2009), analisis sektor pertanian dan sektor perekonomian lainnya serta subsektor pertanian didekati dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). Dimana Rumus LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{vi / vt}{Vi / Vt}$$

Keterangan:

LQ	=	Location Quotient
vi	=	PDRB subsektor Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun x
vt	=	PDRB total sektor Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun x
Vi	=	PDRB subsektor Peternakan tahun x Provinsi Sulawesi Utara
Vt	=	PDRB total sektor Peternakan tahun x Provinsi Sulawesi Utara

3.4.4 Metode Kajian Aspek Ekonomi, Industri dan UMKM

Aspek ini akan mengkaji pertumbuhan sektor riil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, diantaranya melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan strategi untuk pemberdayaan masyarakat melalui UMKM berbasis potensi daerah dan komoditas unggulan.

Metode yang digunakan dalam kajian Aspek Ekonomi, Industri dan UMKM di Bolaang Mongondow Utara meliputi:

- **Wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner.** Metode ini dimaksudkan untuk menggali informasi kepada responden terpilih mengenai keadaan masyarakat dan potensi kecamatan dan desa.
- **Diskusi terfokus.** Metode ini dilakukan dengan stakeholder terkait membahas kemungkinan pengembangan wilayah yang ada di kecamatan dan desa sasaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempertajam kajian dan pengumpulan data di lapangan.
- **Analisis Data.** Analisis Data dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan dalam penelitian sudah selesai dikumpulkan. Untuk memudahkan dalam melakukan analisis data

dan menginterpretasi hasilnya, maka dilakukan terlebih dahulu beberapa tahap persiapan analisis data, yaitu pengeditan (*editing*) dan pemrosesan data (*data processing*).

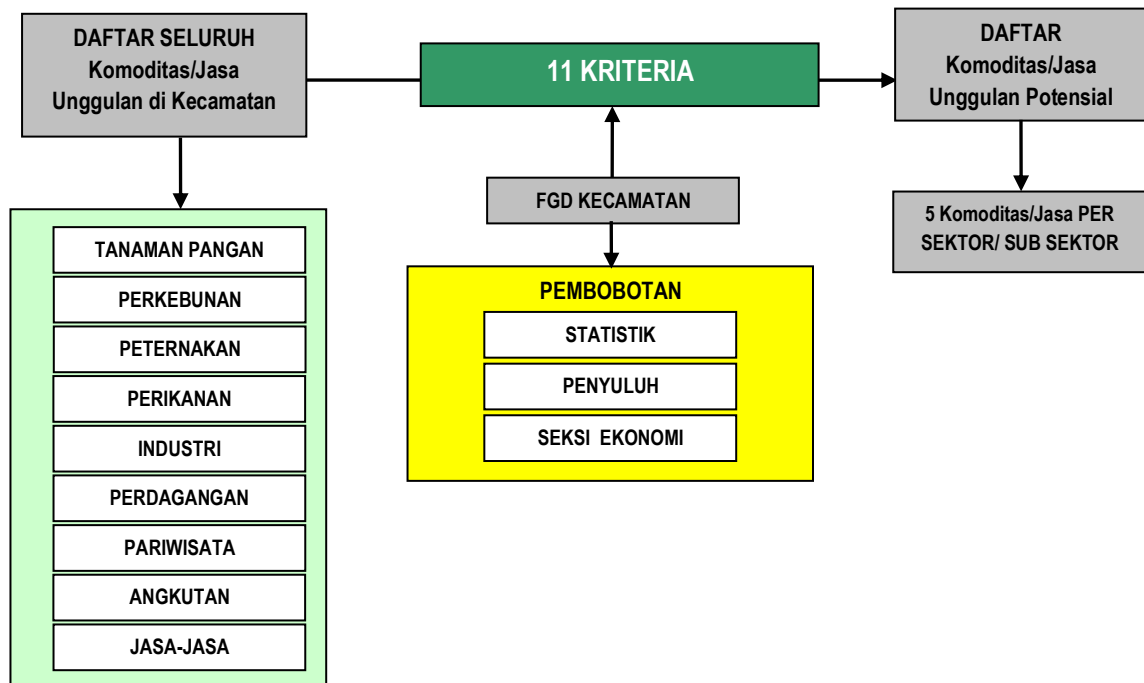
A. Metode MPE (*Metode Perbandingan Eksponensial*)

MPE merupakan salah satu metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria jamak (Gambar 3). Teknik MPE digunakan sebagai strategi bagi peneliti dalam pengambilan keputusan untuk menggunakan rancang bangun model yang terdefinisi dengan baik pada tahapan proses. Berdasarkan Analisis MPE, ditetapkan maksimal 5 (lima) Komoditas/Jasa Unggulan untuk setiap sektor/subsektor ekonomi di tingkat kecamatan. Sedangkan kriteria dan variabel yang digunakan untuk proses penetapan Komoditas/Jasa Unggulan pada tiap indikator tersebut adalah seperti yang diuraikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 7. Kriteria dan variabel yang digunakan untuk proses penetapan Komoditas/Jasa Unggulan

No.	Kriteria	Variabel	Skala Penentuan Skor		
			1	2	3
			Sulit	Sedang	Mudah
1.	Tenaga Kerja Terampil (<i>Skilled</i>)	Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja, Jumlah Lembaga/Sekolah Keterampilan/Pelatihan			
2.	Bahan Baku (Manufacturing)	Ketersediaan/Kemudahan Bahan Baku, Harga Perolehan Bahan Baku, Parishability Bahan Baku (Mudah atau Tidaknya Rusak), Kesenambungan dan Mutu Bahan Baku			
3.	Modal	Kebutuhan Investasi Awal, Kebutuhan Modal Kerja, Aksesibilitas Terhadap Sumber Pembiayaan.			
4.	Sarana Produksi/Usaha	Ketersediaan/kemudahan Memperoleh dan Harga			
5.	Teknologi	Kebutuhan Teknologi, Kemudahan memperoleh teknologi			
6.	Sosial Budaya (Faktor Endogen)	Ciri Khas Lokal, Penerimaan Masyarakat, Turun Tenurun			
7.	Manajemen Usaha	Kemudahan Untuk Mengelola			
8.	Ketersediaan Pasar	Jangkauan/Wilayah Pemasaran, Kemudahan Mendistribusikan			
9.	Harga	Stabilitas Harga			
10.	Penyerapan Tenaga Kerja	Kemampuan Menyerap Tenaga Kerja			

11.	Sumbangan Terhadap Perkonomian	Jaringan pertumbuhan ekonomi yang dapat terjadi sebagai akibat dari berkembangnya usaha komoditi ini.			
-----	--------------------------------	---	--	--	--

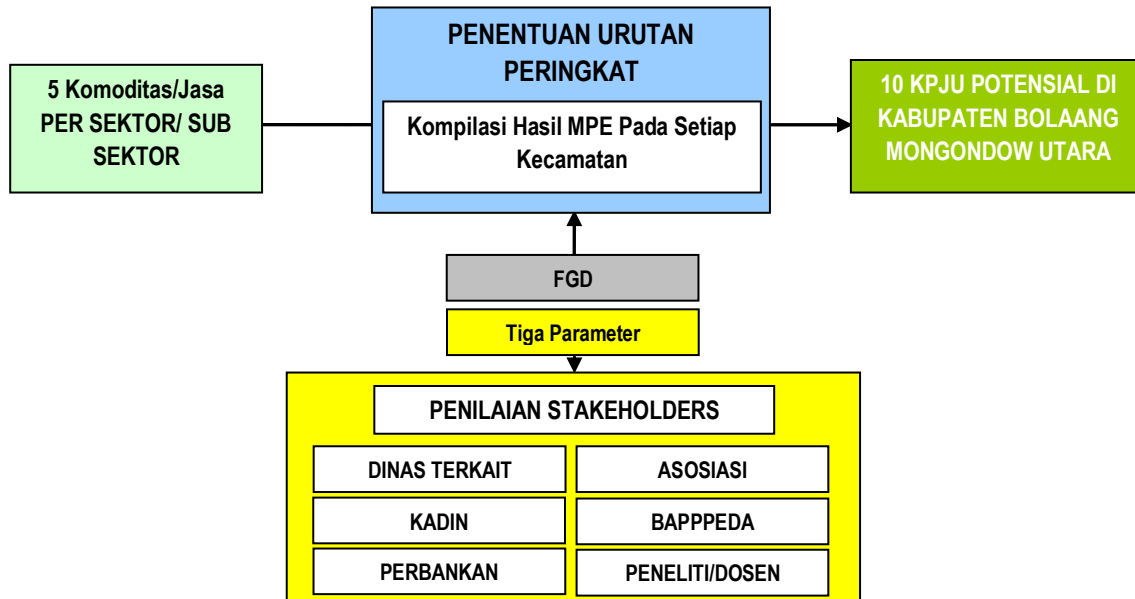


Gambar 4. Tahapan penentuan Komoditas/Jasa Unggulan Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditentukan berdasarkan MPE

B. Metode Borda

Berdasarkan hasil Komoditas/Jasa Unggulan dari seluruh kecamatan Bolaang Mongondow Utara dengan MPE, maka selanjutnya dilakukan pemilihan Komoditas/Jasa Unggulan Tingkat Kabupaten dengan menggunakan Metode Borda (Gambar 5). Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Metode Borda ini akan diperoleh 10 KPJU yang berpotensi untuk dikembangkan dalam di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Penentuan peringkat atau ranking setiap Komoditas/Jasa Unggulan ditentukan berdasarkan FGD yang dilaksanakan di tingkat kabupaten dengan menggunakan 3 (tiga) parameter yang relevan dengan tujuan kajian. Semakin tinggi kontribusi Komoditas/Jasa Unggulan pada tiap parameter kajian terhadap Kabupaten Bolaang Mongindow Utara, maka nilai atau skor Komoditas/Jasa Unggulan tersebut akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya, semakin rendah kontribusinya, maka akan semakin rendah nilainya.



Gambar 5. Tahapan penentuan Komoditas/Jasa Unggulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditentukan berdasarkan Metode Borda

Tabel 8. Parameter yang digunakan untuk proses penetapan Komoditas/Jasa Unggulan Tingkat Kabupaten

No.	Parameter	Uraian	Skala Penentuan Skor		
			1	2	3
			Rendah	Sedang	Tinggi
1.	<u>Pertumbuhan Ekonomi</u>	Komoditas/Jasa Unggulan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten			
2.	<u>Penciptaan Lapangan Kerja</u>	Komoditas/Jasa Unggulan memberikan kontribusi positif terhadap penciptaan lapangan kerja kabupaten			
3.	<u>Peningkatan Daya Saing Produk,</u>	Komoditas/Jasa Unggulan berpotensi dapat ditingkatkan kualitas sehingga mempunyai daya saing di pasaran			

Parameter yang digunakan untuk menilai dan menentukan peringkat Komoditas/Jasa Unggulan Kabupaten Bolaang Mongindow Utara adalah:

1. **Parameter Pertumbuhan Ekonomi**, ditekankan pada analisis yang menggambarkan adanya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sebagai akibat dari penentuan Komoditas/Jasa Unggulan tersebut.
2. **Parameter Penciptaan Lapangan Kerja**, sejauh mana pengembangan komoditas unggulan ini dapat menyediakan dan memberikan peluang bagi tenaga kerja, terutama tenaga kerja di daerah.
3. **Parameter Peningkatan Daya Saing Produk**, ditujukan untuk menganalisis sejauh mana kegiatan Komoditas/Jasa Unggulan tersebut berjalan, terutama yang terkait dengan produksi, dan efektifitas dari kegiatan tersebut.

3.4.5 Metode Kajian Aspek Sarana Umum dan Infrastruktur

Metode yang dilaksanakan untuk mengkaji aspek Sarana Umum dan Infrastruktur yang terkait dengan Kajian Kerjasama Utara-utara Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meliputi:

A. Penyusunan Katalog Data dan Peta Yang Dibutuhkan

Penyusunan katalog data dan peta yang dibutuhkan bertujuan atau digunakan untuk kegiatan pengumpulan data dan peta awal mengenai gambaran umum Sarana Umum dan Infrastruktur, perda dan peraturan perundangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terkait serta kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dan sektoral yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengembangan wilayah tersebut.

B. Identifikasi dan Analisis/Kajian Kebijakan Terkait (*Desk Study*)

Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan materi dan substansi aspek Sarana Umum dan Infrastruktur diidentifikasi dan dianalisis untuk memperoleh sinkronisasi antar kebijakan sektoral maupun spasial sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Pengkajian dilakukan terhadap kebijakan yang terkait dengan penataan ruang yang lebih tinggi hirarkinya serta kebijakan makro pembangunan kawasan strategis dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kebijakan yang perlu diinventarisasi dalam aspek Sarana Umum dan Infrastruktur adalah kebijakan spasial dan sektoral yang diantaranya adalah RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Renstra Instansi Terkait Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, RPJT,

RPJM, dan RPJP Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta Kebijakan Pembangunan terkait lainnya. Metoda yang dipergunakan adalah penelusuran berbagai dokumen dari berbagai instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga penelitian, serta instansi terkait lainnya.

C. Pertemuan di Daerah dengan Stakeholder

Pertemuan dan koordinasi melalui audiensi kepada Pejabat terkait di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bappeda, Dinas Terkait) dilakukan guna memperoleh arahan awal serta pandangan-pandangan daerah terkait dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Tujuan dari pertemuan ini adalah dalam rangka penyusunan konsep identifikasi dan evaluasi Sarana Umum dan Infrastrukur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penjaringan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya terkait dengan permasalahan pemanfaatan ruang, aspirasi/kebutuhan alokasi ruang, kebutuhan sarana dan prasarana, pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan dan pengendalian konflik pemanfaatan ruang dilakukan dengan metoda *focus group discussion* (FGD) menurut kecamatan. FGD ini melibatkan instansi pemerintah terkait, unsur perwakilan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (tomas), tokoh-tokoh agama, kelompok-kelompok masyarakat di wilayah pesisir dan laut dan LSM. Tujuan FGD juga untuk menjaring potensi dan permasalahan pengembangan Sarana Umum dan Infrastrukur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari sudut pandang masyarakat penghuni di kawasan tersebut. Selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan yaitu kegiatan untuk menemukenali fakta-fakta lapangan secara visual mengenai wilayah perencanaan dari hasil pertemuan dengan *stakeholder* terkait Aspek Sarana Umum dan Infrastrukur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara . Metoda yang dipergunakan yaitu *Rural Rapid Appraisal (RRA)* atau penilaian terhadap kondisi kawasan/wilayah perencanaan.

D. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metoda survey instansional dan penelusuran dokumen-dokumen berupa laporan, peta, citra/image dan hasil-hasil penelitian yang terdapat di instansi terkait yaitu instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, LSM, lembaga-lembaga riset, internet dan lain-lain.

BAB IV

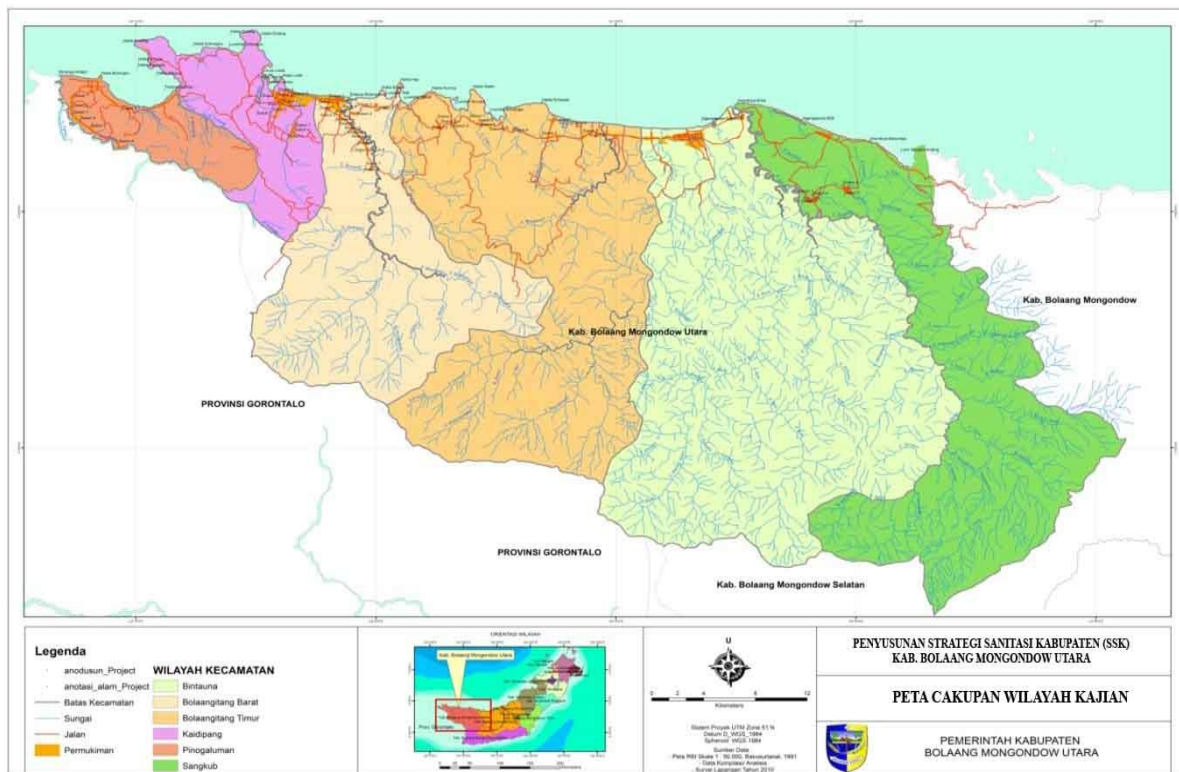
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara yang berada di ujung Utara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak antara 0°30' - 1°0' Lintang Utara dan 123°-124° Bujur Timur. Luas wilayah 185.686 ha (1.856,86 km²) ± 12.3% dari luas Sulawesi Utara dengan panjang pantai mencapai 174 km. Secara administratif dibagi menjadi 107 Desa/Kelurahan dan 6 Kecamatan, dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Timur dengan, Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sebelah Selatan dengan Propinsi Gorontalo;
- Sebelah Barat dengan Propinsi Gorontalo.

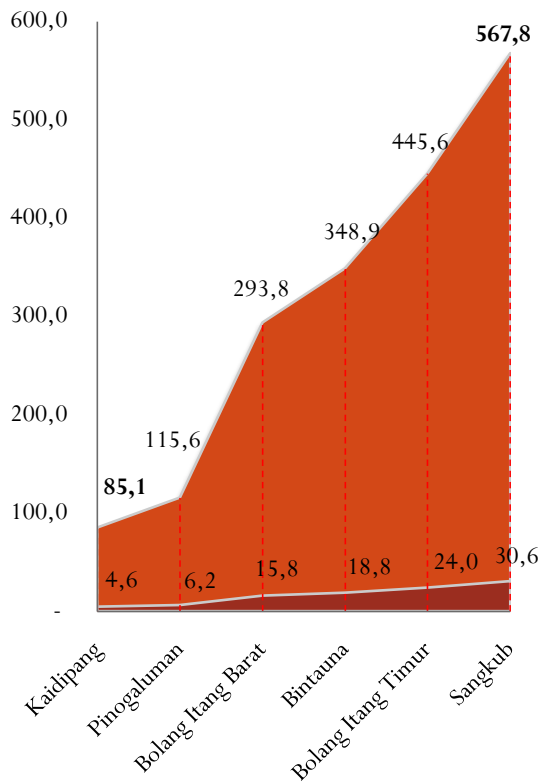


Gambar 6. Peta Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

4.1.2 Luas Wilayah Kecamatan

Tabel 9. Kecamatan dan Luas Wilayah

No.	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS WILAYAH	
			(km ²)	(%)
1	Kaidipang	Boroko	85,1	4,6
2	Pinogaluman	Buko	115,6	6,2
3	Bolang Itang Barat	Bolangitang	293,8	15,8
4	Bintauna	Pimpi	348,9	18,8
5	Bolang Itang Timur	Bohabak I	445,6	24,0
6	Sangkub	Sangkub I	567,9	30,6
J U M L A H			1.856,9	100,0



Gambar 7. Grafik Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, diperoleh informasi bahwa Kecamatan Sangkub merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas, yaitu 567,9 km² atau sekitar 30,6% dari total luas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sementara itu, Kecamatan Kaidipang dengan ibukota kecamatan Boroko merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 85,1 km² atau sekitar 4,6% dari total luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- Data dan informasi mengenai luas wilayah kecamatan ini akan sangat berguna bagi perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama yang menyangkut strategi pembangunan dalam rangka untuk optimalisasi potensi penggunaan lahan

pada tiap kecamatan. Pilihan program intensifikasi atau ekstensifikasi dalam pengelolaan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi wilayah dan masyarakat sangat ditentukan oleh ketersediaan lahan pada tiap kecamatan.

4.2 Karakteristik Aspek Kajian

4.2.1 Aspek Sosial dan Budaya

A. Gambaran Umum Aspek Sosial Budaya Masyarakat

Potensi sosial budaya merupakan potensi yang terdapat di kehidupan masyarakat termasuk masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Keberagaman budaya itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat yang harus dikelola dengan baik. Apabila tidak dikelola dengan baik, aspek sosial budaya yang didalamnya termasuk keberagaman status sosial dan juga pola budaya akan dapat mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan sosial, bahkan pecahnya konflik sosial. Namun, apabila dibina dan dikelola dengan baik, keragaman sosial dan budaya akan menjadi suatu kekuatan atau potensi dalam melaksanakan pembangunan baik di tingkat daerah, maupun nasional.

Dalam konteks untuk menganalisis potensi daerah dalam meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah di Bolaang Mongondow Utara, maka aspek sosial dan budaya yang seirama dengan bentuk kearifan lokal masyarakat pada umumnya diimplementasikan dalam pola kehidupan bersama antar masyarakat seperti budaya tolong menolong, hubungan kekeluargaan dalam pembangunan desa, dan sebagainya merupakan nilai dari kekayaan budaya daerah ini. Selain itu, kondisi objektif masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang terdiri dari beragam etnis dan budaya merupakan sebuah tanda diversitas etnis, budaya, bahasa, agama yang kompleks. Beberapa kondisi yang terkait aspek potensi sosial budaya kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain:

1. Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang merupakan informasi mendasar mengenai perkembangan suatu wilayah. Jumlah penduduk di Bolaang Mongondow Utara berdasarkan dokumen RPJMD adalah 71.570 yang terdiri dari 36.658 Laki-laki dan 34.912 perempuan. Berdasarkan data jumlah pencari kerja, persentase terbanyak yaitu kelompok pendidikan Sarjana Muda (D-3) yakni sebesar 39,91 persen selanjutnya disusul dengan penduduk yang berpendidikan SLTA;
2. Agama yang mendominasi penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mayoritas beragama Islam (85%), dan sarana peribadatan terbanyak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Masjid. Dengan rincian jumlah penganut agama Islam di Bolaang Mongondow Utara sebanyak 65.456 (Islam), 8.121 (Protestan), 77 (Katolik), 9 (Hindu), dan 4 (Budha);

3. Adat istiadat wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dahulunya terdiri dari dua kerajaan atau swapraja yaitu Swapraja Kaidipang Besar dan Swapraja Bintauna. Ke dua swapraja inilah yang kemudian mewariskan budaya dan adat istidat masyarakat yang masih bertahan sampai sekarang. Pengembangan nilai budaya melalui pelestarian dan aktualisasi budaya daerah dapat dilihat dengan masih dilestarikannya beberapa tradisi seperti tarian Daiye, tarian tinggulu, tarian giomu dan tari joke. Begitu juga dengan adat istiadat menyangkut prosesi pernikahan, penjemputan tamu dan hari-hari besar keagamaan.



Gambar 8. Cagar budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Adanya keragaman aspek sosial budaya yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini mendorong pembangunan daerah tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi dan politik semata-mata, namun juga harus memperhatikan kondisi objektif kemajemukan sosial dan budaya masyarakat. Untuk itu heterogenitas dengan segala perbedaannya dan kearifan lokal harus mendapat pengakuan, diperhitungkan, didayagunakan dan diakomodasi dalam formulasi, implementasi kebijakan pembangunan daerah.

Kearifan lokal masyarakat Bolaang Mongondow Utara jika dikelola dengan baik akan menjadi modal dasar dalam proses mempercepat potensi daerah yang berdaya saing di tingkat lokal, begitupula sebaliknya pembangunan daerah akan tercapai sesuai dengan keinginan masyarakat setempat bila tidak merusak tatanan sosial yang selama ini terpelihara dalam masyarakat yaitu nilai kearifan lokal yang dibentuk dari nilai-nilai sosial sebagaimana dikemukakan di atas. Demikian pula nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi bagian dari sistem

sosial maupun struktur sosial yang sudah lama terpelihara dalam masyarakat olaang Mongondow dapat mempunyai fungsi sebagai podoman, pengontrol dan rambu-rambu untuk melaksanakan pembangunan daerahnya agar secepatnya memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakatnya.

Oleh karean itu, temuan yang ditargetkan dalam kajian aspek sosial dan budaya ini adalah menelusuri dan menganalisis nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal potensi daerah dalam meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah agar mampu menciptakan kemandirian daerah dan kemajuan pembangunan merata diseluruh polosok daerah. Dengan kearifan lokal pemerintah daerah mampu membuat secara empiris pembangunan daerahnya dengan kondisi masyarakat terintegrasi secara sosial, harmonis, toleran, kebersamaan, suka tolong menolong. Dengan kajian ini diharapkan mampu memberikan *output* baik kepada pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara maupun masyarakat, agar memiliki pedoman antara lain dalam hal bagaimana nilai kearifan lokal mampu memberikan kontribusi terhadap potensi daerah yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dewasa ini. Karena itu kajian ini merupakan sebuah riset yang masih perlu didalamilebih jauh untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang hubungan antara nilai-nilai kearifan lokal potensi daerah.

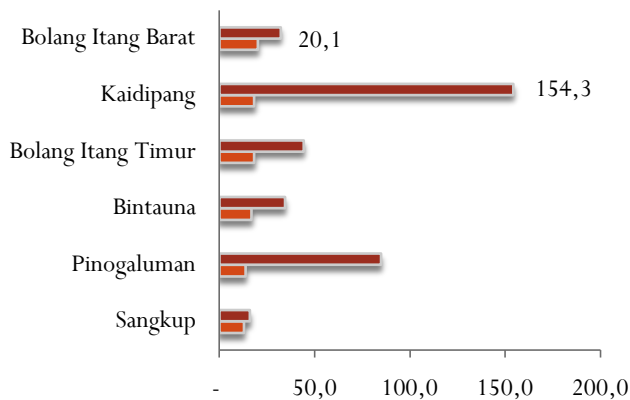
B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data mengenai jumlah dan kepadatan penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2014, terlihat jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Bolang Itang Barat, yaitu 14.382 jiwa atau sekitar 20,1% dari total penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sementara itu jumlah penduduk di Kecamatan Sangkub sebanyak 9.164 jiwa merupakan jumlah penduduk paling sedikit atau hanya sekitar 12,8 dari total jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Namun demikian, apabila jumlah penduduk pada tiap kecamatan ini dikonversi ke dalam tingkat kepadatan penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Kaidipang menduduki tingkat kepadatan tertinggi, yaitu 154,3 jiwa/km², sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Sangkub menduduki tingkat kepadatan penduduk terendah, yaitu hanya 16,1 jiwa/km².

Tabel 10. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Pada Tiap Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
Sangkub	9.164	12,8	16,1
Pinogaluman	9.814	13,7	84,9
Bintauna	12.051	16,8	34,5
Bolang Itang Timur	13.033	18,2	44,4
Kaidipang	13.126	18,3	154,3
Bolang Itang Barat	14.382	20,1	32,3
Jumlah	71.570	100,0	61,1



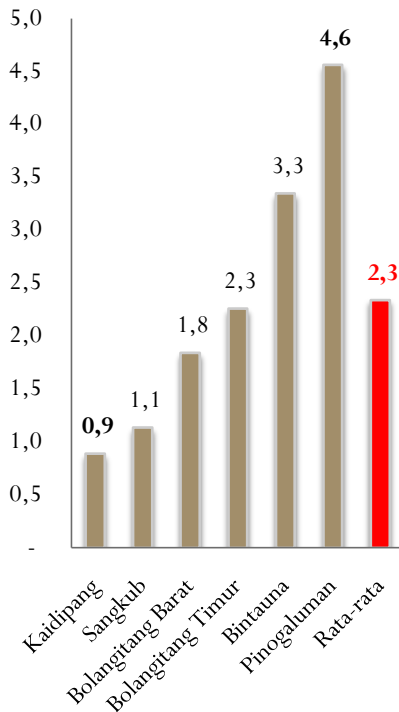
Gambar 9. Grafik Kepadatan Penduduk Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Data mengenai jumlah dan kepadatan penduduk pada tiap kecamatan memberikan gambaran mengenai sebaran penduduk yang merupakan potensi sumberdaya manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terkait dengan program pengembangan infrastruktur kebutuhan masyarakat untuk pengembangan ekonomi wilayah. Optimalisasi dampak dari program pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

salah satunya terlihat nyata dari sebaran penduduk pada tiap kecamatan. Semakin intensif implementasi program pembangunan pada wilayah kecamatan tertentu, maka cenderung akan terjadi pemusatan sebaran penduduk pada wilayah kecamatan tersebut.

Adanya perbedaan kepadatan penduduk di Kecamatan Kaidipang dibandingkan dengan kecamatan lainnya mengindikasikan bahwa pola pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung terpusat pada wilayah kecamatan ini yang juga merupakan ibukota Kabupaten. Ke depan, pola pembangunan perlu diperluas ke wilayah kecamatan lainnya dengan menggali dan mengembangkan potensi sumberdaya yang terdapat di kecamatan lainnya, sehingga secara perlahan akan terjadi pemerataan kepadatan penduduk pada tiap kecamatan.

C. Pertumbuhan Penduduk



Gambar 10. Grafik Tingkat Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

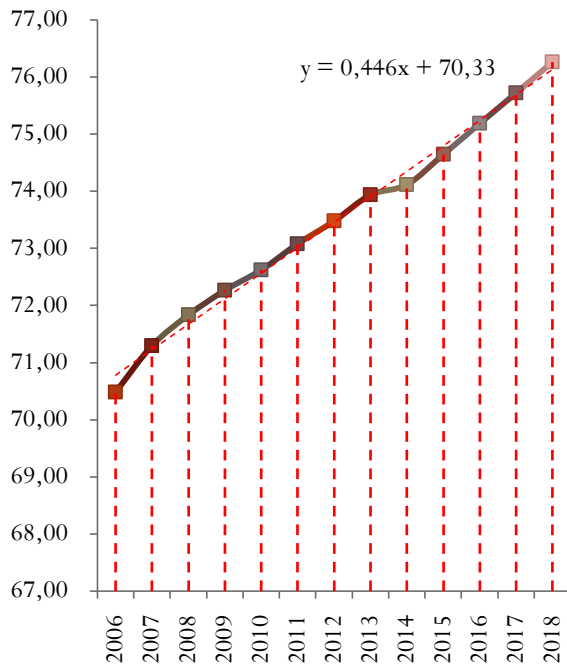
Laju pertumbuhan penduduk pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 2,3% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai potensi penambahan jumlah sumberdaya manusia yang cukup besar sebagai modal pembangunan di masa yang akan datang.

Tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Pinogaluman sebesar 4,6% per tahun, sedangkan yang terendah di Kecamatan Kaidipang, yaitu hanya mencapai 0,9% per tahun. Data ini menunjukkan bahwa diduga terdapat aktivitas yang cukup signifikan yang terjadi di Kecamatan Pinogaluman sehingga mendorong tingkat pertumbuhan penduduk yang tertinggi. Dugaan pertama terkait dengan posisi geografis dari Kecamatan Pinogaluman ini yang berbatasan langsung dengan wilayah kabupaten lain,

yaitu Kabupaten Gorontalo Utara. Pada umumnya, wilayah perbatasan merupakan wilayah transisi antara dua bentuk pola pemerintahan dan masyarakat yang mempunyai intensitas dan dinamika masyarakat yang lebih tinggi. Terdapat wilayah irisan pada wilayah perbatasan yang mendorong peningkatan arus komunikasi dan ekonomi yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Daya tarik wilayah perbatasan inilah yang secara sosial budaya perlu mendapatkan perhatian, baik dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maupun Kabupaten Gorontalo Utara yang saling bersinggungan tepat di Kecamatan Pinogaluman ini. Kondisi ini merupakan tantangan bagi kedua pemerintahan sebagai bagian dari pola perubahan arus sosial ekonomi dan politik yang akan melahirkan trend perubahan pada kondisi penduduk, sumberdaya manusia, dan pola investasi yang pemicu pertumbuhan wilayah yang dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan pembangunan daerah.

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Gambar 11. Grafik IPM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kualitas sumberdaya manusia yang diukur berdasarkan tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat. IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2006 cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan akan tetap meningkat hingga tahun 2018.

Berdasarkan analisis regresi, tingkat pertumbuhan IPM ini mengikuti persamaan garis linear $Y = 0,446X + 70,33$, artinya tingkat minimal IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 70,33 dengan peningkatan per tahunnya sebesar 0,446 dari

nilai IPM di tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai 73,94, sedangkan IPM rata-rata Provinsi Utara sebesar 77,36, hanya terpaut sekitar 4 point.

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan IPM ini sangat terkait dengan aspek sosial budaya masyarakat, terutama pada dua aspek pendidikan dan kesehatan. Pada kedua aspek ini sangat kental nuansa kearifan lokal masyarakat karena nilai kearifan masyarakat berupa nilai yang membawa kelangsungan hidup sehat yang berkeadaban, hidup harmoni, dan juga nilai yang membawa pada hal-hal yang bersifat pencerahan dan tingkat kecerdasan masyarakat.

Pada skala yang lebih luas, kearifan lokal masyarakat juga akan pola pemanfaatan dan eksplorasi sumberdaya alam yang akan lebih dapat terkendali apabila tetap mempertahankan kearifan lokal masyarakat yang pada umumnya lebih kepada kesetimbangan antara kepentingan ekonomi dengan upaya untuk menjaga lingkungannya. Penguatan kearifan lokal akan dapat mempertahankan norma *character and nation building* (pembangunan karakter dan hakekat pembangunan daerah itu sendiri), serta akan mempertahankan *local knowledge* dan komitmen

terhadap *local area and local people*, sehingga akan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable local development*).



Gambar 12. Salah satu bangunan sekolah yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

E. Profil Sosial Budaya Bolaang Mongondow Utara

Karakter Orang Bolaang Mongondow Utara

Secara antropologis, karakter masyarakat dipengaruhi oleh etnik yang tergambar dalam serangkaian tata nilai sosial dan budaya. Sementara secara sosiologis, adanya pengaruh lingkungan sosial juga sangat kuat berpengaruh dalam membentuk karakter masyarakat, serta secara psikologis, karakter masyarakat dipengaruhi oleh kepribadian individu-individu dalam suatu kelompok masyarakat. Tata nilai sosial dan budaya, serta kondisi lingkungan sosial telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat melalui suatu perjalanan panjang, hingga mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi zaman.

Sebagaimana artinya bahwa karakter adalah watak, sifat dan peran individu di dalam pergaulannya di tengah-tengah masyarakat, maka karakter suatu masyarakat akan terbentuk hanya jika ada jaringan interaksi antar manusia dalam bentuk komunikasi antar pribadi maupun antar kelompok budaya yang terus menerus. Kehidupan awal saat terbentuknya suatu masyarakat adalah merupakan faktor penentu di dalam terbentuknya sistem nilai sosial dan budaya, serta tingkahlaku yang kemudian menentukan akar yang terdalam dari kepribadian masyarakat tersebut. Suatu hal yang nyata adalah bahwa norma-norma kepribadian berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya berdasarkan pada perbedaan pengalaman dari anggota masyarakat yang diperolehnya dari hubungannya dengan kebudayaannya.

Orang Bolaang Mongondow Utara memiliki karakter yang diperolehnya dari pengalaman sosial dan budayanya yang berlaku dalam masyarakat sejak zaman kerajaan yang berasal dari dua Swapraja, yakni **Kerajaan Kaidipang Besar dan Kerajaan Bintauna**. Karakter orang Bolaang Mongondow Utara digambarkan dalam bentuk penyatuan kedua Swapraja tersebut ke dalam Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara. Hal ini menggambarkan bahwa betapa demokrasinya masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang lebih mementingkan menyatukan pendapat daripada memunculkan perbedaan dan ego sektoral masing-masing, demi terwujudnya pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang lebih baik dan sejahtera. Dukungan rakyat sangat penting dalam upaya penyatuan kedua Swapraja tersebut. Tanpa dukungan dari masyarakat, maka penyatuan kedua Swapraja tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan bahkan akan beroleh perlawanan dari rakyat. Kesejahteraan rakyat juga tergantung dari kepemimpinan pemerintahan dan Aliansi Lembaga Adat yang adil dan bijaksana serta selalu memperhatikan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok atau golongan.



Sisa Bangunan Kerajaan Kaidipang Yang Sebagian Telah Hancur



Wawancara Tim Peneliti Dengan Salah Satu Pelaku Sejarah

Gambar 13. Bangunan sisa Kerajaan Kaidipang yang sebagian telah mengalami kehancuran dan wawancara yang dilakukan oleh Tim peneliti dengan narasumber salah satu pelaku sejarah

Pada dasarnya penyatuan kedua swapraja tersebut adalah merupakan kesepakatan luhur antara pemerintah dengan rakyat yang mengandung unsur konsistensi terhadap apa yang menjadi tanggungjawab bersama. Dalam penyatuan tersebut terdapat pengakuan bahwa ada yang memerintah, ada yang membantu, dan ada pula yang mengadili bila terjadi penyalahgunaan

wewenang dan pelanggaran atas adat istiadat yang telah menjadi milik bersama tersebut. Inilah karakter yang tercipta dari penyatuan kedua swapraja tersebut dan telah menjadi sistem nilai sosial dan budaya yang berlaku pada masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Pemimpin dalam mengambil keputusan atau kebijakan selalu dibuat secara bersama antara pemerintah dan Aliansi lembaga Adat Bolaang Mongondow. Hal ini terjadi karena terjalannya komunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyatnya. Keputusan yang telah ditetapkan akan menjadi tanggungjawab bersama untuk dilaksanakan secara bersama-sama pula. Seorang pemimpin membutuhkan dukungan dari rakyatnya dan rakyat membutuhkan kebijakan yang dapat mengangkat derajat hidupnya. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pemimpin selalu menjadi perhatian rakyat, sehingga pemimpin tidak dapat berbuat semena-mena atas wewenang kekuasaan yang dimilikinya.

Karakter utama orang Bolaang Mongondow Utara yang tercipta dari adanya penyatuan Swapraja Kaidipang Besar dan Bintauna tersebut sebagai kearifan lokal adalah sebagai berikut:

1. **TanggungJawab.** Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya, menanggung akibatnya. Pembangunan masyarakat Bolaang Mongondow Utara menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Aliansi Lembaga Adat dan masyarakat. Kehidupan bersama yang saling mendukung antara pemimpin dan rakyatnya telah membentuk nilai dan norma sosial yang kemudian dituangkan dalam bentuk aturan hukum adat. Apabila aturan hukum adat tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan harus memperoleh peringatan dan bahkan akan beroleh sanksi berupa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Yang dibutuhkan rakyat adalah peneguhan sikap moral sang pemimpin untuk sungguh-sungguh dan penuh kejujuran dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyatnya. Tanggung jawab seperti ini juga berlaku dalam lingkungan keluarga. Nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, juga berlaku dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga saling memberikan tanggung jawabnya masing-masing. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, dan anak bertanggung jawab kepada orang tua.
2. **Demokratis.** Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Keterlibatan Aliansi Lembaga Adat dan masyarakat dalam memantau dan membantu pemerintah dalam

menjalankan roda pemerintahan membuktikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan pemerintahannya secara demokratis dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan sejahtera. Untuk memperoleh dukungan penuh dari rakyatnya, maka pemimpin mengakui bahwa rakyatnya juga memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Dilibatkannya Aliansi Lembaga Adat dan masyarakat dalam pembangunan Bolaang Mongondow Utara menandakan bahwa terdapat suasana saling percaya, saling hormat menghormati, dan saling menghargai antara pemimpin dan rakyatnya. Rakyat memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemimpin yang akan mengangkat derajat hidup mereka. Rakyat percaya kepada pemimpin yang baik dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, dan akan mendukung sepenuhnya serta membantu pemimpin yang menghargai serta menghormati rakyatnya.

3. **Kerjasama.** Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Kerjasama merupakan salah satu cara untuk cepat mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh manusia hampir dalam semua aspek kehidupan. Jalinan kerjasama antara pemerintah, Aliansi Lembaga Adat dan masyarakat Bolaang Mongondow Utara diperlihatkan dalam suatu kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara. Kegiatan kerjasama tersebut seperti, pada kegiatan *Mopohabaru* atau kegiatan saat menyambut Bulan Suci Ramadhan. Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara akan melaksanakan prosesi adat di rumah kediaman Bupati Bolaang Mongondow Utara. Dalam prosesi adat tersebut, Bupati selaku pemerintah daerah mengucapkan terimakasihnya kepada para tokoh adat karena telah memberikan khabar kepada pemerintah daerah atas datangnya Bulan Suci Ramadhan. Hal ini mencerminkan bahwa seorang penguasa tidak dapat menjalankan roda pemerintahan kerajaannya jika tidak didukung oleh rakyat. Jalinan kerjasama antara pemerintah daerah dan Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara merupakan upaya untuk memajukan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara demi terwujudnya masyarakat yang berbudaya, sejahtera, dan berkeadilan. Juga yang terpenting adalah bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik tanpa dukungan penuh dari rakyatnya. Demikian pula sebaliknya, bahwa rakyat tanpa pemimpin yang baik, hanya akan mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan hidup mereka. Oleh sebab itu dibutuhkan

kerjasama yang baik antara pemimpin dan rakyat sehingga apa yang dicita-citakan akan terwujud dan kerajaan akan semakin maju dan disegani oleh kerajaan lain. Di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat sebuah waduk raksasa yang diperuntukkan bagi pembangunan pertanian yang lebih maju dan modern. Dalam pembangunan waduk tersebut, masyarakat turut serta berpartisipasi dengan cara bergotong royong. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama membangun waduk tersebut karena akan berguna bagi masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada umumnya.

4. **Jujur dan Adil.** Jujur adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sikap dan sifat seseorang. Sedangkan adil timbul karena penyatuan dan penyesuaian untuk memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Terciptanya suatu hubungan yang saling terbuka antara pemerintah daerah dengan Aliansi Lembaga Adat dan masyarakat, telah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah telah berlaku jujur dan adil kepada masyarakatnya. Hal ini terlihat pada saling terbukanya antara pemerintah dan masyarakat untuk mengutarakan maksud yang terkandung di dalam hati masing-masing. Pemerintah walaupun memiliki wewenang dan kekuasaan, namun secara jujur dan terbuka menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminta dukungan dari rakyat atas kepemimpinannya. Demikian pula Aliansi Lembaga Adat dan masyarakat yang juga merupakan rakyat biasa, selalu secara jujur mengutarakan keinginannya sebagai rakyat agar derajat hidup dan kesejahteraannya ditingkatkan.

Karakter Budaya Masyarakat

Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Mandiri, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkeadilan”. Salah satu yang menjadi arah pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui visi tersebut adalah berbudaya, yakni mewujudkan masyarakat modern yang berkepribadian dan mempunyai jati diri dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang dinamis, kreatif dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi. Sedangkan salah satu misi yang diemban oleh pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah “meningkatkan harmonisasi kehidupan antara umat beragama dan kesadaran hukum, serta meningkatkan ketahanan budaya lokal”.

Pada masyarakat Bolaang Mongondow Utara, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara. Terbentuknya Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow ini adalah merupakan penggabungan dari dua eks Swapraja, yakni Kaidipang Besar dan Bintauna. Adat istiadat yang berlaku pada kedua eks Swapraja tersebut memiliki kesamaan dalam proses pelaksanaannya, akan tetapi berbeda dalam penggunaan bahasa, yakni pelaksanaan adat pada wilayah eks Swapraja Kaidipang menggunakan bahasa Kaidipang dan pelaksanaan adat pada wilayah eks Swapraja Bintauna menggunakan bahasa Bintauna.

Selain kedua bahasa tersebut, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga masyarakatnya ada yang menggunakan bahasa Mongondow, bahasa Gorontalo, bahasa Sangihe, dan bahasa Minahasa. Perbedaan bahasa dalam masyarakat penggunaannya tidak menimbulkan konflik diantara mereka dan bahkan lebih mempererat persatuan masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Untuk itulah, maka dibentuk Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara dalam rangka mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut dalam satu wadah yang disebut adat Bolaang mongondow Utara. Lembaga Aliansi Lembaga Adat oleh pemerintah daerah selalu dilibatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar program pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan tata nilai sosial budaya dan hukum adat yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Hal ini menandakan bahwa betapa pedulinya pemerintah daerah dalam membangun dan menjaga kelestarian hukum adat yang dijadikan sebagai pedoman dan arah pembangunan daerah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berbudaya.

Hukum adat yang bersumber dari kedua eks Swapraja tersebut, perlu secara terus-menerus untuk ditumbuh-kembangkan kembali eksistensi dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat yang berisi adat dan tradisi merupakan nilai-nilai luhur dan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat, serta menjadi identitas dan karakter masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Membangun dan melestarikan adat dan tradisi yang bersumber dari kedua eks Swapraja tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pemangku adat, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat agar adat istiadat yang berlaku pada masyarakat tersebut tetap lestari.

Pada masyarakat Bolaang Mongondow Utara terdapat falsafah yang menjadi pedoman masyarakat dalam bergaul dan bertingkah laku. Dalam banyak masyarakat, seseorang sering bergaul saling bantu membantu dan melakukan aktifitas bersama dengan saudara-saudara sekandungnya, saudara-saudara sepupunya dari pihak ayah maupun ibu, saudara-saudara sepupu sederajat dari pihak ayah maupun ibu, kemudian juga saudara-saudara istrinya, dan bahkan dengan masyarakat sekitar dimana dia bergaul. Pada aktifitas-aktifitas bersama dari suatu golongan kerabat baik kerabat dekat maupun jauh dan bahkan dengan para tetangga selalu berpedoman pada falsafah tersebut. Adapun falsafah tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Mososompiana (saling berbaikan)**. Kata *mososompiana* secara leksikal yang dikutip dari aksen lokal masyarakat Bolaang Mongondow Utara adalah ‘baku-baku bae, atau saling berbaikan, saling mengingatkan atau saling merindukan. Istilah ini mengandung makna bahwa masyarakat Bolaang Mongondow Utara selalu memupuk rasa damai, saling menjaga persaudaraan, agar selalu bersatu dalam suasana yang akrab. Saling berbaikan artinya tidak bermusuhan atau tidak bertengkar, menjadi karib, berdamai. Dengan demikian *mososompiana* adalah semboyan yang sangat penting dalam menjaga kedamaian masyarakat, agar selalu saling memaafkan dan berusaha menghindari pertikaian atau konflik. Dalam kehidupan sosial di masyarakat, konflik sering terjadi dan muncul sebagai akibat perbedaan, perselisihan paham baik antar individu maupun kelompok masyarakat. Konflik merupakan reaksi dari kontroversi yang berpotensi memutus jaringan komunikasi, dan akan berakibat tersendatnya atau bahkan tidak tercapainya tujuan yang dicita-citakan bersama. Oleh karena konflik merupakan warisan kehidupan sosial, maka leluhur masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang berasal dari kedua ks Swapraja yang masih terdengar cerdas menitipkan kata *mososompiana* sebagai suatu pegangan yang selalu diingat oleh masyarakatnya. Suatu ide dan gagasan yang cermat untuk selalu menyadarkan manusia agar selalu saling ingat dan mengingatkan, saling maaf dan memaafkan, agar selalu tercipta kehidupan yang rukun dan damai dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penuturan para tokoh adat, *mososompiana* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan *mososandova* dan *mototabia* dalam melakukan sesuatu aktivitas atau pekerjaan secara bergotong-royong pada masyarakat Bolaang Mongondow Utara walau dalam kondisi dan situasi apapun. *Mososompiana* adalah asas berpikir dan bertindak untuk saling menolong dalam melepaskan atau meringankan beban, baik pikiran maupun

pekerjaan. Masyarakat Bolaang Mongondow Utara telah mewarisi pepatah *berat sama dipikul ringan sama dijinjing* dalam melakukan berbagai aktivitas. Di dalamnya melekat perasaan hubungan timbale balik dalam suatu bentuk hubungan sosial yang sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian *mososompiana* dapat dimaknai sebagai pesan leluhur (nenek moyang), agar masyarakatnya saling menasehati, saling mengingatkan dan selalu menjunjung tinggi persaudaraan. Artinya, tidak menghendaki saudara atau kerabat larut dalam kesalahan dan kekhilafan. Senantiasa setiap orang saat saling mengingatkan, dan hanya saudara yang saling mengasihi dan menyayangi yang saling merindukan. *Mososompiana* diyakini sebagai pelecut energi yang mengarah ke hal-hal yang lebih baik.

2. **Mososandova (saling mengingatkan)**. *Mososandova* bermakna saling memperbaiki atau saling mengingatkan, artinya saling mengingatkan dan saling memperbaiki apa yang dianggap salah, keliru atau menyimpang dari norma dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Adat istiadat yang berlaku pada kedua Swapraja, Kaidipang Besar dan Bintauna merupakan nilai, norma dan kebiasaan yang telah dilaksanakan secara turun temurun dan telah menjadi pegangan hidup dalam bersikap dan berperilaku pada masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Jika ada anggota masyarakat yang bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, maka akan diingatkan dan diperbaiki oleh para tokoh adat yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara. *Mososandova* atau saling mengingatkan dan saling memperbaiki bukan hanya ditujukan pada masyarakat atau rakyat biasa saja. Saling mengingatkan dan saling memperbaiki juga ditujukan kepada pemerintah, apabila ada kebijakan atau perilaku aparat pemerintah yang tidak sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Demikian pula bila ada tokoh adat atau tokoh masyarakat yang tidak melaksanakan tata aturan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, akan diingatkan dan diperbaiki oleh tokoh adat lainnya agar sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat di Bolaang Mongondow Utara. Kemajuan dan kemakmuran daerah Bolaang Mongondow Utara sangat ditentukan oleh pemimpin yang berkarakter dan berbudaya, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Keharmonisan akan terjalin dengan baik apabila pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan

masyarakat pada umumnya saling mengingatkan dan saling memperbaiki dalam kebenaran sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

3. **Mototabia (saling menyayangi).** *Mototabia* memiliki makna saling mencintai, saling mengasihi, atau saling menyayangi. Pengertian *mototabia* secara terminologi dapat diartikan sebagai cinta, kasih dan sayang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2008) cinta artinya suka sekali; sayang benar; kasih sekali; terpicat (antara laki-laki dan perempuan); ingin sekali; berharap sekali dan rindu. Sedangkan kata kasih mengandung arti ‘perasaan sayang’ atau ‘suka kepada’. Perasaan sayang dan suka bukan hanya terhadap manusia, tetapi juga kepada sesuatu baik benda maupun lingkungan sekitarnya. Kata yang terakhir yaitu ‘sayang’ mengandung arti ‘kasih sayang kepada sesuatu’, ‘cinta kepada sesuatu’, ‘sayang kepada sesuatu’, ‘amat suka kepada sesuatu’, ‘mengasihi dan mencintai kepada sesuatu’. Dari beberapa pengertian di atas, *mototabia* yang merupakan salah satu dari falsafah masyarakat Bolaang Mongondow Utara mengandung arti dan makna yang kompleks, suatu himpunan kesatuan bahasa yang sempurna, tak kurang suatu apapun. Inti dari *mototabia* adalah rasa cinta kasih dan kasih sayang, yang seluruh muatannya bernilai positif dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Mototabia* merupakan perekat yang kokoh antar masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utarayangsaling berpegang teguh pada aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Ada keterikatan rasa kebersamaan yang tidak disandarkan pada satu elemen. *Mototabia* bukan merupakan suatu bentuk cinta kasih dan kasih sayang yang mengandung hasrat dan nafsu antara laki-laki dan perempuan. *Mototabia* mengandung makna yang luas dan dalam nilainya, yakni rasa cinta terhadap sesama manusia, yaitu ramah dan menaruh simpati serta empati kepada siapa saja. *Mototabia*, pada akhirnya akan menimbulkan rasa persaudaraan yang mendalam, hidup rukun dan damai di tanah Totabuan. Dengan *mototabia ini* telah menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow Utara memiliki karakter yang selalu berlaku baik kepada siapa saja yang datang ke daerah Bolaang Mongondow Utara. Selalu merasa senang untuk menjalin hubungan persaudaraan dengan siapa saja, dan selalu sayang menyayangi kepada siapa saja. Budaya ini telah menjadikan masyarakat Bolaang Mongondow Utara selalu ramah kepada para tamu dan pendatang yang dianggap sebagai saudara yang datang dari jauh.



Gambar 14. Salah satu prosesi adat dan bangunan kerajaan yang akan direnovasi

Karakter Sosial Masyarakat

Masyarakat Bolaang Mongondow tidak bisa dilepaskan dari keberadaan masyarakat Bolaang Mongondow Utara secara keseluruhan. Walaupun masyarakat Bolaang Mongondow Utara sudah menyebar dalam ruang otonomi daerah yang berbeda yaitu melalui pemekaran beberapa kabupaten dan kota yang dulunya hanya dikenal sebagai Kabupaten Bolaang Mongondow yang menjadi bagian dari Propinsi Sulawesi Utara.

Sebagai daerah yang dikenal tingkat penduduknya cukup heterogen, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat identik dengan daerah mosaik yang tingkat relasi sosialnya cukup kondusif, aman, dan harmonis. Kolektivitas masyarakat dapat dipersatukan oleh berbagai karakter dan modal sosial dari kearifan lokal yang berlatarbelakang etnisitas yang masing-masing terikat satu sama lain. Sementara modal sosial masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang majemuk dapat dipersatukan melalui integrasi adat melalui Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara yang berasal dari Swapraja Kaidipang Besar dan Bintauna yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat yang hidup bersama dan toleran. Keharmonisan yang terbangun dalam masyarakat merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat berupa kehendak baik, simpati persahabatan, hubungan sosial antarindividu dan keluarga yang dapat mengatasi persoalan masyarakat.

Masyarakatnya juga selalu mengedepankan musyawarah yang dilaksanakan oleh Aliansi Lembaga Adat Bolaang Mongondow Utara dalam memutuskan dan melaksanakan suatu perkara atau pekerjaan. Keseluruhan kegiatan dalam masyarakat membentuk relasi sosial antara warga

seperti tradisi gotong royong dalam membangun tempat ibadah dan fasilitas umum. Karakter masyarakatnya dapat membentuk solidaritas masyarakat dan sangat positif dalam memelihara sistem sosial masyarakat. Dalam realita sosial masyarakat Bolaang Mongondow Utara terutama di daerah pedesaan, masih sangat taat dan tunduk kepada orang-orang yang dianggap tua, baik itu para tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin agama, tokoh adat maupun para pemimpin formal baik pejabat birokrat maupun politik.

Interaksi sosial masyarakat secara umum terjalin sangat harmonis, meskipun dalam komunitas penduduk terdapat berbagai ragam kaum minoritas etnis pendatang yang sebagian besar telah berbaur dengan masyarakat lokal. Berdasarkan lokasi penyebaran penduduk, masyarakat yang berasal dari kedua Swapraja merupakan masyarakat yang tergolong menjadi penduduk asli sebenarnya dan menduduki komposisi penduduk mayoritas. Kondisi sosial masyarakat Bolaang Mongondow Utara sangat harmonis dalam kehidupan sosialnya. Penduduk Bolaang Mongondow Utara sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, hidup berdampingan secara harmonis dan tidak pernah terjadi konflik antar etnis diantara mereka, seperti Gorontalo, Minahasa, Sangir, dan kelompok etnis lainnya dengan komposisi jumlah penduduk yang cukup majemuk.

Masyarakat yang berasal dari kedua Swapraja sebagai kelompok etnis mayoritas memiliki adat istiadat dan budaya yang sama namun berbeda dalam penggunaan bahasa. Walaupun memiliki bahasa sendiri dan masih tetap digunakan oleh sebagian besar masyarakatnya, namun pada umumnya mereka selalu hidup dalam kerukunan dengan jalinan hubungan yang harmonis. Sedangkan agama yang dianut oleh penduduk adalah mayoritas beragama Islam dan hanya sebagian kecil yang beragama Kristen dan Hindu. Umumnya penduduk yang beragama Kristen dan Hindu adalah merupakan masyarakat pendatang yang telah lama tinggal dan menetap di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Gotong-royong adalah terjemahan dari tolong-menolong, bantu membantu, dan bahkan ada pula yang mengatakan sebagai kerjasama, yang secara bersama-sama dalam berbuat atau melakukan sesuatu. Istilah gotong royong dikenal sebagai suatu bentuk solidaritas, atau sifat satu rasa maupun satu nasib yang menjadidiri khas masyarakat Indonesia. Pada zaman dahulu gotong royong dikenal sebagai bentuk solidaritas masyarakat tradisional agraris. Dalam pelaksanaannya biasanya masyarakat menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Jika ditinjau dari aspek sosiologis gotong-royong menjadikan masyarakat yang saling hidup dalam

suasana interaksi, dan mempunyai jiwa persatuan dan kesatuan yang berlandaskan dengan kebersamaan.

Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tetap melaksanakan kegiatan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kegiatan gotong royong pada masyarakat Bolaang Mongondow Utara merupakan bentuk solidaritas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sejak dahulu kala yang diwujudkan dalam bentuk tolong menolong antar sesama anggota masyarakat maupun tolong menolong dalam mengerjakan dan memperbaiki tempat-tempat ibadah, tempat-tempat umum yang digunakan secara bersama-sama oleh warga masyarakat. Kegiatan tolong menolong dalam masyarakat ini masih tetap terjalin dengan baik karena masyarakat Bolaang Mongondow Utara pada umumnya masih terikat hubungan kekeluargaan antarsatu sama lainnya berdasarkan relasi sosial yang disebut ikatan primordial yaitu melalui ikatan keluarga dan letak geografis, daerah, suku dan bahasa.

Gotong royong pada masyarakat Bolaang Mongondow Utara penerapannya dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu *Tiayodan Ruhuka*. *Tiayo* merupakan kegiatan gotong royong dalam masyarakat untuk membantu pekerjaan seseorang, keluarga atau masyarakat, yang sedang mengerjakan sesuatu kegiatan, baik di bidang pertanian, perikanan, atau pembangunan, misalnya membantu seseorang yang sedang mengerjakan lahan pertaniannya, membantu salah satu keluarga yang sedang membangun rumah, membantu kegiatan pesta sebuah keluarga seperti mendirikan tenda pesta, membantu mengerjakan sesuatu yang akan berguna bagi orang banyak dan lain sebagainya. Umumnya bantuan yang diberikan dalam bentuk tenaga dan materi yang bermanfaat bagi seseorang atau keluarga yang sedang melakukan pekerjaan tersebut.

Tiayo juga merupakan kegiatan gotong royong untuk mengerjakan sesuatu hal kepentingan umum yang diwujudkan dalam bentuk kerja bakti, seperti kerja bakti membersihkan kantor desa, masjid, pembuatan jalan desa, tanggul desa dan tempat-tempat umum lainnya yang selalu digunakan oleh masyarakat desa pada umumnya. Kegiatan gotong royong lainnya adalah *Ruhuka* atau bekerja membantu orang atau masyarakat secara bergilir. Umumnya kegiatan *Ruhuka* dilaksanakan dalam bentuk suka rela, tidak dipungut biaya apapun. Sama halnya dengan *tiayo*, kedua-duanya tidak ada pungutan biaya sedikitpun, kedua istilah *tiayo* dan *ruhuka* ini tidak ada perbedaan sedikitpun. Keduanya bermakna gotong royong.

Karakter Sosial Budaya Masyarakat dan Akselerasi Pembangunan Daerah

Eksistensi kearifan lokal dalam sistem pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, hampir selalu belum mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah, terutama mulai dari aspek perencanaan atau pelaksanaan pembangunan. Pendekatan perencanaan yang berorientasi pada penguatan kearifan lokal harus meletakkan pada pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan potensi yang berkembang di daerah dan memahami secara sungguh-sungguh masalah yang dihadapi masyarakat serta mencari alternatif pemecahan masalah dengan melibatkan segala unsur kekayaan nilai yang melekat baik dari modal sosial maupun kearifan masyarakat daerah. Pendekatan ini cukup beralasan mengingat dukungan segala potensi masyarakat diharapkan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah sebagai bagian pembangunan nasional tanpa merugikan masyarakat lokal yaitu masyarakat Bolaang Mongondow Utara, bahkan sebaliknya mendatangkan keuntungan pembangunan yang dapat dirasakan dimana pembangunan harus memberi *trickle down effect* kepada masyarakat setempat. Karenanya kebijakan pembangunan daerah harus semata-mata ditujukan pada kepentingan masyarakat termasuk masyarakat lemah, terbelakang, miskin dengan formulasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat tersebut harus mengenali aspek kebhinnekaan yang lahir dari kemajemukan, pluralisme atau keragaman. Sehingga pembangunan daerah tidak bisa disamaratakan secara nasional, mengingat kondisi masyarakat yang berbeda dan masing-masing memiliki karakter kearifan lokal dan modal sosial.

Sebagai daerah dengan kondisi masyarakatnya yang cukup heterogen, meskipun tidak terdapat data penduduk berdasarkan etnis bisa dimaklumi karena daerah ini baru saja memekarkan diri sebagai daerah baru, sehingga data-data gambaran komposisi penduduk berdasarkan etnis belum tersedia secara lengkap. Juga perlu penelusuran lebih jauh tentang sejarah masyarakat Bolaang Mongondow Utara yang terbentuk dari Swapraja Kaidipang Besar dan Bintauna dengan memanfaatkan bukti-bukti sejarah Bolaang Mongondow Utara yang berada arsip nasional dan bahkan yang terdapat di negeri Belanda yang pernah menjajah wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan kondisi kemajemukan seperti ini dapat dikatakan bahwa Bolaang mongondow Utara sebagai daerah baru yang struktur masyarakatnya multietnis dimana ada beberapa keistimewaan daerah ini antara lain:

- **Pertama**, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai daerah yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Bolaang Mongondow, disamping sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Gorontalo, juga tempat bertemunya berbagai kelompok etnis yang masing-masing memiliki sikap multikulturalisme yakni mengakui adanya perbedaan yang diimplementasikannya dalam sebuah kearifan lokal dan modal sosial seperti nilai toleransi dan kerjasama.
- **Kedua**, perjalanan sejarah yang dulunya masih merupakan wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sekarang telah dilakukan pemekaran sehingga telah menciptakan daerah-daerah baru yang otonom yang satu diantaranya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Masyarakat Bolaang Mongondow Utara juga sangat megenal konsep kearifan lokal yang bersumber dari dua Swapraja Kaidipang Besar dan Bintauna yang merupakan sistem nilai dan norma masyarakat. Walaupun terjadi perdebatan tentang pemahaman dari konsep ini, akan tetapi pada dasarnya kita sepakat bahwa penyatuan kedua Swapraja tersebut sebagai konsep kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan, adat istiadat, dan budaya masyarakat.
- **Ketiga**, Bolaang Mongondow Utara membentuk masyarakatnya yang terintegrasi dari berbagai etnis yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat sebagai suatu modal sosial yang di dalamnya telah melahirkan kebersamaan, kerjasama, dan toleransi yang didukung oleh kearifan lokal dari beragam sosial masyarakatnya. Kedua karakter atau nilai tersebut dapat menjadi akumulasi modal sosial baik dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan daerah. Karenanya kemajemukan masyarakat Bolaang Mongondow Utara dalam memelihara relasi sosial dan keharmonisan serta kohesivitas sangat cocok dengan pandangan Weiner (1988) mengajukan strategi yang ditempuh oleh suatu negara yaitu asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman.

4.2.2 Aspek Kelautan dan Perikanan

Wilayah pesisir dan laut merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah melalui kegiatan usaha perikanan. Untuk lebih mengoptimalkan wilayah pantai dan laut sebagai sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Otonomi Daerah yaitu daerah Kabupaten berhak atas wilayah 4 mil laut (1/3 dari wilayah

propinsi) khususnya pada sumberdaya hayati laut (ikan dan biota laut lainnya), maka sangat diperlukan suatu studi tentang potensi sumberdaya ikan yang ada di daerah tersebut. Data ini sangat bermanfaat dalam rangka pengembangan sub sektor perikanan.

Hal ini sesuai dengan pelaksanaan pembangunan perikanan dalam rangka konsepsi benua maritim yaitu bahwa pembangunan perikanan memerlukan dukungan IPTEK yang meliputi bidang sumberdaya, penangkapan ikan, marikultur, pasca panen dan pariwisata laut. Potensi yang ada tersebut kalau dikelola dengan baik akan mendatangkan keuntungan secara terus menerus (berkelanjutan), tetapi kenyataan di lapangan banyak terjadi kegiatan eksploitasi ikan yang tidak memperhatikan masalah kelestariannya, bahkan dengan cara-cara yang merusak habitat. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi, kalau tidak ada upaya pencegahan, sumberdaya ikan yang ada dapat menjadi punah. Hal ini tidak sejalan dengan *code of conduct for responsible fisheries* dimana negara pemakai harus menjaga kelestarian sumberdaya perikanan.

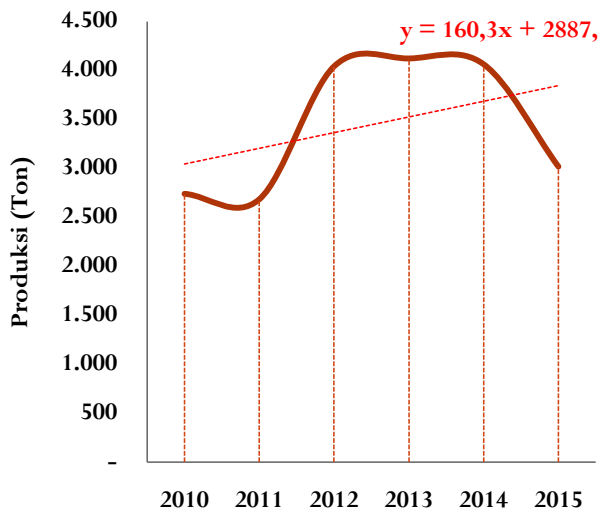
Secara umum, hingga pada tahap penyusunan data dan informasi awal ini, pada aspek perikanan dan kelautan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara teridentifikasi bahwa:

- 1) Belum tersedianya data dasar potensi sumberdaya perikanan dan kelautan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terupdate dengan baik;
- 2) Belum tersedianya informasi tentang potensi, peluang dan permasalahan pengembangan industri perikanan tangkap, industri perikanan budidaya, dan industri kelautan lainnya.
- 3) Belum adanya hasil pengkajian potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang memadai sebagai sumber informasi awal.

A. Perikanan Tangkap

Potensi sumberdaya kelautan di Bolaang Mongondow Utara selama ini telah dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas perekonomian, di mana salah satunya adalah dalam usaha perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu sendiri merupakan aktivitas perekonomian yang unik bila dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi sumberdaya laut dan ikan itu sendiri yang sering dianggap sebagai sumberdaya milik umum (*common property resources*). Sumberdaya ikan ini bersifat *renewable resources* (sumberdaya yang dapat pulih) tetapi bukan berarti tak terbatas sehingga apabila tidak dikelola secara hati-hati, akan memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan sumberdaya ikan dan lingkungan. Dalam

usaha perikanan tangkap, permasalahan yang sering terjadi adalah tingkat penangkapan ikan di suatu wilayah yang melebihi potensi lestarinya (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) sehingga terjadi fenomena tangkap lebih (*overfishing*) yang berakibat pada penurunan hasil tangkapan persatuan upaya (*catch per unit effort*) yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan.



Gambar 15. Grafik Produksi Perikanan Tangkap Bolaang Mongondow Utara Periode 2010 - 2015

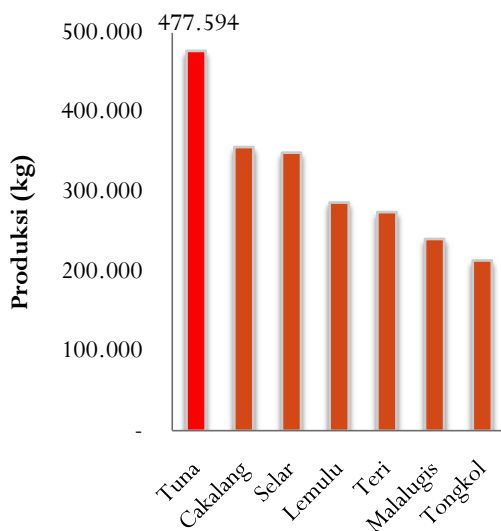
terjadi peningkatan produksi pada kurun waktu 2010 – 2015, yaitu dengan persamaan regresi $Y = 160,3 X + 2887$ (Gambar 13). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perikanan tangkap di perairan Bolaang Mongondow Utara cenderung positif dan dapat diandalkan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pesisir.

Pada tahun 2015 ini, jumlah nelayan yang bergerak dalam perikanan tangkap di Bolaang Mongondow Utara tercatat 9.010 jiwa, maka pada tahun 2015 ini diperkirakan masing-masing nelayan secara rata-rata mampu memperoleh hasil tangkapannya sebesar 0,34 ton atau sekitar 340 kg. Apabila diasumsikan bahwa harga rata-rata hasil tangkapan nelayan itu adalah Rp. 40.000,- per kilogram, maka dalam satu tahun (2015), nelayan di Bolaang Mongondow Utara mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 13.400.000, atau sekitar Rp. 1.1 juta per bulan. Suatu penghasil yang cukup besar untuk kelompok masyarakat nelayan.

Febrianti dan Nasution (2014) menyebutkan bahwa larva yang tertangkap di perairan Laut Sulawesi sebanyak 800 ind/m³ terdiri dari 35 famili yang didominasi oleh Clupeidae (35,88%), Engraulidae (22,75%), Scombridae (8%), dan Labridae (8%). Pendekatan yang bagus untuk pengelolaan, khususnya penutupan daerah dan musim penangkapan, namun diperlukan kajian lanjut. Berdasarkan data produksi perikanan tangkap Bolaang Mongondow Utara, terdapat kecenderungan



Gambar 16. Aktivitas nelayan dan produksi perikanan tangkap



Gambar 14. Grafik Jenis Ikan Produksi Perikanan Tangkap Bolaang Mongondow Utara

Secara teoritis produksi perikanan di suatu daerah ditentukan oleh stok sumberdaya ikan di daerah tersebut dan besarnya upaya penangkapan yang dikerahkan untuk menghasilkan tangkapan. Produktivitas sumberdaya ikan akan ditentukan oleh tangkapan per unit upaya (*Catch Per Unit Effort/CPUE*). Semakin besar CPUE berarti produktivitas sumberdaya ikan meningkat, sebaliknya semakin menurun CPUE berarti produktivitas sumberdaya ikan menurun. Apabila produktivitas sumberdaya ikan menurun maka pengendalian terhadap jumlah upaya penangkapan harus dilakukan. Ketika pemanfaatan (*fishing*

effort) lebih besar dari pada tangkapan optimum (MSY), maka akan terjadi pemanfaatan yang berlebihan (*over exploited*).

Perhitungan CPUE maupun MSY perairan laut Bolaang Mongondow Utara belum dapat dilakukan secara sempurna, karena masih terbatasnya data dan informasi yang berhasil dikumpulkan. Idealnya, akan diperoleh hasil perhitungan CPUE minimal pada salah satu jenis ikan yang dominan ditangkap di perairan Bolaang Mongondow Utara seperti ikan tuna ataupun ikan cakalang. Setelah itu, apabila memungkinkan akan dihitung potensi lestari perairan laut Bolaang Mongondow Utara dengan pendekatan perhitungan MSY. Berdasarkan hasil

perhitungan CPUE dan MSY ini nantinya akan diketahui kondisi sumberdaya perikanan di perairan laut Bolaang Mongondow Utara yang dikaitkan dengan tingkat pemanfaatan yang mempengaruhi stok ikan sumberdaya perikanan apakah telah mengalami tangkap lebih (*over fishing*) yang ditandai dengan jumlah hasil tangkapan yang cenderung mengalami penurunan. Satu-satunya informasi yang dapat digunakan untuk pendugaan CPUE di perairan Bolaang Mongondow Utara ini adalah hasil penelitian Lasabuda (2014) yang menghitung CPUE optimal di Teluk Labuan Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow yang menyarankan rejim optimal sebesar 338 trip per tahun. Namun demikian, informasi ini pun masih perlu disempurnakan algoritma pengumpulan data khususnya yang terkait dengan stok tuna.

Berdasarkan informasi umum mengenai pemanfaatan perikanan tangkap di perairan Indonesia umumnya dan perairan Laut Sulawesi, dapat diduga bahwa di perairan Bolaang Mongondow Utara berpotensi terdapatnya isu dan permasalahan diantaranya:

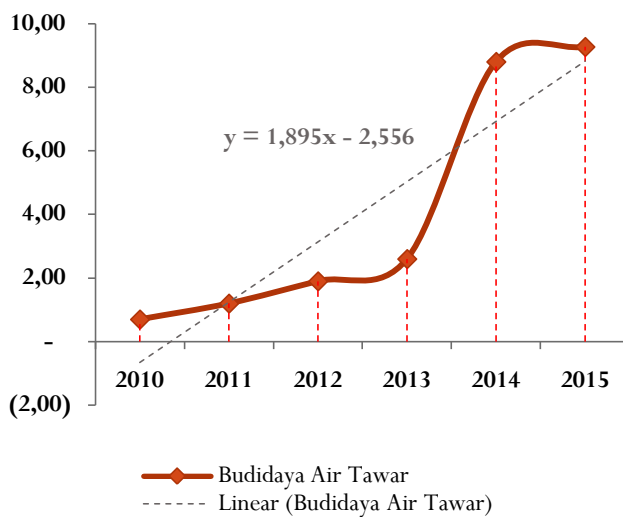
- 1) Rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat tentang nilai ekonomis ekosistem yang sangat terkait dengan keberadaan sumberdaya ikan,
- 2) Pengetahuan dan penguasaan IPTEK masih rendah,
- 3) Koordinasi antar unsur terkait masih rendah,
- 4) Pemanfaatan sumberdaya ikan tidak merata, sumberdaya ikan neritik (pelagis kecil) telah banyak dieksploitasi, di lain pihak sumberdaya ikan laut dalam (pelagis besar) belum tereksploitasi dengan optimal,
- 5) Struktur usaha yang kurang berimbang antara usaha kecil dan menengah yang mengakibatkan tekanan yang tidak seimbang antar sumberdaya ikan,
- 6) Diduga masih terdapatnya cara-cara penangkapan ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh nelayan setempat dan nelayan dari luar.

Oleh karena itu, kebijakan pengembangan dan pengelolaan Perikanan Tangkap di Bolaang Mongondow Utara harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan perikanan secara umum (pasal 3, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan) yaitu : (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, (2) meningkatkan penerimaan daerah (PAD) dan penerimaan negara (devisa), (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi protein hewani, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku

untuk industri pengolahan ikan, (8) pemamfaatan sumberdaya ikan secara optimal, (9) menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Selain pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap harus memperhatikan norma - norma internasional yang mengatur etika melakukan perikanan. Salah satu diantaranya yaitu FAO, Code of Conduct for Responsibles Fisheries (CCRF) yang mengamanahkan dilakukannya beberapa hal yang berhubungan dengan perikanan tangkap antara lain : (1) pengguna sumberdaya ikan harus menjaga sumberdaya dan lingkungannya dan wajib menggunakan cara penangkapan yang bertanggung jawab, (2) mencegah terjadinya penangkapan yang berlebihan (over fishing), (3) pemamfaatan sumberdaya perikanan harus menerapkan pendekatan kehati-hatian (precautionary measures), (4) pengembangan dan penerapan alat penangkap ikan harus diarahkan pada alat penangkap selektif dan ramah lingkungan, (5) perlindungan terhadap habitat yang kritis, (6) menjamin terlaksananya pengawasan dan kepatuhan dalam pengelolaan dan lain-lain.

B. Perikanan Budidaya

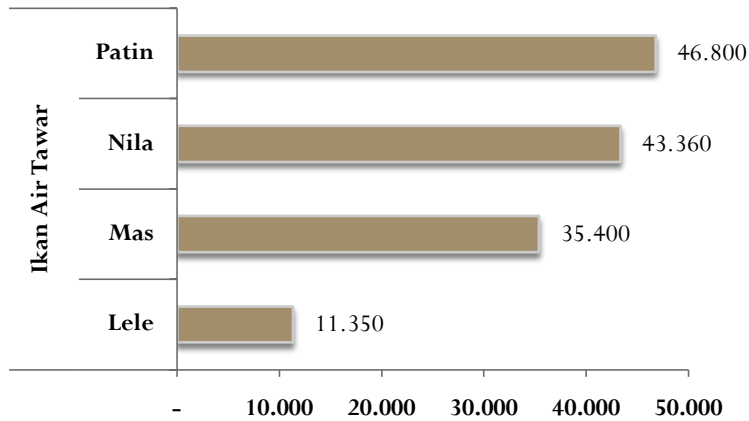


Gambar 17. Grafik Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Bolaang Mongondow Utara 2010 - 2015

Perikanan Budidaya Air Tawar

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, produksi perikanan budidaya air tawar cenderung menunjukkan peningkatan pada periode tahun 2010 sampai 2015 dengan laju peningkatan rata-rata sebesar 24,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpotensi untuk pengembangan budidaya air tawar, terutama pada kawasan yang dialiri sungai-sungai dan juga wilayah sekitar bendungan.

Hingga tahun 2015 ini produksi perikanan budidaya air tawar didominasi oleh produksi ikan patin dan ikan nila disamping ikan mas dan ikan lele. Jumlah produksi ikan patin pada tahun 2014 tercatat mencapai 46.800 kg, ikan nila 43.360 kg, dan ikan mas 35.400 kg, serta ikan lele



Gambar 18. Grafik Jenis Ikan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Bolaang Mongondow Utara

hanya 11.350 kg. Tingginya produksi ikan patin dan nila ini diperkirakan terkait dengan permintaan masyarakat terhadap jenis ikan tersebut dan juga diduga para pembudidaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terbiasa melakukan kegiatan budidaya jenis ikan ini. Selain itu, adanya program bantuan yang dilaksanakan oleh Balai Benih Air Tawar Tatelu, Sulawesi Utara

melalui program pengembangan kawasan budidaya dan bimbingan, serta pendampingan secara intensif terhadap pembudidaya, sangat mendorong pengembangan kegiatan budidaya air tawar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

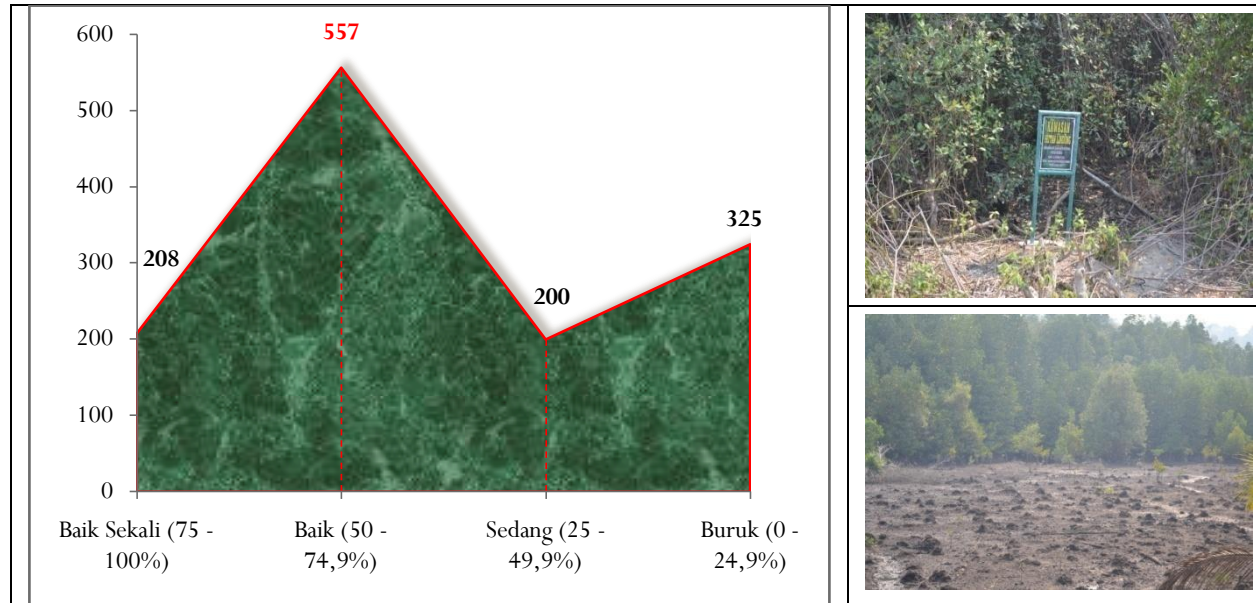
Walaupun jumlah produksinya menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, namun demikian secara umum kegiatan perikanan budidaya air tawar ini masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya, yaitu masih terbatasnya kegiatan-kegiatan pelatihan untuk para pembudidaya, dan juga penyuluh perikanan, serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme di bidang perikanan budidaya.

Perikanan Budidaya Air Payau

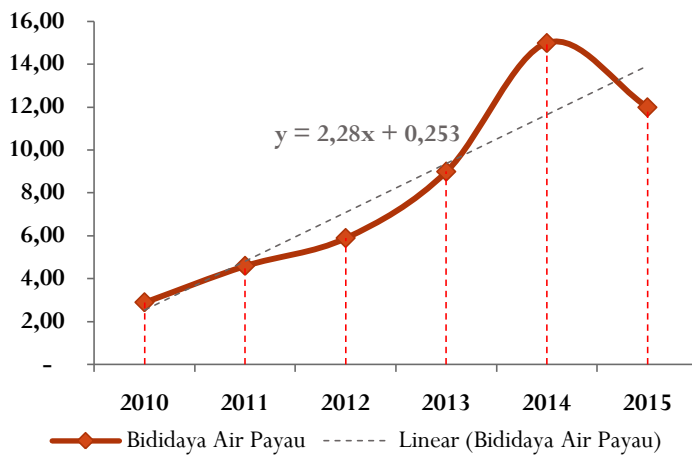
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada tahun 2015 ini luas hutan bakau diperkirakan seluas 1.290 ha yang tersebar di pesisir pantai sepanjang 174 km, dan muara-muara sungai. Namun demikian, kondisi hutan bakau ini tidak semuanya dalam kondisi baik, sebagian sudah mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia maupun karena pengaruh alam. Pengamatan pada beberapa titik lokasi ekosistem mangrove, menunjukkan bahwa:

- Masih terdapatnya perusakan mangrove untuk berbagai tujuan --- belum terindikasi frekuensi dan luasan perusakan serta tujuannya.

- Belum memperoleh pengetahuan yang cukup mengenai arti pentingnya mangrove --- belum teridentifikasi adanya pelatihan yang melibatkan masyarakat
- Belum terdapatnya data hasil ground check mengenai kondisi mangrove – belum teridentifikasi adanya studi mengenai mangrove



Gambar 19. Kondisi hutan bakau di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

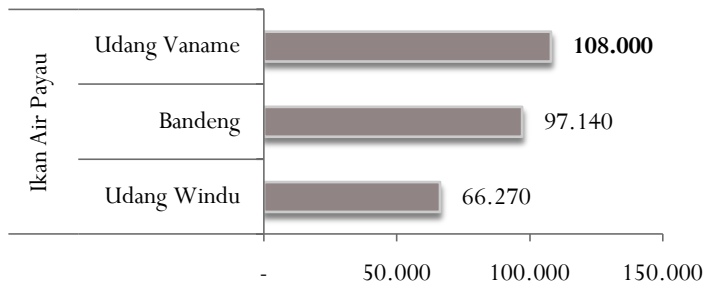


Gambar 20. Grafik Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Bolaang Mongondow Utara 2010 - 2015

Kondisi tutupan hutan bakau ini sangat terkait dengan kegiatan perikanan budidaya air payau yang kegiatannya dilaksanakan pada kawasan ekosistem bakau. Perikanan budidaya air payau yang pada umumnya menggunakan media tambak sebagai wadah budidaya apabila tidak dikelola dengan baik akan berinteraksi negatif dengan keberadaan ekosistem bakau. Berdasarkan data dari Dinas

Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan budidaya air payau pada periode 2010 – 2015 cenderung menunjukkan peningkatan sekitar 13,9% per tahun. Peningkatan produksi perikanan budidaya air payau ini diduga sebagai dampak dari program intensifikasi lahan pertambakan

sehingga mendorong peningkatan pemanfaatan lahan tambak yang ada dan ditunjang oleh pengadaan benih serta teknologi budidaya.



Gambar 21. Grafik Produksi Jenis Komoditas Perikanan Budidaya Air Payau Bolaang Mongondow Utara

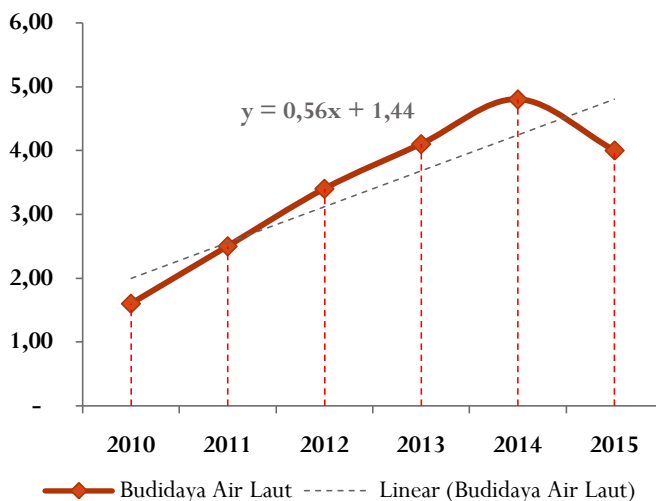
Produksi udang vaname pada tahun 2014 tercatat sebagai komoditas perikanan budidaya air payau dengan tingkat produksi yang tertinggi, yaitu 108.000 kg, lebih tinggi dibandingkan produksi bandeng (97.140 kg) dan udang windu (66,270 kg). Tingginya produksi udang vaname ini diduga sebagai pengaruh dari semakin

tingginya permintaan terhadap jenis udang ini, dan juga diduga dipengaruhi oleh teknologi budidaya yang lebih mudah dibandingkan dengan udang windu. Selain itu, pada umumnya udang vaname mempunyai tingkat kelangsungan hidup (*SR=Survival Rate*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan udang windu.

Peningkatan aktivitas tambak di kawasan ekosistem mangrove selain berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat pesisir, namun juga akan membawa dampak negatif terhadap keberadaan ekosistem mangrove yang akan mengalami penurunan luasan sejalan dengan meningkatnya pembukaan lahan pertambakan. Kondisi ini bukan tidak mungkin akan terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menjadikan komoditas perikanan sebagai salah satu komoditas unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pengembangan tambak dan budidaya air payau yang berwawasan lingkungan perlu segera diterapkan atau minimal sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan areal pertambakan di kawasan ekosistem mangrove. Melalui sosialisai dan pembinaan para petambak pemerintah daerah bekerjasama dengan pengusaha, LSM dan Perguruan Tinggi dapat menghasilkan suatu bentuk pengelolaan tambak yang baik, efisien dan ramah lingkungan.

Pengusaha tambak sebagai bagian mata rantai perekonomian perikanan bukan harus ‘dimusuhi’ karena senantiasa divonis sebagai perusak lingkungan pesisir, tetapi bagaimana caranya para petambak itu dapat mengembangkan usaha tambaknya dengan cara yang benar sehingga tidak memperparah kerusakan lingkungan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan industry perikanan udang bagi para petambak antara lain:

- Mengembangkan usaha tambak secara berkelompok (cluster pertambakan), yaitu pengembangan tambak pada suatu areal terpusat dengan system pengaturan tata kelola tambak secara bersama-sama. Salah satu keuntungan system ini selain tidak terjadinya penyebaran pembukaan tambak yang tidak terkontrol, juga bermanfaat agar petambak bisa mengendalikan musim tanam, asal usul benih yang berkualitas, prosedur pemeliharaannya, dan sangat bermanfaat bagi pengendalian serta isolasi penyakit.
- Peningkatan kemitraan antar kelompok petambak. Kemitraan ini sangat penting untuk memperkuat kebersamaan dalam mengembangkan usaha pertambakan udang. Kemitraan dapat dilakukan antar sesama pengelola tambak itu sendiri, misalnya petambak yang sudah lebih mapan dan mempunyai skala usaha yang lebih besar dapat melakukan pembinaan dan kemitraan dengan petambak pemula yang lahannya relative lebih kecil. Kemitraan juga dapat dilakukan dengan membuat atau mengembangkan koperasi yang beranggotakan petambak-petambak yang berada dalam satu kluster areal pertambakan udang. Semangat menjaga komitmen sesuai perjanjian antar petambak yang bermitra diharapkan di masa depan dapat mencetak pembudidaya tradisional untuk menjadi pengusaha yang mampu bersaing secara global dengan sentuhan teknologi dan pemberdayaan secara kelompok.
- Pihak Pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mempersiapkan bantuan kepada para petambak, baik bantuan teknis budidaya udang,



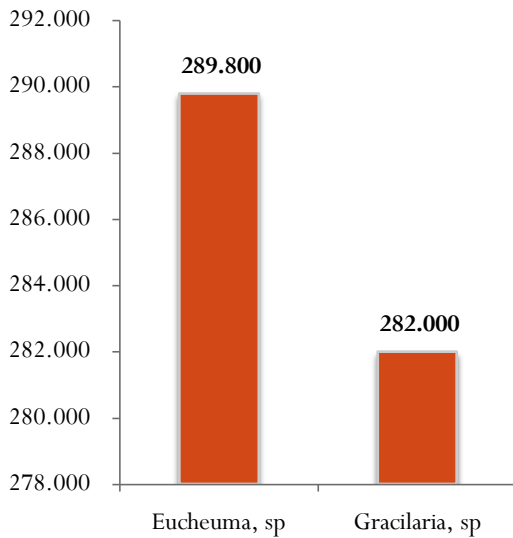
Gambar 22. Grafik Produksi Perikanan Budidaya Laut Bolaang Mongondow Utara 2010 -2015

maupun bantuan penambahan sarana pendukung produksi seperti pompa air, genset, benih udang dan juga pakan yang berkualitas. Selain itu, bantuan juga dapat diberikan dalam bentuk kampanye untuk penyadaran pengembangan tambak yang tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Perikanan Budidaya Laut

Produksi perikanan budidaya laut di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

pada periode 2010 – 2015 menunjukkan trend yang meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kenaikan produksi perikanan budidaya laut tersebut rata-rata mencapai 9,1% per tahun.



Gambar 23. Grafik Produksi Rumput Laut Bolaang Mongondow Utara

Komoditas utama yang dibudidayakan oleh masyarakat umumnya adalah komoditas rumput laut jenis *Eucheuma cottoni* atau *Kappaphycus alvarezii* dengan pertimbangan semakin luasnya pemanfaatan hasil olahan rumput laut jenis ini dalam berbagai industri sebagai bahan baku. Selain itu kebutuhan ekspor, pangsa pasar dalam negeri cukup penting karena selama ini industri pengolahan rumput laut sering mengeluh kekurangan bahan baku. Melihat peluang tersebut, pengembangan komoditas rumput laut memiliki prospek yang cerah karena memiliki nilai ekonomis yang penting dalam menunjang pembangunan perikanan baik

kaitannya dengan peningkatan ekspor non migas, penyediaan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan konsumsi dalam negeri maupun meningkatkan pendapatan pembudidaya, serta memperluas lapangan kerja.

Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, sebagai langkah awal dilakukan di perairan yang berdekatan dengan Pelabuhan Boroko, yaitu sekitar Pulau Damar. Lokasi ini secara karakteristik cukup layak untuk kegiatan budidaya rumput laut, walaupun belum dilakukan kajian mendalam mengenai tingkat kelayakannya. Observasi awal kesesuaian lokasi ini menggunakan beberapa parameter umum, seperti bentang alam yang menggambarkan tingkat keterlindungan lokasi, dan substrat dasar perairan yang dapat mengindikasikan proses kimia dan biologi yang terjadi di sekitar perairan tersebut. Hasil dari observasi ini secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut, dan kemudian, dipadukan dengan pendekatan spasial melalui Peta Rupa Bumi perairan laut Pelabuhan Boroko.

Hasil observasi pada lokasi perairan laut Pelabuhan Boroko yang berdekatan dengan Pulau Damar, diperoleh hasil skor tingkat kesesuaian (Y) 260 yang merupakan tingkat tingkat

kesesuaian yang tinggi, karena nilai skornya berada pada nilai 250 – 300, yaitu kawasan yang sangat sesuai untuk budidaya rumput laut tanpa adanya faktor pembatas yang berarti dan hanya terdapat faktor pembatas yang bersifat minor yang masih terindikasi sebagai potensi dan tidak mempengaruhi produktifitas secara nyata. Potensi tersebut diduga berasal dari peningkatan aktivitas masyarakat di daratan, yang buangnya bermuara di sekitar perairan Pelabuhan Boroko, ataupun sebagai pengaruh dari keberadaan ekosistem mangrove di sekitar perairan.. Namun demikian sejauh ini belum dilakukan kajian mendalam mengenai pengaruh yang signifikan terhadap kondisi perairan di sekitar Pelabuhan Boroko maupun Pulau Damar.

Tabel 11. Matriks Hasil Perhitungan Tingkat Kesesuaian Lahan Budidaya Rumput Laut di Lokasi Penelitian

Parameter	Bobot (%)	Skor	Perairan Pulau Damat		
			Obsv	Skor (X _n)	Nilai (Y _i)
Bentang Alam dan Dasar Perairan					
Keterlindungan					
Terlindung	60	3	√	3	180
Cukup Terlindung		2			
Terbuka		1			
Substrat Dasar Perairan					
Pasir/Pecahan Karang	40	3			
Pasir Berlumpur		2	√	2	80
Berlumpur		1			
Jumlah Bobot	100				260

Apabila secara spasial lokasi tersebut tidak menimbulkan permasalahan dengan penggunaan ruang laut lainnya, maka upaya yang dapat dilakukan di perairan ini adalah upaya yang berorientasi kepada efektifitas pemanfaatan lahan dengan inroduksi teknologi budidaya, salah satunya adalah dengan pengembangan metode budidaya vertikultur. Metode budidaya ini diharapkan dapat mengurangi resiko penurunan kualitas air permukaan karena rumput laut dipelihara secara vertikal pada kolom air. Selain itu, untuk meningkatkan daya dukung habitat lokasi budidaya rumput laut juga dapat dengan memperbaiki kondisi substrat perairan. Berdasarkan indikator kesesuaian lahan budidaya rumput laut, substrat perairan yang terdiri dari patahan karang ataupun karang hidup akan memberikan skor kelayakan yang paling tinggi.

Oleh karena itu kondisi substrat perairan akan dapat diperbaharui apabila ditumbuhkan terumbu karang di lahan tersebut melalui *artificial coralreef* atau terumbu karang buatan. Menumbuhkan terumbu karang buatan pada lokasi budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan metode transplantasi tergantung dengan kondisi substrat perairan tersebut. Apabila kondisi substrat lebih banyak bagian yang keras, atau lebih banyak patahan karang, dapat dikembangkan tranplantasi model pot atau mini. Sedangkan apabila siubstrat perairan lebih didominasi oleh lumpur, maka metode transplantasi model kubah lebih disarankan.



Gambar 24. Posisi Perairan Pelabuhan Boroko dan Karaktersistik Bentang Alam dan Substrat Dasar Perairan

C. Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Laut Bolaang Mongondow Utara

Implementasi strategi pengelolaan sumberdaya perikanan dan laut di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara nantinya dilaksanakan dengan menggali kekuatan dan kemandirian dengan pendekatan kewenangan pemerintah bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait untuk mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan industri dan usaha perikanan yang berwawasan lingkungan, serta untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam. Pengelolaan sumber daya tersebut, diharapkan dapat mengembangkan wilayah perairan Bolaang Mongondow Utara menuju pengelolaan yang adil dan lestari.

Berdasarkan hasil kajian, strategi tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga strategi utama, yaitu:

1. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Penguatan Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Berbagai hasil penelitian dan kajian, bahkan pemerintahpun sebenarnya telah mengidentifikasi keterbelakang kelompok masyarakat pesisir yang sebagian besar terdiri dari nelayan kecil, sebagai akibat dari rendahnya budaya kewirausahaan, kurangnya partisipasi dalam usaha produktif dan tersumbatnya akses permodalan. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga donor untuk mengubah kondisi ini melalui berbagai penyuluhan mengenai pentingnya membangun kelompok nelayan, mendidik nelayan untuk berkoperasi yang pada akhirnya dapat mengarahkan agar hasil tangkapan ikan serta produksi perikanan dipasarkan dengan harga yang lebih baik.

Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir sebenarnya sudah mulai diinisiasi sejak lama. Salah satu upaya besar pemerintah dalam mendorong penguatan kelembagaan masyarakat pesisir adalah dengan menginisiasi pembentukan Lembaga Mikro Ekonomi yang merupakan cikal bakal pembentukan Koperasi Nelayan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang mulai dilaksanakan sejak sekitar tahun 2003 yang lalu. Ide pembentukan lembaga ini merupakan langkah yang tepat, sehingga masyarakat nelayan mempunyai wadah untuk bermitra satu dengan yang lainnya dan –tentunya- sebagai sarana untuk mendapatkan kredit usaha. Namun demikian, sangat disayangkan, pada perkembangan selanjutnya kelembagaan nelayan yang sudah menjadi Koperasi ini di beberapa daerah justru menuai permasalahan. Kesalahan pengelolaan koperasi dan keluarnya roda kegiatan koperasi dari semangat kebersamaan menjadi penghambat berkembangnya lembaga tersebut bahkan ada yang hingga menuju ke jurang kehancuran.

Semangat untuk membantuk kelompok nelayan karena didasari oleh persamaan nasib, persamaan status social dan persamaan cita-cita untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik merupakan bahan bakar utama dalam pembentukan kelembagaan masyarakat yang kokoh. Oleh karena itu, terkait dengan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir khususnya di kawasan Bolaang Mongondow Utara, maka perlu dilakukan langkah-langkah penting, diantaranya:

- Identifikasi dan pemetaan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir di perairan Bolaang Mongondow Utara, terutama kelembagaan masyarakat yang merupakan pembentukan dari berbagai program pemerintah maupun lembaga donor lainnya.
- Mengevaluasi status dan permasalahan pada masing-masing kelembagaan masyarakat pesisir.
- Melakukan advokasi bagi lembaga masyarakat yang masih mempunyai peluang untuk kembali dihidupkan dan memberikan berbagai bantuan teknis yang diperlukan.

Diversifikasi Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi daerah dan disesuaikan dengan kemampuan teknis masyarakat pesisir merupakan kegiatan ekonomi yang berpeluang untuk terus tumbuh dan berkembang. Namun dalam pelaksanaannya, usaha yang dikembangkan secara swadaya dan mandiri tersebut masih banyak menemukan kendala teknis, sehingga belum dapat menjadi tumpuan hidup masyarakat pesisir. Upaya untuk mengenalkan mata pencaharian alternatifpun terus dikembangkan. Melalui berbagai program pembinaan dan pelatihan untuk mendorong kegiatan ekonomi sebagai mata pencaharian alternatifpun terus didorong oleh pemerintah dan berbagai lembaga non pemerintah serta lembaga donor. Namun demikian, hingga saat ini belum terdengar hasil yang luar biasa dari kegiatan ekonomi masyarakat yang benar-benar dapat diandalkan sehingga mampu menggeser atau minimal menandingi mata pencaharian utama sebagai nelayan, yaitu melakukan kegiatan penangkapan ikan yang hasilnya tidak menentu dan sangat tergantung kepada kondisi alam.

Pendekatan agribisnis perikanan mungkin dapat menjadi salah satu alternative untuk menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. Apapun bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dikembangkan, misalnya pengolahan ikan dan budidaya, maka mata rantai kegiatan agribisnis ini harus diperhatikan. Tersedianya bahan baku, tersedianya sumberdaya manusia, dan tersedianya modal usaha serta ditunjang oleh kepastian pemasaran yang kontinu, merupakan syarat minimal usaha ekonomi itu dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mendorong terciptanya diversifikasi usaha ekonomi masyarakat pesisir maka mungkin perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Identifikasi dan evaluasi keberadaan usaha ekonomi masyarakat terutama yang terkait dengan kegiatan utama masyarakat, yaitu perikanan, seperti pengolahan dan budidaya ikan.

- Apabila teridentifikasi adanya kendala dalam menjalankan usahanya tersebut, perlu dilakukan bantuan teknis sesuai dengan masalah yang dihadapinya agar usahanya tetap dapat berjalan.
- Perguruan Tinggi dapat menawarkan pembinaan usaha ekonomi masyarakat dalam hal peningkatan kemampuan pengelolaan, pemasaran dan peningkatan teknologi agar usaha tersebut dapat berjalan lebih efeisen.
- Pemerintah dapat membantu dalam hal mempermudah pemberian izin usaha bagi usaha ekonomi masyarakat yang sudah berjalan dengan baik, bahkan apabila dimungkinkan untuk diberikan hak paten terhadap produk yang telah dihasilkan. Izin usaha dan hak paten ini perlu bagi masyarakat sebagai legalitas dan penguatan untuk proses pengembangan usaha di masa depan.

Penguatan Permodalan Usaha

Permasalahan modal usaha merupakan masalah klasik yang selalu ditemukan dalam membahas pemberdayaan ekonomi dan usaha masyarakat pesisir. Ketidakmampuan masyarakat mengakses sumber-sumber permodalan dan mengelola modal tersebut dengan baik adalah hal yang lazim berlaku di kalangan masyarakat pesisir. Pemerintah sebenarnya sudah banyak berupaya untuk memikirkan, menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong penguatan modal usaha bagi masyarakat pesisir. Misalnya melalui program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) telah diinisiasi system permodalan usaha mayarakat yang melibatkan lembaga utama yaitu, Koperasi dan Perbankan. Secara garis besar, mekanisme penguatan modal usaha yang diterapkan adalah pemerintah (melalui instansi teknis Kementrian Kelautan dan Perikanan) menyalurkan dana hibah kepada lembaga perbankan sebagai agunan kredit (*cash colletaral*). Dana tersebut selanjutnya ditransfer ke rekening koperasi dalam bentuk Dana Penguatan Modal (DPM) Koperasi Nelayansesuai dengan jumlah pengajuan dana usulan usaha dari anggota-anggotanya.

Sistem pendanaan dan penguatan modal usaha masyarakat yang diterapkan melalui program PEMP ini sebenarnya sudah tepat, karena sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Pasal 60 (1) Undang-undang No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil melalui (a)

Penyediaan Skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga rendah dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (b). Penumbuh-kembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya-ikan kecil dan koperasi perikanan.

- Pasal 21 Undang-undang No 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat harus menyediakan pembiayaan yang meliputi antara lain kredit perbankan dan hibah.

Peraturan perundang-undangan ini mensyaratkan pemberian bantuan kepada nelayan kecil baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman kredit perbankan dengan bunga yang rendah dan cara yang mudah melalui koperasi mereka (nelayan). Apabila dicermati lebih jauh, mekanisme pendanaan untuk masyarakat kecil ini sebenarnya belum terlalu berpihak kepada pemberdayaan masyarakat. Dana hibah dari pemerintah yang ditanam di lembaga bank pada hakekatnya adalah ‘dana segar’ yang diperoleh bank tanpa harus mengeluarkan bunga terhadap dana tersebut. Sedangkan apabila dana tersebut dipinjamkan kepada koperasi, bank membebaskan bunga pinjaman (walaupun dalam tingkat suku bunga yang rendah). Selanjutnya koperasi pun dalam memberikan pinjaman kepada anggotanya yang merupakan kelompok masyarakat nelayan ‘mau tidak mau’ harus membebaskan bunga, dan tetap mengedepankan kehati-hatian dalam proses pemberian modal pinjaman kepada anggotanya.

Dalam pelaksanaannya, tidak semuanya mekanisme pendanaan ini berjalan dengan baik. Tidak sedikit koperasi yang menghadapi masalah dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Berbagai hambatan masalah muncul dimulai dari proses pengajuan pinjaman dari kelompok masyarakat, proses pembayaran hingga adanya ketidak sesuaian pengembalian dana dari koperasi kepada bank. Dalam beberapa kasus, pihak lembaga perbankan selalu lebih diuntungkan, karena terdapat ketentuan, apabila pihak koperasi tidak membayar setoran pinjaman selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pihak bank dapat mencairkan dana hibah yang merupakan dana jaminan dari pemerintah yang terdapat di bank tersebut. Di pihak lain, kondisi ini merupakan permasalahan besar pada koperasi dan anggotanya yang secara bertahap mulai ‘kehilangan kemampuan’ untuk mengembalikan dana pinjaman kepada perbankan, Hingga akhirnya akan berujung kepada permasalahan yang semakin rumit, serta tidak jarang sampai berurusan dengan hukum dalam proses penyelesaiannya.

Belajar dari salah satu mekanisme pendanaan untuk penguatan modal usaha masyarakat tersebut, maka mungkin selanjutnya dapat dikembangkan mekanisme penguatan modal masyarakat dengan beberapa penyesuaian, yaitu:

- **Koperasi Kelompok Nelayan.** Lembaga ini tetap dipertahankan sebagai titik sentuh dimulainya penguatan modal masyarakat, karena lembaga inilah satu-satunya yang mempunyai badan hukum dan mempunyai potensi untuk berkembang. Namun demikian, dalam mekanisme penguatan modal kedepan sangat perlu dicermati dan digaris bawahi mengenai kondisi dari koperasi tersebut. Identifikasi dan evaluasi mengenai manajemen koperasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memulai pelaksanaan penguatan modal masyarakat. Harus dibuat indikator, bahwa hanya koperasi yang mandiri dan swadaya (bukan dibentuk secara ‘dadakan’ karena adanya proyek atau program pemerintah), sehat secara manajerial, serta koperasi yang mempunyai potensi untuk berkembang saja yang dipersiapkan untuk dibantu penguatan modalnya.
- **Sumber Dana.** Sumber dana yang digunakan untuk penguatan modal koperasi bukan merupakan dana hibah yang dititip di lembaga perbankan, sehingga koperasi harus membayar bunga pada saat pengembalian dana tersebut ke bank, akan tetapi dana yang digunakan adalah penyertaan modal dari pemerintah ataupun swasta di dalam koperasi. Penyertaan modal dari pemerintah dapat bersumber dari dana-dana program pemberdayaan masyarakat, baik di tingkat kabupaten, provinsi atau nasional. Sedangkan dana yang swasta dapat berasal dari dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan penyisihan keuntungan perusahaan yang merupakan kontribusi perusahaan dalam ikut bertanggungjawab terhadap kondisi social masyarakat di sekitarnya.
- **Mekanisme Penyaluran Modal.** Masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang tercatat sebagai anggota koperasi berhak untuk mengajukan pinjaman dana untuk penguatan modal dan pengembangan usahanya. Proses pengajuan hingga pencairan dana pinjaman diatur dalam aturan koperasi dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan saling menguntungkan satu dengan yang lain, serta bersifat berkelanjutan. Perguruan Tinggi dan LSM dapat dilibatkan secara langsung dalam mempersiapkan mekanisme pendanaan ini dan menjaga agar penguatan modal tersebut efektif.

2. Pengembangan Industri Perikanan

Tujuan utama pengembangan industri perikanan ini adalah untuk memacu produksi, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan. Pembangunan industri perikanan, sesuai dengan karakteristik sumberdaya perikanan Indonesia pada umumnya, berbasis pada ikan banyak jenis (*multi-species*) dengan mempertimbangkan aspek keragaman sumberdaya ikan. Namun agar supaya terdapat efisiensi dalam pelaksanaannya maka pengembangan industri perikanan sebaiknya difokuskan pada beberapa komoditas utama atau unggulan, misalnya (1) udang, (2) tuna, dan (3) rumput laut. Pengembangan industri perikanan ini juga sebaiknya berbasiskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi kepada para pelaku industri termasuk mengembangkan wirausaha mandiri lewat strategi industrialisasi kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan.

Pengembangan Industri Udang

Udang merupakan komoditas yang dihasilkan melalui kegiatan budidaya dan penangkapan. Peran kegiatan budidaya akan semakin besar, sementara kegiatan penangkapan akan semakin berkurang. Perusahaan yang terlibat adalah perusahaan skala kecil (rakyat), menengah, besar (industri). Pasar utama komoditas udang adalah pasar ekspor. Dengan demikian, pengembangan industri perikanan udang adalah pengembangan produksi, pengolahan, dan pemasaran melalui pelibatan usaha skala rakyat. Pengelolaan tambak-tambak yang dijadikan lahan pemeliharaan udang harus mendapat perhatian utama, karena keberadaan tambak ini seringkali dikaitkan dengan kerusakan lingkungan atau ekosistem pesisir. Melalui sosialisasi dan pembinaan para petambak pemerintah daerah bekerjasama dengan pengusaha, LSM dan Perguruan Tinggi dapat menghasilkan suatu bentuk pengelolaan tambak yang baik, efisien dan ramah lingkungan. Pengusaha tambak sebagai bagian mata rantai perekonomian perikanan bukan harus 'dimusuhi' karena senantiasa divonis sebagai perusak lingkungan pesisir, tetapi bagaimana caranya para petambak itu dapat mengembangkan usaha tambaknya dengan cara yang benar sehingga tidak memperparah kerusakan lingkungan.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan industri perikanan udang bagi para petambak antara lain:

- Mengembangkan usaha tambak secara berkelompok (cluster pertambakan), yaitu pengembangan tambak pada suatu areal terpusat dengan system pengaturan tata kelola

tambak secara bersama-sama. Salah satu keuntungan system ini selain tidak terjadinya penyebaran pembukaan tambak yang tidak terkontrol, juga bermanfaat agar petambak bisa mengendalikan musim tanam, asal usul benih yang berkualitas, prosedur pemeliharannya, dan sangat bermanfaat bagi pengendalian serta isolasi penyakit.

- Peningkatan kemitraan antar kelompok petambak. Kemitraan ini sangat penting untuk memperkuat kebersamaan dalam mengembangkan usaha pertambakan udang. Kemitraan dapat dilakukan antar sesama pengelola tambak itu sendiri, misalnya petambak yang sudah lebih mapan dan mempunyai skala usaha yang lebih besar dapat melakukan pembinaan dan kemitraan dengan petambak pemula yang lahannya relative lebih kecil. Kemitraan juga dapat dilakukan dengan membuat atau mengembangkan koperasi yang beranggotakan petambak-petambak yang berada dalam satu kluster areal pertambakan udang. Semangat menjaga komitmen sesuai perjanjian antar petambak yang bermitra diharapkan di masa depan dapat mencetak pembudidaya tradisional untuk menjadi pengusaha yang mampu bersaing secara global dengan sentuhan teknologi dan pemberdayaan secara kelompok.
- Pihak Pemerintah, LSM dan Perguruan Tinggi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mempersiapkan bantuan kepada para petambak, baik bantuan teknis budidaya udang, maupun bantuan penambahan sarana pendukung produksi seperti pompa air, genset, benih udang dan juga pakan yang berkualitas. Selain itu, bantuan juga dapat diberikan dalam bentuk kampanye untuk penyadaran pengembangan tambak yang tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pengembangan Industri Tuna

Penangkapan ikan tuna (termasuk ikan cakalang dan tongkol) dilakukan baik oleh nelayan tradisional maupun perusahaan perikanan dalam skala besar. Tuna ditujukan untuk pasar ekspor dalam bentuk segar, beku, dan kaleng. Sebagian kecil produksi tuna untuk pasar domestik. Pengembangan industry tuna diarahkan pada peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah melalui proses pengolahan, dan pengembangan pasar ekspor.

Sejalan dengan pengembangan industri tuna, maka perlu juga didorong pengembangan berbagai industry pendukung dan pengembangan sarana yang merupakan mata rantai dari pengembangan industri ini, yaitu:

- **Pengembangan Armada Penangkapan Ikan.**Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi dan pengusaha armada perikanan serta masyarakat dapat secara langsung mengidentifikasi dan mempersiapkan strategi pengembangan armada penangkapan ikan termasuk penentuan wilayah penangkapan. Hal ini perlu agar kegiatan penangkapan ikan dapat berjalan secara lebih efektif, dan menekan potensi konflik horizontal antar nelayan dan pengusaha.
- **Pengembangan Pabrik Es, Cold Storage dan Industri Pengolahan Ikan.**Peningkatan efisiensi dan fungsi dari pabrik serta cold storage juga penting untuk dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan industry perikanan tangkap ini. Keterkaitan industry ini dengan kegiatan penangkapan ikan saling terkait, karena saling mendukung terutama dalam hal menjaga kesinambungan bahan baku dan juga menjaga kualitas hasil tangkapan ikan. Pengolahan ikan sangat penting karena ikan merupakan komoditi yang tidak tahan lama atau mudah mengalami pembusukan. Untuk itu keberadaan industri perikanan yang dapat mengolah ikan menjadi suatu produk setengah jadi atau produk jadi yang siap dikonsumsi oleh konsumen.Kolaborasi analisis antara Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi dan pengusaha armada perikanan serta masyarakat dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih baik mengenai pola pengembangan Pabrik Es dan Cold storage, terutama yang terkait dalam hal design, dan kapasitasnya.
- **Pengembangan Fungsi dan Sarana TPI.**Tempat Pelelangan Ikan (TPI) seyogyanya dapat berfungsi sebagai ‘pasar’ yang efektif bagi nelayan dalam menjual hasil tangkapannya. Kemitraan antara pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan, Nelayan dan Pengusaha perlu dipererat dan dikembangkan untuk menumbuhkan fungsi TPI menjadi lebih baik, tentunya dengan dukungan perbaikan dan penambahan sarana TPI yang diperlukan.

Pengembangan Industri Rumput Laut

Rumput laut merupakan komoditas yang umumnya dihasilkan melalui kegiatan budidaya. Produksi dilakukan sebagian besar oleh nelayan kecil. Sejauh ini komoditas yang dihasilkan dan diekspor adalah dalam bentuk kering atau diolah menjadi produk yang merupakan bahan baku industri. Sebagian besar pasar rumput laut adalah untuk ekspor. Pengembangan industri rumput laut ditujukan pada peningkatan produksi oleh rakyat, peningkatan nilai tambah oleh industri

pengolahan dalam negeri, serta peningkatan pasar ekspor. Strategi pengembangan industry rumput laut yang dapat dikembangkan antara lain:

- **Pengembangan cluster rumput laut,** merupakan konsep pengembangan terpadu komoditas rumput laut mirip Pengembangan Industri Tambak Udang, yaitu pengelompokan pembudidaya rumput laut pada kawasan terpilih, dan pengelolannya dengan mekanisme kerjasama kelompok pembudidaya. Hal ini untuk memudahkan proses penyediaan kebun bibit dan teknologi produksi, serta memudahkan dalam hal pengelolaan pasca panen hingga pengolahan. Pemerintah dengan didukung oleh Perguruan Tinggi, LSM dan Masyarakat Pembudidaya dapat menentukan dan mengembangkan kluster rumput laut serta bantuan teknis pelaksanaan budidayanya.
- **Unit Usaha Pembibitan Rumput Laut.** Usaha pembibitan rumput laut merupakan jenis usaha yang belum berkembang pada lokasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan pembudidaya melakukan panen total dalam setiap budidaya rumput laut. Saat ini usaha pembibitan rumput laut tersebut skalanya sangat terbatas dan belum berkembang. Sebagai bagian dari mata rantai pengembangan industry rumput laut, sebenarnya prospek usaha ini kedepan cukup baik, jika pembudidaya rumput laut mulai menggunakan bibit hasil budidaya. Hal ini juga disebabkan, karena kurangnya sosialisasi tentang pentingnya penggunaan bibit hasil budidaya.
- **Pengembangan Pabrik Pengolahan Rumput Laut,** bertujuan untuk lebih memperkuat sektor hilir sehingga dapat mempertahankan kualitas rumput laut dan lebih menjamin kesinambungan pemasaran hasil produksi rumput laut.

3. Pengembangan Kawasan Konservasi Laut Daerah dan Ekowisata

Aktifitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan diduga kuat menjadi faktor penyebab timbulnya kerusakan ekosistem sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut. Kerusakan ini pada umumnya disebabkan oleh pengelolaan eksploitasi sumberdaya yang tidak ramah lingkungan seperti ekspansi pembukaan lahan tambak, pembangunan sarana wisata pantai, penggunaan bahan kimia beracun (*potasium sianida*), illegal fishing dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pengelolaan lingkungan dan konservasi merupakan langkah yang penting dan strategis.

Konservasi sumberdaya pesisir dan laut merupakan bagian penting dari keberlanjutan sumberdaya perikanan (*fisheries sustainability*) dan keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) masyarakat pesisir. Salah satu bentuk upayanya adalah perlindungan sumberdaya alam yang dapat dilakukan melalui konservasi dengan cara menyisihkan lokasi-lokasi yang memiliki potensi keanekaragaman jenis biota laut, gejala alam dan keunikan, serta ekosistemnya menjadi Kawasan Konservasi Laut (KKL) yang pada dasarnya merupakan gerbang terakhir perlindungan dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya kelautan dan ekosistemnya. KKL dapat dikembangkan sejalan dengan pengembangan kegiatan ekowisata daerah yang berbasis pada ekosistem. Beberapa hal strategis yang perlu mendapat perhatian dalam Pengembangan KKL ini antara lain:

- **Aspek Biofisik.** Sumberdaya alam pesisir merupakan penggabungan dari berbagai ekosistem yang saling berinteraksi satu dengan yang lain. Kondisi biofisik dari ekosistem yang terdapat di dalam KKL sangat menentukan arah dan kebijakan pengembangan KKL yang akan diterapkan. Apabila wilayah yang akan dijadikan KKL tersebut kondisi biofisiknya sudah mengalami kerusakan berat, maka pendekatan rehabilitasi ekosistem lebih mendapat perhatian sebagai upaya awal untuk mengembalikan fungsi biofisik ekosistem tersebut. Sedangkan apabila wilayah KKL masih dalam kondisi yang baik secara biofisik, maka penentuan zonasi pada wilayah tersebut lebih diprioritaskan, misalnya penentuan zonasi inti, penyangga dan pemanfaatan terbatas dan umum.
- **Aspek Sosial-ekonomi.** Pengembangan KKL harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Wilayah KKL ini mungkin sebelumnya dengan mudah dapat diakses dan dapat dieksploitasi oleh masyarakat, namun setelah ditetapkan sebagai KKL, akses tersebut menjadi terbatas atau tertutup sama sekali. Hal ini perlu mendapat perhatian terutama dalam hal pelibatan masyarakat secara langsung dimulai dari perencanaan, pengaturan, implementasi KKL dan pengawasan yang dapat dilakukan terhadap KKL tersebut. Selain itu, KKL juga sebaiknya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga masyarakat lebih mempunyai motivasi untuk secara bersama-sama menjaga kelangsungan KKL.
- **Aspek Pengaturan dan Kelembagaan.** Untuk menunjang keberlanjutan KKL, maka perlu disusun peraturan sebagai mekanisme pengaturan yang diberlakukan di KKL. Selain itu kelembagaan resmi yang berfungsi sebagai pengelola KKL juga perlu dibentuk

sehingga KKL tersebut mempunyai kerangka kerja dan pembagian tugas yang jelas dan terencana dengan baik. Aspek kelembagaan ini juga berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah mengenai pengembangan KKL dan implementasinya di lapangan.

4.2.3 Aspek Pertanian dan Peternakan

A. Aspek Pertanian

Gambaran Umum

Kondisi topografi tanah di Bolaang Mongondow Utara datar sampai berombak (25%), berombak sampai berbukit (40%) dengan keadaan tanah yang tergolong subur. Secara umum kondisi topografi tanah di kecamatan Sangkup rata dan yang berbukit di desa Sidodadi hingga 170 m dpl dan desa Pangkusa hingga 50 m dpl. Di kecamatan Bintauna pada umumnya rata dan yang berbukit hanya di desa Mome dan Huntuk s/d 8 m dpl. Di kecamatan Bolangitang Timur juga sebagian besar dataran kecuali desa Mokodidek berbukit ± 60 m dpl dan desa Biontong ± 18 m dpl. Wilayah berbukit juga terdapat di desa Solo dan Komus Dua kecamatan Kaidipang ± 15 m dpl, dan desa-desa Komus satu dan Batu tajam kecamatan Pinogaluman ± 25 m dpl diatas permukaan laut.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih banyak dipengaruhi oleh iklim tropis dengan suhu sekitar 20°C - 32°C , curah hujan rata-rata 500 mm/tahun. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 0° - $30'$ 1° - $0'$ Lintang Utara dan 123° - 124° Bujur Timur. Luas wilayah 185.686 ha (1.856,86 km²) \pm 12.3% dari luas Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilalui oleh jalan Trans Sulawesi di pesisir pantai Utara kabupaten Bolaang Mongondow dimana jalan ini berfungsi sebagai jalur lalu lintas barang dan orang dari dan ke daerah Minahasa, Manado dan Bitung disebelah timur dan Provinsi Gorontalo disebelah Barat .

Berdasarkan hasil analisis data curah hujan yang tersebar di wilayah wilayah Bolaang Mongondow Utara, tipe iklim wilayah bervariasi mulai dari bertipe A hingga D (klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson) yakni daerah basah dengan vegetasi masih hutan hujan tropika hingga agak kering. Klasifikasi ini berdasarkan nilai Q yang berkisar antara 12,5% s/d 100%. Rata-rata curah hujan bulanan di wilayah DAS berdasarkan data dari stasiun curah hujan yang mewakili wilayah yaitu stasiun Pangkusa mewakili daerah hulu dan stasiun Buko mewakili wilayah hilir. Berdasarkan data tersebut di atas curah hujan maksimum bulanan di wilayah hulu berkisar antara

39 mm - 126 mm. Sedangkan di wilayah hilir 67 mm - 160 mm. Curah hujan tahunan berkisar 1185 - 1470 mm/tahun di wilayah hulu sedangkan di wilayah hilir berkisar antara 1185 - 2337 mm/tahun. Dari data tersebut terlihat kecenderungan bahwa curah hujan di wilayah hilir lebih tinggi di bandingkan dengan daerah hulu. Sedangkan, rata-rata temperatur udara bulanan berkisar antara 28°C - 30°C dengan suhu udara rata-rata bulanan 29°C (BPP- Bintauna). Suhu terendah terjadi pada bulan November/Desember dan tertinggi Bulan Juni/Juli. Secara umum pola sebaran suhu udara mengikuti pola penyebaran lama penyinaran matahari. Makin lama penyinaran, suhu udara cenderung meningkat.

Kelembaban relatif merupakan ukuran kandungan uap air di udara dibandingkan dengan kandungan uap air maksimum (keadaan jenuh) pada suhu tertentu. Keadaan ini sangat berhubungan dengan keadaan curah hujan, keawanan, suhu udara dan jumlah kandungan air. Kelembaban relatif udara relatif tinggi. Rata-rata kelembaban relatif bulanan adalah 84.4%. Kelembaban relatif udara terendah terjadi pada Bulan Agustus (80%) dan tertinggi pada bulan Desember yaitu 88.3% (BPP Bintauna). Kelembapan udara berkisar antara 80 -93%. Keadaan ini berhubungan dengan keadaan unsur iklim lainnya seperti curah hujan, prosentase keawanan, suhu udara, dan kandungan air. Secara umum lokasi studi termasuk daerah relatif lembab dengan kandungan uap air yang relatif tinggi.

PDRB Sektor Pertanian

Besaran PDRB menurut sektor usaha menggambarkan nilai produk barang dan jasa yang tercipta sebagai hasil dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah tertentu. PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dihitung dengan menggunakan pendekatan produksi menurut lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berjumlah Rp. 892,236 Milyar Rupiah sedangkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2011 sebesar Rp. 416,865 Milyar Rupiah. Ada 3 (tiga) leading sektor yang berkontribusi penuh terhadap nilai – nilai tersebut antara lain :

1. Sektor Primer (Pertanian; Pertambangan dan Penggalian);
2. Sektor Sekunder (Industri Pengolahan; Listrik, Gas Dan Air Bersih; Bangunan);
3. Sektor Tersier (Perdagangan; Hotel Dan Restoran; Pengangkutan Dan Komunikasi; Keuangan; Persewaan Dan Jasa Perusahaan; Jasa – Jasa).

Berdasarkan nilai dan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

NO	SEKTOR	TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011	
		(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%
1.	PERTANIAN	174.593	36	202.605	36	227.288	35	260.448	34	302.843	34
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	37.913	8	42.346	7	47.463	7	53.219	7	59.071	7
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	18.554	4	18.969	3	19.390	3	19.964	3	20.596	2
4.	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	1.266	0	1.318	0	1.371	0	1.440	0	1.511	0
5.	BANGUNAN	56.109	12	64.327	11	74.225	11	86.292	11	102.489	11
6.	PERDAG. HOTEL & RESTORAN	43.775	9	47.492	8	51.351	8	56.939	8	64.201	7
7.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	10.187	2	10.618	2	11.066	2	12.061	2	13.154	1
8.	KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	14.708	3	15.786	3	16.941	3	18.138	2	19.345	2
9.	JASA-JASA	130.545	27	161.590	29	202.616	31	250.625	33	309.026	35
	PDRB	487.649	100	565.051	100	651.710	100	759.124	100	892.236	100

Sumber : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2011.

Berdasarkan data Struktur perekonomian tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat tergantung kepada sektor pertanian. Keadaan tahun 2007 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 36 % atas senilai 174, 593 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2011 kontribusi sektor pertanian mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 34 % atau senilai 302, 843 milyar rupiah, secara persentasi terlihat menurun akan tetapi berdasarkan nilai rupiah, kontribusi sektor pertanian dibandingkan dengan sektor lainnya mengalami kenaikan yang signifikan.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama 3 tahun terakhir atas dasar harga konstan, dimana angka PDRB pada tahun 2007 sebesar 121, 835 milyar rupiah sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 143, 745 milyar rupiah. Sektor pertanian yang menjadi penyumbang terbesar dalam struktur perekonomian, juga memiliki angka LQ (Location Quotien) PDRB yang cukup bagus terhadap provinsi Sulawesi Utara, yakni dengan angka 1.93 pada tahun 2008 dan 1.94 pada tahun 2009. Selain itu sektor jasa-jasa ternyata juga memiliki daya saing yang cukup

baik, dengan LQ sebesar 1.61 pada tahun 2009. Sektor lain yang memiliki angka LQ yang baik adalah sektor pertambangan dan penggalian yakni dengan angka 1.96 pada tahun 2009. Hanya tiga sektor tersebut (pertanian, pertambangan dan jasa-jasa) yang memiliki angka LQ lebih dari 1, yang berarti memiliki potensi keunggulan komparatif (ekspor) di tingkat provinsi.

Berdasarkan nilai dan kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	SEKTOR	TAHUN 2007		TAHUN 2008		TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011	
		(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%	(RP)	%
1.	PERTANIAN	121.835	39	127.948	38	131.235	37	137.011	35	143.745	34
2.	PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	25.833	8	28.020	8	30.271	8	32.531	8	34.561	8
3.	INDUSTRI PENGOLAHAN	10.651	3	10.760	3	10.871	3	10.994	3	11.135	3
4.	LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	937	0	955	0	974	0	995	0	1.016	0
5.	BANGUNAN	33.748	11	36.671	11	40.213	11	44.162	11	48.990	12
6.	PERDAG. HOTEL & RESTORAN	28.457	9	29.081	9	29.717	8	30.677	8	32.173	8
7.	PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	9.066	3	9.349	3	9.640	3	10.063	3	10.504	3
8.	KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	9.902	3	10.393	3	10.910	3	11.404	3	11.858	3
9.	JASA-JASA	75.178	24	82.954	25	95.263	27	108.615	28	122.884	29
PDRB		315.608	100	336.131	100	359.094	100	386.453	100	416.866	100

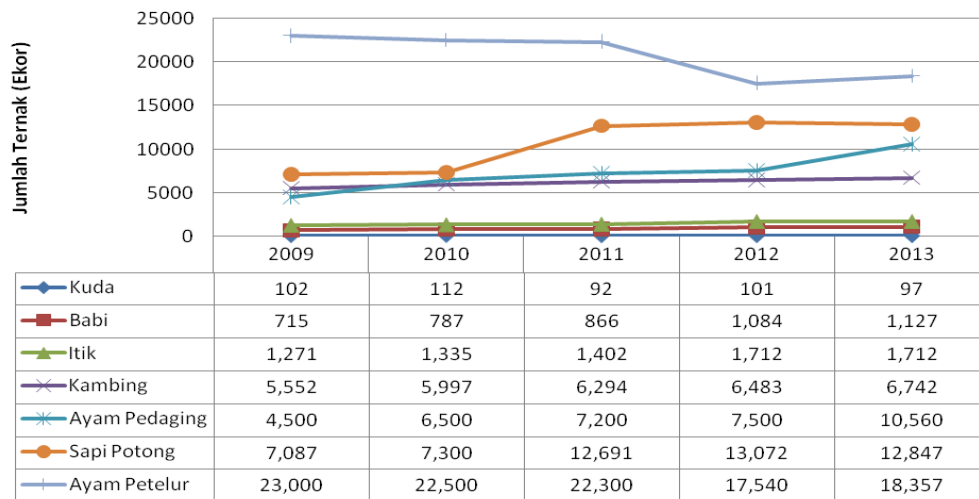
Sumber : BPS Bolaang Mongondow Utara, 2011

Gambaran struktur diatas menunjukkan bahwa kontribusi sektor tersier cukup signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan sebagian besar berasal dari sub sektor pemerintahan. Berdasarkan pentingnya angka kontribusi sektor primer dan tersier yang menopang pertumbuhan perekonomian daerah, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat tergantung kepada sumber daya alam yang melimpah dan bantuan dana dari pemerintah. Selain itu, dalam kelompok sektor pertanian, sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perkebunan menempati posisi terbesar dalam prosentasi kontribusi PDRB pada tahun 2009, masing-masing sebesar 13.86% dan 11.33%.

B. Aspek Peternakan

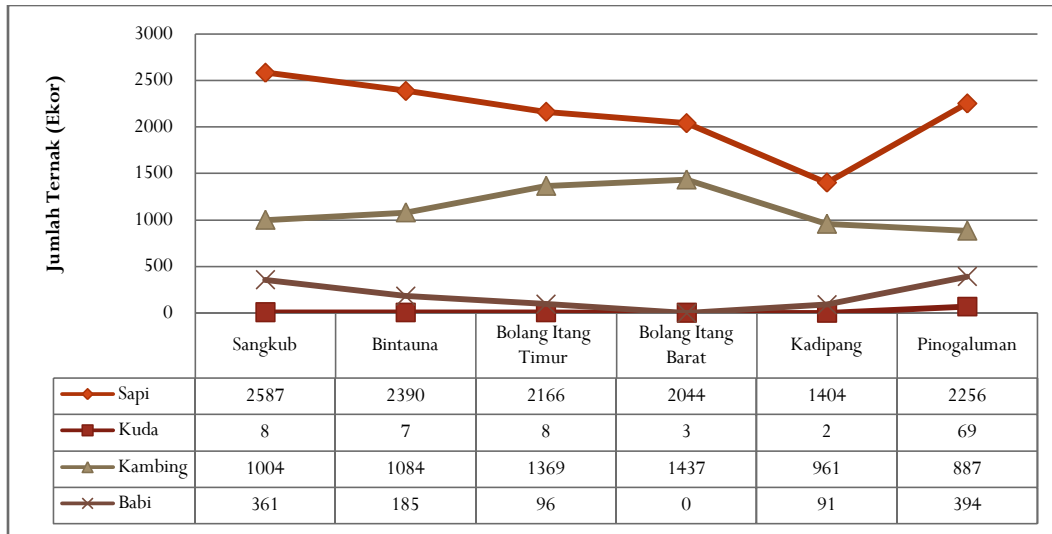
Gambaran Umum

Sektor Peternakan yang terbesar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah peternakan Ayam Petelur yang pada tahun 2013 berjumlah 18.357 Ekor, jumlah tersebut mengalami penurunan jika di bandingkan pada tahun 2011, 2010 dan 2009 yang pada tahun-tahun tersebut sempat mencapai 22.300 ekor, 25.500 ekor dan 23.000 ekor. Rata-rata di setiap tahunnya sektor peternakan mengalami peningkatan populasi kecuali di beberapa hewan yang sempat mengalami penurunan, seperti sapi potong dan kuda.



Grafik 25. Komoditi Peternakan Berdasarkan Luas Area Produksi dan Produktifitas (*Sumber :BPS Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2014*)

Kecamatan Sangkub memiliki jumlah sapi potong terbanyak yaitu 2.587 ekor. Kecamatan pinogaluman memiliki jumlah babi terbanyak yaitu 394 ekor dan jumlah kuda terbanyak yaitu 69 ekor. Kecamatan Bolang Itang Barat memiliki jumlah kambing terbanyak yaitu 1.437 ekor. Rata-rata di setiap kecamatan memiliki keunggulan dalam populasi ternak.



Grafik 26. Komoditi Ternak Per Kecamatan di Kab. Bolmong Utara (Sumber :BPS Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2014)

Peran Penyuluh Pertanian

Kinerja Penyuluh Pertanian Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk ke dalam sektor basis (basic ekonomi) atau berpotensi ekspor dan manakah yang bukan merupakan sektor basis (non basic sektor) apabila hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 1 ($LQ > 1$) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari 1 ($LQ < 1$) berarti sektor tersebut bukan sektor basis.

No.	Sektor	2008	2009	2010	2011	2012	LQ
1	Pertanian	1.29	1.42	1.48	1.41	1.41	1.40
2	Pertambangan dan Penggalian	0.57	0.63	0.62	0.65	0.67	0.63
3	Industri Pengolahan	0.08	0.30	0.31	0.30	0.30	0.26
4	Listrik Gas dan Air Bersih	1.00	1.02	1.00	1.01	1.02	1.01
5	Bangunan	2.31	2.51	1.00	2.47	2.49	2.16
6	Perdagangan Hotel dan Restoran	2.18	0.95	1.00	0.99	0.98	1.22
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.34	1.47	1.00	1.34	1.28	1.28
8	Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.61	0.69	1.00	0.70	0.71	0.74
9	Jasa-Jasa	1.46	1.61	1.00	1.60	1.63	1.46

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka (2008-2012)

Pada Tabel Sektor Pertanian Merupakan Sektor Basis. Sektor basis berarti sektor tersebut mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki sektor-sektor basis seperti bangunan, pertanian listrik, gas dan air

bersih perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa. Dari keenam sektor basis tersebut, sektor pertanian masuk ke dalam daftar kedua tertinggi setelah sektor bangunan. Dalam hal ini ada sektor pertanian yang memiliki skor kedua juga termasuk sektor basis, sehingga pengamatan yang lebih mendalam tentang sektor pertanian dilakukan dengan menganalisis subsektor-subsektor dari sektor pertanian. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Sub Sektor	2008	2009	2010	2011	2012	LQ
1	Tanaman Bahan Makanan	0.63	0.61	0.60	0.64	0.63	0.62
2	Tanaman Perkebunan	2.27	2.28	2.38	2.13	2.14	2.24
3	Peternakan dan Hasil-hasilnya	0.81	0.85	0.82	0.84	0.89	0.84
4	Kehutanan	0.26	0.26	0.24	0.24	0.24	0.25
5	Perikanan	1.32	1.38	1.31	1.35	1.29	1.33

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka (2008-2012)

Berdasarkan Tabel, sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat kontribusi masing-masing subsector pertanian terhadap pembentukan PDRB sektor pertanian. Berdasarkan skor Location Quotient, subsektor pertanian yang menjadi basis yaitu, subsektor tanaman perkebunan, subsektor perikanan dan sub sektor peternakan. Subsektor peternakan menjadi basis karena dukungan dari lahan yang luas, jumlah ternak yang memadai masing-masing kecamatan dan para petani yang menjadi petani tanaman pangan ataupun petani tanaman perkebunan, mempunyai pekerjaan sebagai peternak juga. Hal ini dikarenakan mudahnya mengelola dan merawat ternak, tanpa ada perawatan yang rumit dalam mengelola ternak terutama sapi potong.

C. FGD dan Wawancara

Dalam rangka memperkuat asumsi data yang telah didapat sebelumnya dan sebagai upaya mempertajam penentuan strategi yang tepat, maka tim peneliti Kajian Utara-Utara UNG di Kabupaten Bolmong Utara melakukan kegiatan diskusi kelompok terbatas, FGD dilakukan dengan mempertimbangkan teknik dan persamaan latar belakang peserta FGD maupun sosial ekonomi di masing-masing desa dan menggabungkan beberapa data yang bisa dijadikan landasan. Berikut hasil NOTULENSI FGD potensi dan permasalahan di Kecamatan-Kecamatan prioritas ;

1. Potensi yang ada :

- Kecamatan Sangkup memiliki irigasi terbesar di Indonesia Timur (Desa Pangkusa) Kurang lebih 40 Km dari Ibu kota Kabupaten Bolmut
- Kabupaten Bolmut memiliki beberapa komoditas-komoditas unggulan yaitu kelapa, padi yang terdapat hampir di keseluruhan kecamatan, jagung, cabe, coklat dan peternakan, kacang-kacangan, olahan kopi jahe
- Kelembagaan penyuluhan (BP4K) dan BP3K sudah hampir terbentuk hampir di setiap kecamatan di Bolmong Utara

2. Permasalahan yang dihadapi :

Komoditas Padi

- Untuk pengembangan komoditas padi (padi sawah, ladang) Kendala pertama adalah irigasi, penanaman yang tidak serentak, biaya produksi, sarana produksi (pupuk), hama dan penyakit, infrastruktur, kelembagaan pertanian (kelompok tani/penyuluh), masalah irigasi ini di kecamatan Bolaang Itang Barat masalahnya adalah belum memiliki saluran ke lahan, Kecamatan Pinogaluman memiliki irigasi tapi saluran airnya belum ada
- Bolaang Itang Timur yang memiliki potensi pengembangan sawah tadah hujan tidak memiliki irigasi.
- Penanaman padi belum serentak karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan
- Kurangnya akses jalan usaha tani ke sentra-sentra produksi

Komoditas Kelapa

- Harga jual tidak sesuai dengan biaya produksi (harga kopra)
- Varietas hibrida kurang produksi
- Harga kopra (bela kore) kurang stabil
- Potensi pembuatan minyak kelapa kampung masih sebatas konsumsi belum pada komersial
- Hama kelapa terutama tupai dan kumbang masih menjadi permasalahan
- Pemasaran kelapa baru sebatas di Gorontalo dan Manado

Komoditas Jagung

- Varetas jagung baru sebatas bisi 2
- Permasalahan sarana produksi (benih, pupuk)
- Belum ada produk olahan jagung yang di kembangkan oleh UKM dan industri
- Kurangnya pelatihan terkait diseminasi teknolgi tepat guna dan olahan-olahan jagung
- Belum ada penampung dan pembeli jagung
- Kurangnya silo dan lantai jemur jagung
- Tingginya biaya produksi jagung (high cost)

Peternakan

- Potensi pengembangan peternakan terdapat di Kecamatan Sangkup dan Bolaang Itang Timur (Sang Bintang)
- Belum terintegarsi konsep pertanian terpadu (Jagung/Padi dan Peternakan)
- Belum optimalnya pemanfaatan kotoran hewan (sapi) untuk pupuk organik dengan pemanfaatan limbah jagung dan padi (jerami/sekam padi)
- Kurangnya isentif permodalan untuk kelompok-kelompok peternak (sapi, kambing dan Ayam)

3. Harapan dan usulan masyarakat :

- Untuk meningkatkan produktivitas pertanian terutama padi dan jagung maka perlu di optimalkan pemanfaatan irigasi termasuk irigasi Sangkup termasuk saluran irigasi ke sentra-sentra produksi yang terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Bolmong Utara
- Perlu adanya perencanaan kawasan pewilayahan komoditas yang sesuai dengan potensi-potensi komoditi unggulan lokal yang memiliki potensi pasar
- Perlunya pengembangan sentra kawasan pertanian terpadu/integrasi dengan peternakan di kawasan Sang Bintang
- Perlunya pelatihan penguatan kelompok tani/ternak dalam hal manajemen usaha, pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman

- Perlunya pembenahan infrastruktur jalan usaha tani ke sentra-sentra produksi termasuk fasilitas penunjang produksi seperti silo/gudang dan lantai jemur

4.2.4 Aspek Ekonomi, Industri dan UMKM

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Besaran nilai PDRB merupakan salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur perekonomian suatu wilayah. PDRB sektor usaha di suatu wilayah merupakan gambaran besarnya nilai produk barang dan jasa yang tercapai sebagai hasil dari kegiatan ekonomi masyarakatnya. Ada 3 (tiga) sektor yang berkontribusi penuh terhadap nilai PDRB suatu wilayah, yaitu antara lain:

1. Sektor Primer: Pertanian; Pertambangan dan Penggalian;
2. Sektor Sekunder: Industri Pengolahan; Listrik, Gas Dan Air Bersih; Bangunan;
3. Sektor Tersier: Perdagangan; Hotel Dan Restoran; Pengangkutan Dan Komunikasi; Keuangan; Persewaan Dan Jasa Perusahaan; Jasa – Jasa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun ke tahun terus menerus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) mengalami peningkatan di setiap tahunnya pada lima tahun terakhir (dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011).

Tabel 14. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2007-2011

PDRB	2007		2008		2009		2010		2011	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
I										
Pertanian	121.834,69	38,60	127.948,16	38,06	131.235,05	36,55	137.011,39	35,45	145.973,47	34,92
Pertambangan & Galian	25.833,44	8,19	28.020,49	8,34	30.270,74	8,43	32.530,81	8,42	34.560,54	8,27
II										
Industri Pengolahan	10.650,50	3,37	10.760,20	3,20	10.871,03	3,03	10.993,87	2,84	12.124,52	2,90
Listrik, Gas & Air Bersih	936,52	0,30	955,15	0,28	974,14	0,27	995,34	0,26	1.015,53	0,24
Bangunan	33.748,06	10,69	36.670,64	10,91	40.213,03	11,20	44.161,95	11,43	49.113,93	11,7
III										
Perdag, Hotel & Restoran	28.457,45	9,02	29.080,59	8,65	29.717,42	8,28	30.676,99	7,94	32.951,08	7,88

PDRB	2007		2008		2009		2010		2011	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
Pengangkutan & Komunikasi	9.066,43	2,87	9.348,77	2,78	9.639,95	2,68	10.063,29	2,60	10.504,04	2,51
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	9.902,26	3,14	10.392,87	3,09	10.909,81	3,04	11.404,38	2,95	11.858,47	2,84
Jasa-jasa	75.178,45	23,82	82.954,04	24,68	95.262,91	26,53	108.615,08	28,11	119.938,64	28,69
TOTAL	315.607,82	100	336.130,91	100	359.094,08	100	386.453,09	100	418.040,23	100

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2007-2011

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama kurun waktu 2007-2011 sebesar 2,18 persen per tahun dengan nilai PDRB ADHK tahun 2011 sebesar Rp. 418.040.000,23. Struktur perekonomian dilihat dari PDRB ADHK menunjukkan bahwa besarnya kontribusi menurut jenis usaha terhadap PDRB menunjukkan bahwa sektor pertanian sebesar 36,54 persen; sektor Jasa-Jasa sebesar 26,53 persen; kemudian sektor Bangunan sebesar 11,20 persen. Demikian pula berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), struktur perekonomian dilihat dari tiga klasifikasi sektor PDRB ADHB yang terdiri dari sektor primer (Pertanian; Pertambangan & Penggalan), sektor sekunder (Industri Pengolahan; Listrik, Gas & Air Bersih; Bangunan) dan sektor tersier (Perdagangan, Hotel & Restoran; Pengangkutan & Komunikasi; Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan; Jasa-jasa). Data menunjukkan bahwa pada tahun 2011 kontribusi terbesar berasal dari sektor primer dan diikuti sektor tersier, dan selanjutnya sektor sekunder. Berdasarkan angka kontribusi sektor primer dan tersier yang menopang pertumbuhan perekonomian daerah sehingga dapat dijelaskan bahwa perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan partisipasi dana dari pemerintah.

Tabel 15. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2007-2011

PDRB	2007		2008		2009		2010		2011	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
I										
Pertanian	174.592,75	35,80	202.605,21	35,86	227.288,46	34,88	260.448,00	34,31	310.623,75	34,52
Pertambangan & Galian	37.912,80	7,77	42.345,51	7,49	47.462,65	7,28	53.218,58	7,01	59.523,62	6,61
II										

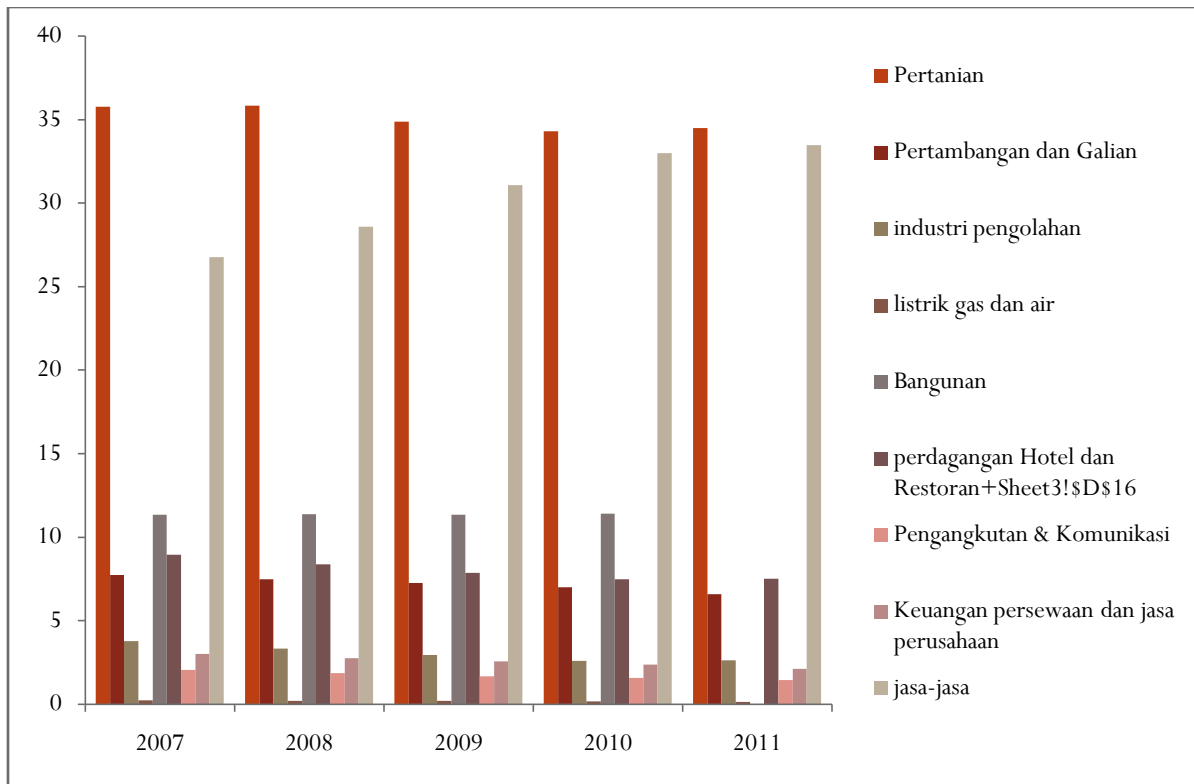
PDRB	2007		2008		2009		2010		2011	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
Industri Pengolahan	18.553,97	3,80	18.968,89	3,36	19.390,39	2,98	19.963,50	2,63	23.790,51	2,64
Listrik, Gas & Air Bersih	1.265,56	0,26	1.317,61	0,23	1.371,23	0,21	1.439,67	0,19	1.510,59	0,17
Bangunan	56.109,35	11,51	64.327,45	11,38	74.224,99	11,39	86.292,21	11,37	102.748,13	11,42
III										
Perdag, Hotel & Restoran	43.774,78	8,98	47.492,35	8,40	51.350,53	7,88	56.938,52	7,50	67.756,93	7,53
Pengangkutan & Komunikasi	10.187,06	2,09	10.617,74	1,88	11.065,66	1,70	12.060,52	1,59	13.154,25	1,46
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	14.708,43	3,02	15.785,86	2,79	16.940,59	2,60	18.137,68	2,39	19.345,35	2,15
Jasa-jasa	130.544,77	26,77	161.590,26	28,60	202.615,91	31,09	250.624,94	33,02	301.392,49	33,49
TOTAL	487.649,47	100	565.050,87	100	651.710,41	100	759.123,63	100	899.845,62	100

Sumber; BPS, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2007-2011

Tabel 16. Persentase Kontribusi Struktur PDRB ADHK dan ADHB

STRUKTUR PDRB	2007		2008		2009		2010		2011	
	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb
I										
Pertanian	38,60	35,80	38,06	35,86	36,55	34,88	35,45	34,31	34,92	34,52
Pertambangan & Galian	8,19	7,77	8,34	7,49	8,43	7,28	8,42	7,01	8,27	6,61
II										
Industri Pengolahan	3,37	3,80	3,20	3,36	3,03	2,98	2,84	2,63	2,90	2,64
Listrik, Gas & Air Bersih	0,30	0,26	0,28	0,23	0,27	0,21	0,26	0,19	0,24	0,17
Bangunan	10,69	11,51	10,91	11,38	11,20	11,39	11,43	11,37	11,75	11,42
III										
Perdag, Hotel & Restoran	9,02	8,98	8,65	8,40	8,28	7,88	7,94	7,50	7,88	7,53
Pengangkutan & Komunikasi	2,87	2,09	2,78	1,88	2,68	1,70	2,60	1,59	2,51	1,46
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,14	3,02	3,09	2,79	3,04	2,60	2,95	2,39	2,84	2,15
Jasa-jasa	23,82	26,77	24,68	28,60	26,53	31,09	28,11	33,02	28,69	33,49
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber; BPS, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2007-2011



Gambar 27. Kontribusi Bidang usaha terhadap PDRB

Tabel 17. Produktifitas Total Daerah Per Sektor PDRB ADHB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 – 2012

PDRB	2007		2008		2009		2010		2011	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
I										
Pertanian	202.605,21	35,86	227.288,46	34,88	260.448,00	36,83	312.359,91	37,67	333.065,84	35,63
Pertambangan & Galian	42.345,51	7,49	47.462,65	7,28	53.218,58	7,53	58.090,90	7,01	64.284,99	6,88
II										
Industri Pengolahan	18.968,89	3,36	19.390,39	2,98	19.963,50	2,82	22.570,03	2,72	25.289,49	2,71
Listrik, Gas & Air Bersih	1.317,61	0,23	1.371,23	0,21	1.439,67	0,20	1.543,80	0,19	1.691,80	0,18
Bangunan	64.327,45	11,38	74.224,99	11,39	86.292,21	12,20	104.843,04	12,65	123.580,99	13,22
III										
Perdag, Hotel & Restoran	47.492,35	8,40	51.350,53	7,88	56.989,85	8,06	63.777,77	7,69	72.227,45	7,73
Pengangkutan & Komunikasi	10.617,74	1,88	11.065,66	1,70	12.060,52	1,71	13.693,58	1,65	15.290,30	1,64

PDRB	2007		2008		2009		2010		2011	
	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	15.785,86	2,79	16.940,59	2,60	18.137,68	2,56	20.203,36	2,44	22.384,74	2,39
Jasa-jasa	161.590,26	28,60	202.615,91	31,09	198.624,94	28,09	232.014,49	27,98	276.908,87	29,62
TOTAL	565.050,87	100	651.710,41	100	707.174,76	100	829.096,88	100	934.724,48	100

Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2007-2011

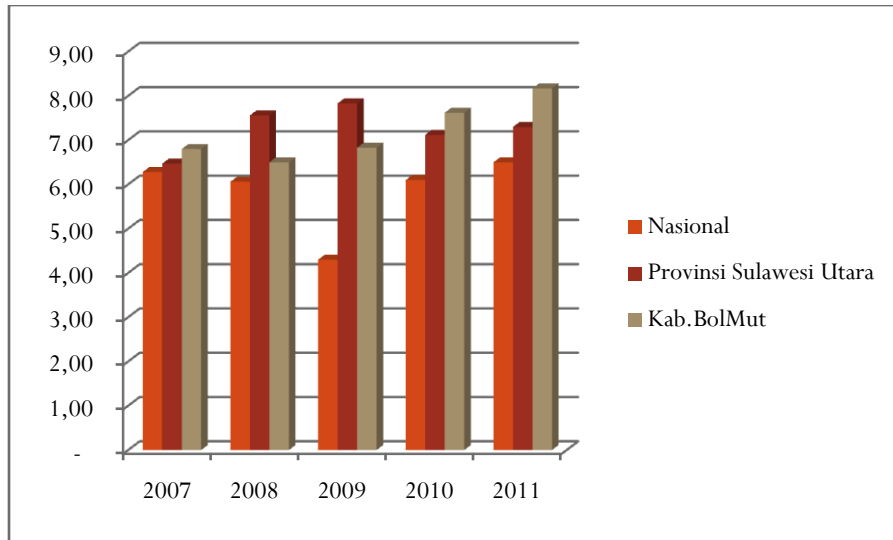
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun terjadi peningkatan produktifitas daerah di setiap sektor perekonomiannya, dan yang menjadi sektor terbanyak kontribusinya adalah sektor pertanian selanjutnya sektor jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian di kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih merupakan kegiatan andalan masyarakat sebagai sumber mata pencaharian.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian suatu wilayah seringkali diukur melalui tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator umum yang dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pengukuran tingkat pertumbuhan suatu wilayah dinilai berdasarkan persentase perkembangan nilai PDRB yang terjadi pada tahun tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semenjak tahun 2008 selalu mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8,17 %, lebih tinggi di bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sulawesi Utara, yang hanya mencapai angka 6,5 % dan 7,3 %.

Tabel 18: Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari Tahun 2007-2011

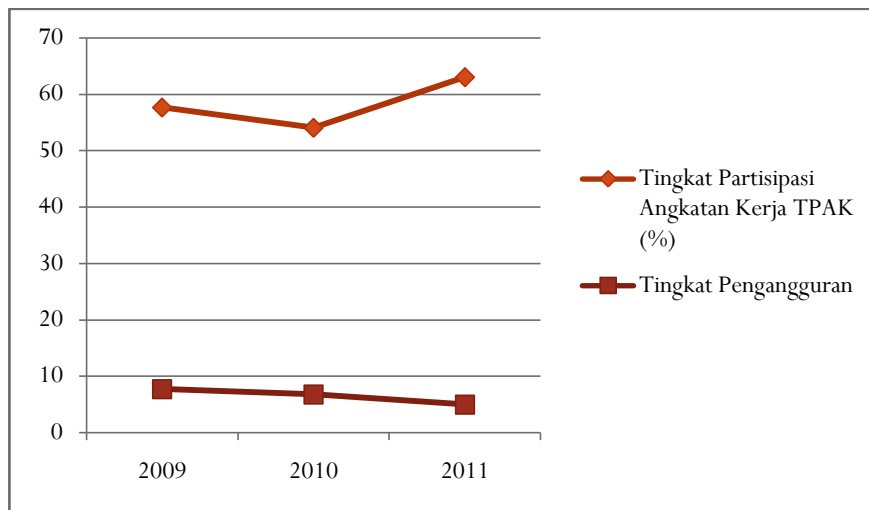
URAIAN	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
Nasional	6,28	6,06	4,3	6,1	6,5
Provinsi Sulawesi Utara	6,47	7,56	7,83	7,12	7,3
Kab. Bolaang Mongondow Utara	6,80	6,50	6,83	7,62	8,17



Gambar 28. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2007-2011 (Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara dan Hasil Analisis Tim, 2012)

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran

Perkembangan perekonomian suatu wilayah membawa dampak pada peningkatan angkatan dan penurunan tingkat pengangguran. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 terjadi peningkatan tingkat angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran. Hal ini didukung oleh semakin meningkatnya sektor usaha bisnis baik industri, perdagangan, dan jasa.



Gambar 29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran (Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012)

D. Sarana Penunjang Kegiatan Perekonomian

Sarana penunjang kegiatan perekonomian memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja. Beberapa sarana penunjang yang perlu dijelaskan sebagai aspek yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di antaranya adalah keberadaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, fasilitas pasar (perdagangan), dan perbankan.

Jumlah koperasi di Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2012 tercatat sebanyak 35 koperasi dengan berbagai jenis koperasi. Koperasi Pertanian merupakan jenis koperasi yang terbanyak dengan jumlah 25 unit yang tersebar 6 wilayah kecamatan. Sebelumnya pada tahun 2009 berdasarkan data BPS jumlah koperasi yang ada sebanyak 64 unit dengan jumlah koperasi terbanyak adalah jenis koperasi produksi. Kurangnya anggota menyebabkan terjadinya penutupan atau tidak berfungsinya lagi koperasi. Hingga tahun 2012 jumlah koperasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebanyak 35 koperasi, yang terdiri dari 2 koperasi Simpan Pinjam, 25 koperasi pertanian, 3 koperasi perkebunan, dan 5 koperasi kehutanan. Selengkapnya distribusi koperasi pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19. Jumlah Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2012

NO	KECAMATAN	JENIS KOPERASI					
		SIMPAN PINJAM	PEMUDA	PERTANIAN	PERKEBUNAN	KEHUTANAN	KARYAWAN
1	Sangkub	1	-	2	-	-	-
2	Bintauna	1	-	9	3	1	-
3	Bolang Itang Timur	-	-	3	-	2	-
4	Bolang Itang Barat	-	-	3	-	-	-
5	Kaidipang	-	-	5	-	-	-
6	Pinogaluman	-	-	3	-	2	-
Jumlah		2	-	25	3	5	-

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka Tahun 2012

Usaha kecil menengah yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berdasarkan data terbaru sebanyak 507 unit usaha secara keseluruhan, jenis usaha yang terbesar adalah pada jenis usaha pangan dengan jumlah 257 unit. Jumlah keseluruhan unit usaha kecil dan menengah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 601 unit maka terjadi penurunan.

Tabel 20. Jumlah Industri Perjenis Unit Usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

NO	URAIAN INDUSTRI	UNIT USAHA	NILAI INVESTASI (RP.1000)	NILAI PRODUKSI (RP.1000)
1	Pangan	206	2.623.112	989.201
2	Sandang	25	121.440	165.669
3	Kimia dan Bahan Bangunan	52	1.094.733	1.900.821
4	Logam dan Electronika	57	679.110	435.400
5	Kerajinan	92	48.000	192.000
6	Aneka Industri	169	360.000	35.000
J U M L A H		601	4.926.395	3.718.091

Sumber : Disperindagkop dan PM Kab.Bolaang Mongondow Utara, 2012

Terkait dengan urusan industri, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum tersedia industri dengan skala besar dan menengah. Saat ini industri yang ada baru berskala kecil dan industri rumah tangga. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari faktor ketersediaan fasilitas perdagangan. Saat ini belum tersedia pasar induk sebagai salah satu fasilitas di kawasan perkotaan. Untuk aktifitas perdagangan skala besar dilakukan jadwal mingguan per kecamatan. Untuk kawasan perkotaan dan kecamatan Bintauna terdapat dua kali hari pasar dalam seminggu dengan melayani masyarakat di daerah sekitarnya. Untuk perdagangan skala kecil tersebar di seluruh kecamatan dalam bentuk warung atau pun mini market. Sumbangsih sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB ADHK dan ADHB, selalu mengalami peningkatan di lima tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2011 nilai sumbangsih sektor perdagangan bersama-sama dengan hotel dan restoran, pada PDRB ADHK sebesar 32.172,94 (juta rupiah) sedangkan pada PDRB ADHB sebesar 64.201,33 (juta rupiah).

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terdapat 6 pasar, yang tersebar pada 6 kecamatan. Selengkapnya mengenai jumlah toko, kios, bak dan tenda pada tiap pasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21. Data Pasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012

NO	KECAMATAN	NAMA PASAR	JUMLAH PASAR	TOKO	KIOS	BAK	TENDA/ TATAKAN
1	Sangkub	Ps. Sangkub	1	1	4	1	18
2	Bintauna	Ps. Bintauna	1	-	8	3	18
3	Bolang Itang Timur	Ps. Bohabak	1	-	3	4	20
4	Bolang Itang Barat	Ps. BolangItang	1	-	5	3	12
5	Kaidipang	Ps. Boroko	1	-	4	2	12
6	Pinogaluman	Ps. Buko	1	-	-	2	10
Jumlah			6	1	24	15	90

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka Tahun 2012

Berdasarkan kondisi yang ada hingga tahun 2012, sarana perbankan yang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah berikut ini:

Tabel 22 . Jumlah Kantor Bank Umum menurut status kepemilikan 2007 - 2012

TAHUN	BANK PEMERINTAH			BANK PEMERINTAH DAERAH			BANK SWASTA NASIONAL		
	KC	KCP	KK	KC	KCP	KK	KC	KCP	KK
2007	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2011	-	-	2	-	1	-	-	-	-
2012	-	1	2						

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka Tahun 2012

E. Penanaman Modal Daerah

Urusan yang terkait dengan penanaman modal salah satunya dapat dilihat adalah dengan jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA). Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui seberapa besar perputaran modal yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Semakin besar persentase jumlah investor dan nilai investasinya maka menggambarkan semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada. Analisis indikator

ini belum terlaksanakan karena belum adanya data terkait jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

F. Komoditas/Jasa Unggulan dan Permasalahan

Tabel 23. Komoditas/Jasa Unggulan Hasil FGD

NO	KOMODITAS/JASA UNGGULAN	PERMASALAHAN
1.	Padi	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi masih belum lancar, sehingga masih terdapat areal persawahan yang tidak terairi dengan baik; • Faktor cuaca sering menjadi kendala alam yang masih sulit dihindari, sehingga produksi sulit untuk diprediksi dengan tepat; • Pola penanaman yang tidak serentak menyulitkan dalam penanganan dan penyediaan sarana produksi; • Kurangnya tenaga penyuluh sehingga menyulitkan petani untuk memperoleh bimbingan langsung di lapangan; • Keterlambatan bantuan sarana dan prasarana produksi, sehingga kegiatan penanaman padi terhambat; • Biaya produksi tidak dapat diprediksi sebagai akibat dari berfluktuasinya harga sarana produksi; • Pupuk/Sarana Produksi tidak tersedia secara kontinu; • Hama/Penyakit • Infrastruktur • Jalan Akses, Bendungan • Kelembagaan • Kerjasama dan Kelompok Tani
2	Kelapa	<p>Harga tidak stabil Minyak Kelapa/ Kopra Gudang Hasil kurang Faktor Alam dan Pemeliharaan Hama banyak gangguan</p>
3	Perikanan	<p>Tangkap Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bom • Tidak beraturan • Pemasaran • Alat Tangkap <p>Budi Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udang • Bandeng • Kerapu <p>Ikan Air Tawar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muzair • Nila <p>Pantai Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum terkelola
4.	Jagung	Modal (Penampung Jagung)

		Sarana Produksi Bibit/ By Produksi
5.	Peternakan	Sapi, Kandang Penyuluh Dokter Hewan Modal

Berdasarkan hasil pembahasan pada kegiatan FGD bertempat di aula Kantor Camat Bolangitang Barat Kabupaten Bolmong Utara yang dihadiri unsur pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan pelaku usaha, diperoleh informasi terkait komoditas unggulan di Kabupaten Bolmong Utara sebagai berikut:

Padi

Sebagian besar daerah ini memiliki lahan pertanian khususnya padi. Padi merupakan makanan pokok masyarakat yang hasilnya sangat besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan petani. Padi yang ada di Kabupaten Bolmong Utara bersumber dari padi sawah dan padi ladang. Khusus padi ladang sumber airnya berasal dari tadah hujan tergantung musim, sedangkan untuk padi sawah sumber airnya berasal dari pengairan irigasi yang ada. Namun demikian ada beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi dari FGD tersebut diantaranya: (1) Irigasi; irigasi menjadi satu-satunya alternatif untuk mengairi sawah. Hampir seluruh kecamatan memiliki irigasi, tetapi terkadang pembagian air yang tidak merata menjadi masalah utama sawah memperoleh sumber air yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi pertanian. (2) cuaca; kekeringan yang selama ini dialami dirasakan oleh sebagian besar petani menjadi faktor penghambat produksi padi. Banyak sawah yang tidak mendapatkan pasokan air sehingga tanaman banyak yang mati. Memang disadari faktor alam sulit untuk dikendalikan oleh manusia. (3) penanaman tidak serentak; kondisi ini disebabkan oleh kurangnya penyuluhan dan keterlambatan bantuan baik pupuk maupun bibit. (4) tingginya biaya produksi; hal ini menyebabkan harga jual padi meningkat. (5) kelangkaan pupuk dan sarana produksi; keberadaan pupuk dan sarana produksi terkait dengan stok yang terbatas serta mekanisme harga yang fluktuatif. (6) hama/ penyakit; masih dirasakan perlu ada penanganan khusus untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Tidak sedikit padi yang mati diakibatkan oleh merambahnya hama/penyakit yang berimbas pada menurunnya produksi. (7) terbatasnya infrastruktur (jalan akses, bendungan); jalan tani dan bendungan sangat mendukung

berhasilnya produksi dan pemasaran hasil pertanian. Selama ini oleh masyarakat khususnya petani dirasa bahwa keberadaan infrastruktur masih sangat terbatas. (8) kelembagaan; kelembagaan yang mengorganisir petani masih sangat rendah eksistensinya. Keberadaan lembaga pemerintah dalam hal ini BP3K belum optimal dalam menggerakkan sektor pertanian. Selain itu pula bahwa kerjasama antar kelompok tani masih kurang. Kecenderungan kelompok tani bergerak secara sendiri-sendiri.

Kelapa

Menurut pendapat masyarakat bahwa kelapa merupakan komoditas kedua terbesar di Kabupaten Bolmong Utara yang juga segai sumber pendapatan masyarakat. Kelapa adalah komoditas yang menghasilkan berbagai jenis produk seperti minyak kelapa, kerajinan, dan lain-lain. Khusus di Kabupaten Bolmong Utara, komoditas kepala diolah hanya untuk minyak kelapa dan kopra. Beberapa masalah yang berhasil diungkap terkait komoditas kelapa: (1) ketidakstabilan harga; hal ini disebabkan oleh keterbatasan produk yang dihasilkan oleh komoditas ini yang hanya terbatas pada minyak kelapa dan kopra gudang. Sehingga nilai jualpun sangat rendah. (2) kurangnya hasil; hal ini disebabkan oleh iklim yang tidak menentu dan pola pemeliharaan tidak teratur. (3) gangguan hama; hal ini menyebabkan banyak kelapa yang mati bahkan tidak produktif lagi.

Perikanan dan Kelautan

Sebagian besar peserta FGD menyampaikan bahwa komoditas sektor perikanan dan kelautan menjadi hal penting bagi masyarakat untuk menggantungkan hidupnya. Berbagai masalah yang muncul di sektor ini antara lain: (1) kegiatan pengeboman ikan secara brutal serta penangkapan yang tidak teratur. Hal ini akan berdampak pada rusaknya ekosistem laut. (2) keterbatasan alat tangkap; dimana masih kurangnya armada dan peralatan tangkap menyebabkan produksi ikan juga terbatas. (3) rendahnya akses pemasaran; hal ini terungkap karena banyak ikan yang sulit untuk dipasarkan. Terkait dengan orientasi pasar masih sebatas untuk konsumsi rumah tangga. Sedang untuk usaha diarahkan ke pasar manado dan gorontalo. (4) kurangnya budidaya ikan; selama ini kegiatan budidaya ikan masih sangat kurang. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan, terbatas pada jenis udang, bandeng, kerapu dan ikan air tawar seperti nila dan muzair. (5) belum terkelolanya pariwisata pantai dan laut; potensi pariwisata pantai dan laut di

Kabupaten Bolmong Utara sangat luas dan menarik. Kondisi ini belum optimal dikelola sebagai tempat pariwisata yang dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat.

Jagung

Komoditas Jagung merupakan salah satu andalan di Kabupaten Bolmong Utara karena dari kultur tanahnya sangat cocok untuk pengembangan komoditas tersebut. Pasarnya pun masih sangat terbuka dengan kondisi harga yang stabil. Beberapa permasalahan dari pengembangan komoditas ini antara lain: (1) terbatasnya modal; khususnya bagi para penampung lokal jagung sehingga para penampung asing menjadi tujuan para petani untuk memasarkan hasil jagungnya. (2) sarana produksi; proses pengolahan lahan dan hasil masih dilakukan secara tradisional belum modern. Disamping itu keberadaan sarana produksi masih dirasakan kurang oleh petani. (3) kurang dan mahal bibit; terbatasnya ketersediaan bibit dan mahal harga bibit menyebabkan biaya produksi jagung semakin tinggi. Sehingga untuk menunjang daya saing juga akan semakin rendah.

Peternakan

Sektor peternakan juga merupakan andalan Kabupaten Bolmong Utara. Penetapan kawasan (SANGBINTANG) menjadi kawasan peternakan sebetulnya merupakan solusi pengembangan komoditas disektor peternakan. Jenis komoditas ternak yang ada antara lain: Sapi, Kambing, Ayam dan itik disamping ternak lainnya yang kurang dominan. Ada beberapa masalah dalam pengembangan ternak ini diantaranya: (1) terbatasnya modal dalam pembuatan kandang; mahal dan terbatasnya bahan baku pembuatan kandang menjadi kendala peternak untuk mengembangkan usahanya. Kandang yang representatif sangat mendukung dalam pertumbuhan dan kesehatan ternak. (2) kurangnya petugas penyuluh dan dokter hewan; pemberian informasi mengenai beternak yang baik, kurang diperoleh oleh para peternak. Keterbatasan tenaga penyuluh menyebabkan peternak menggunakan pola-pola yang biasa dan kurang produktif. Di samping itu keberadaan dokter hewan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan produktifitas ternak. (3) kurangnya keberadaan industri pendukung; industri pendukung yang dimaksud adalah usaha yang bisa mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

4.2.5 Aspek Sarana Umum dan Infrastruktur

Menghadapi era globalisasi yang bergulir begitu cepat yaitu sebagai proses dinamika masyarakat dunia yang semakin berhubungan satu sama lainnya dalam berbagai aspek kehidupan baik budaya, ekonomi, politik teknologi maupun lingkungan maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga melaksanakan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam rangka menuju Bolaang Mongondow Utara yang sejahtera maka semua stakeholders harus mempersiapkan diri untuk mendukung visi dan misi Bolaang Mongondow Utara.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan mewujudkan visi dan misi, maka diterapkan pemerintahan yang baik. Di dalam pelaksanaan pembangunan ditetapkan visi, misi juga ditetapkan untuk mewujudkan visi dengan rumusan sebagai berikut: *Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Mandiri, Religius dan Sejahtera*. Selanjutnya dalam pelaksanaan misi tersebut ditetapkan empat strategi utama yaitu:

- Mewujudkan Pemerintahan yang entrepreneur.
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Membangun Infrastruktur yang handal.
- Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat berbasis sektor pertanian termasuk perikanan dan agroindustri yang berkelanjutan.

Aspek finansial menjadi perhatian karena dana pemerintah yang ditata dalam APBN dan APBD harus digunakan untuk berbagai program prioritas demi memperlancar kegiatan pembangunan lokal. Percepatan pembangunan infrastruktur akan membutuhkan dana yang relatif besar. Pendanaan program kegiatan percepatan infrastruktur bila hanya bergantung pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat tidak memungkinkan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara harus melakukan perencanaan keuangan daerah dan berupaya untuk mendapatkan dana APBD Provinsi dan APBN.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan infrastruktur akan berkontribusi terhadap implementasi program kegiatan pembangunan di era otonomi daerah. Ketika kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kurang tepat maka dirasakan kesulitan dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Aparatur pemerintah sebagai perencana pelaksana percepatan pembangunan yang melakukan penilaian persepsi tentang pengaruh dari sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana dan kebijakan pembangunan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dibatasi

pada infrastruktur ke Pekerjaan Umum (PU) an dengan fokus pada sarana fisik terutama jalan dan jembatan. Fokus lain pada persepsi terhadap APBD sisi Belanja Langsung atau Belanja Program Kegiatan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama pada kebijakan penganggaran dan kebijakan dalam penentuan prioritas program percepatan infrastruktur.



Jalan Desa



Perawatan Jalan Utama



Jalan Rawan Kecelakaan



Rumah Layak Huni



Optimalisasi Sarana



Pasar Tradisional



Sekolah



Cagar Budaya



Pariwisata



Sarana Energi



Pelabuhan



Jembatan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Di Bolaang Mongondow Utara yang baru dimekarkan beberapa tahun lalu, sejumlah fasilitas pendukung juga masih terbatas dan perlu terus untuk ditingkatkan. Selain sarana jalan dan jembatan, sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan juga masih perlu untuk ditambah. Optimalisasi sarana juga perlu ditingkatkan, terutama sarana yang sudah terbangun tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap percepatan infrastruktur. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia akan memberi percepatan pada pembangunan terutama infrastruktur. Sumber daya manusia aparatur sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur.
- Sumber finansial / dana berpengaruh signifikan terhadap percepatan infrastruktur sehingga makin meningkat sumber finansial / dana maka percepatan pembangunan lebih baik. Sumber finansial / dana aparatur sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Kebijakan pembangunan berpengaruh signifikan terhadap percepatan infrastruktur. Artinya kebijakan pembangunan lebih diperhatikan maka percepatan pembangunan infrastruktur mengalami percepatan. Kebijakan pembangunan sangat berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Ada pengaruh signifikan dari ke tiga variabel bebas yakni sumber daya manusia, sumber daya finansial/dana, dan kebijakan pembangunan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan bersifat positif. Hal ini berarti secara bersama – sama ketiga variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel percepatan pembangunan infrastruktur dan variasi dari percepatan pembangunan infrastruktur merupakan hasil dari kontribusi dari sumber daya manusia, sumber daya finansial / dana dan kebijakan pembangunan. Sumber daya manusia, sumber daya finansial/dana, kebijakan pembangunan secara bersama – sama

memberi pengaruh signifikan dan bersifat positif terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Selanjutnya, untuk meningkatkan akselerasi pembangunan sarana umum dan infrastruktur di Bolaang Mongondow Utara, dapat direkomendasikan beberapa hal berikut:

- Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kompetensi dan kualifikasi melalui pelaksanaan bimbingan teknis terkait percepatan infrastruktur, dan pelatihan perencanaan pembangunan secara intensif.
- Perlu diidentifikasi dan diperluas jenis atau sumber – sumber keuangan daerah, oleh karena itu masih perlu dilakukan kajian menyangkut aspek sumber–sumber keuangan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.
- Selain sumber dana, perlu dikaji kebijakan pembangunan yang ditempuh oleh pemerintah eksekutif maupun pemerintah legislatif. Bagi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu memperhatikan implementasi kebijakan pembangunan mulai pada tahapan perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengendalian percepatan pembangunan infrastruktur.

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian awal yang difokuskan pada pengumpulan data dan informasi sekunder, dan dilanjutkan dengan kegiatan survey serta FGD, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan potensi daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berikut ini:

- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi sumberdaya manusia baik kuantitas maupun kualitasnya yang cukup besar sebagai modal sosial untuk melaksanakan pembangunan yang dipadukan dengan kearifan lokal dan budaya masyarakat.
- Potensi sosial budaya merupakan potensi yang terdapat di kehidupan masyarakat termasuk masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Keberagaman budaya itu merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat yang harus dikelola dengan baik. Apabila tidak dikelola dengan baik, aspek sosial budaya yang didalamnya termasuk keberagaman status sosial dan juga pola budaya akan dapat mendorong timbulnya persaingan dan pertentangan sosial, bahkan pecahnya konflik sosial. Namun, apabila dibina dan dikelola dengan baik, keragaman sosial dan budaya akan menjadi suatu kekuatan atau potensi dalam melaksanakan pembangunan baik di tingkat daerah, maupun nasional.
- Produksi perikanan, terutama perikanan budidaya dalam kurun waktu 2010 hingga 2015 menunjukkan trend peningkatan yang cukup besar, yaitu 15,8% per tahun, sedangkan untuk perikanan tangkap peningkatan produksi per tahunnya hanya mencapai 0,9%.
- Implementasi strategi pengelolaan sumberdaya perikanan dan laut di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan dengan menggali kekuatan dan kemandirian dengan pendekatan kewenangan pemerintah bekerjasama dengan seluruh stakeholder terkait untuk mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir, peningkatan industri dan usaha perikanan yang berwawasan lingkungan, serta untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya alam.
- Beberapa komoditas pertanian berpotensi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan seperti padi sawah, jagung, kedelai nanas, pisang, ubi jalar dan ubi kayu. Sedangkan komoditas perkebunan yang berpotensi menjadi komoditas unggulan antara lain kakao, kopi, kelapa aren, cengkeh, pala dan vanili.

- Ternak sapi dan unggas ayam merupakan komoditas peternakan yang berpotensi dikembangkan sebagai komoditas unggulan.
- Berdasarkan struktur perekonomian dilihat dari PDRB ADHK menunjukkan bahwa besarnya kontribusi sektor pertanian sebesar memberikan kontribusi tertinggi, yaitu 36,54 persen dan diikuti oleh sektor jasa sebesar 26,53 persen;
- Penentuan komoditas dan jasa unggulan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kajian Potensi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan dipertajam dengan pengembangan beberapa metode dan analisis pada Aspek Ekonomi, Industri dan UMKM.
- Sarana umum dan Infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, terutama sarana transportasi darat sudah cukup memadai sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, walaupun ketersediaan infrastruktur seperti, telekomunikasi, sanitasi, dan energi masih perlu dimaksimalkan.
- Terkait dengan Kerjasama Utara-utara Sulawesi, kondisi obyektif pemerintahan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan dukungan yang cukup besar untuk mengimplementasikan model kerjasama agar dapat dijalankan dengan optimal.

5.2 Saran

Mengingat bahwa tujuan, output dan ruang lingkup kajian ini cukup luas, maka sangat diperlukan peran aktif para stakeholder baik masyarakat maupun instansi dan SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk bekerjasama pada setiap tahapan penelitian, sehingga hasilnya dapat berdaya guna untuk pembangunan daerah dan implementasi Kerjasama Utara-utara Sulawesi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2014. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka. ISBN : 978-602-71071-4-4
ISSN : 0215-7055.
- Effendi, H., 2003. Telaah Kualitas Air. Kanisius. Yogyakarta. 258hal.
- Frank, Flo and Anne Smith, 2000, *The Partnership Handbook*, Ministry of Public and Government Services, Canada.
- Gulland, J.A. 1991. Fish Stock Assessment. Rome : Food and Agriculture Organization of United Nation (FAO). *dalam* Astuti, Evie Maulina. 2005. Dimensi Unit Penangkapan Pukat Udang dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Udang di Perairan Laut Arafura. Skripsi. IPB. Bogor.
- LAPAN (2004). Pembangunan Ekonomi Masyarakat Tahun Anggaran tentang Implementasi dan Pembinaan Pemanfaatan Penginderaan Jauh untuk KJT dan rumput laut (Studi Kasus: Kesesuaian Perairan Budidaya Ikan Kerapu dengan Menggunakan Keramba Jaring Apung di Kabupaten Situbondo).
- Lembaga Administrasi Negara, 2004, *Pengelolaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah: Tinjauan Atas Beberapa Ketentuan dan Substansi Dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah*, Jakarta.
- Pamudji, S.1985.Kerjasama Antar Daerah dalam rangka Pembinaan Wilayah: Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara. Jakarta: Bina Aksara
- Sparre, P and S.C. Venema. 1992. Introduction to Tropical Fish Stock Assesmmnt. Part 1. Manual. FAO. Rome. *dalam* Saputra, Suradi Wijaya. 2009. Dinamika Populasi Ikan Berbasis Riset. Undip. Semarang.
- Muhammad, S. 2002. Kajian Ekonomi Rumah Tangga Nelayan. Analisis Simulasi Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Secara Berkelanjutan. Disertasi. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. hlm 12. *dalam* Simanungkalit, Wesley. 2007. Pengembangan Perikanan Kakap Putih (*Lates Calcarifer*) di Kabupaten Mimika. IPB. Bogor.
- Odum, E.P. 1963. Ecology, Second Edition. Holt,Rinehart and Windston, Inc Allrights Reserve, 243 pp.
- Radiarta, I N., Saputra, A., & Priono, B. 2004.Pemetaan kelayakan lahan untukpengembangan usaha budidaya laut diTeluk Saleh, Nusa Tenggara Barat. *J. Pen.Perik. Indonesia*, 10(5): 19-32.
- Utojo, Malik. A. T., Hasnawi. 2007. Pemetaan Kelayakan Lahan Untuk Pengembangan Budidaya Rumput Laut Di Teluk Sopura, Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara. Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan Torani. Makassar.
- Warsono, Hadi, 2009, Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah Yang Berdekatan di Jawa Tengah), [Disertasi] Program Doktor Ilmu Administrasi Negara, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Kerjasama Antara:



**PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**



**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**